

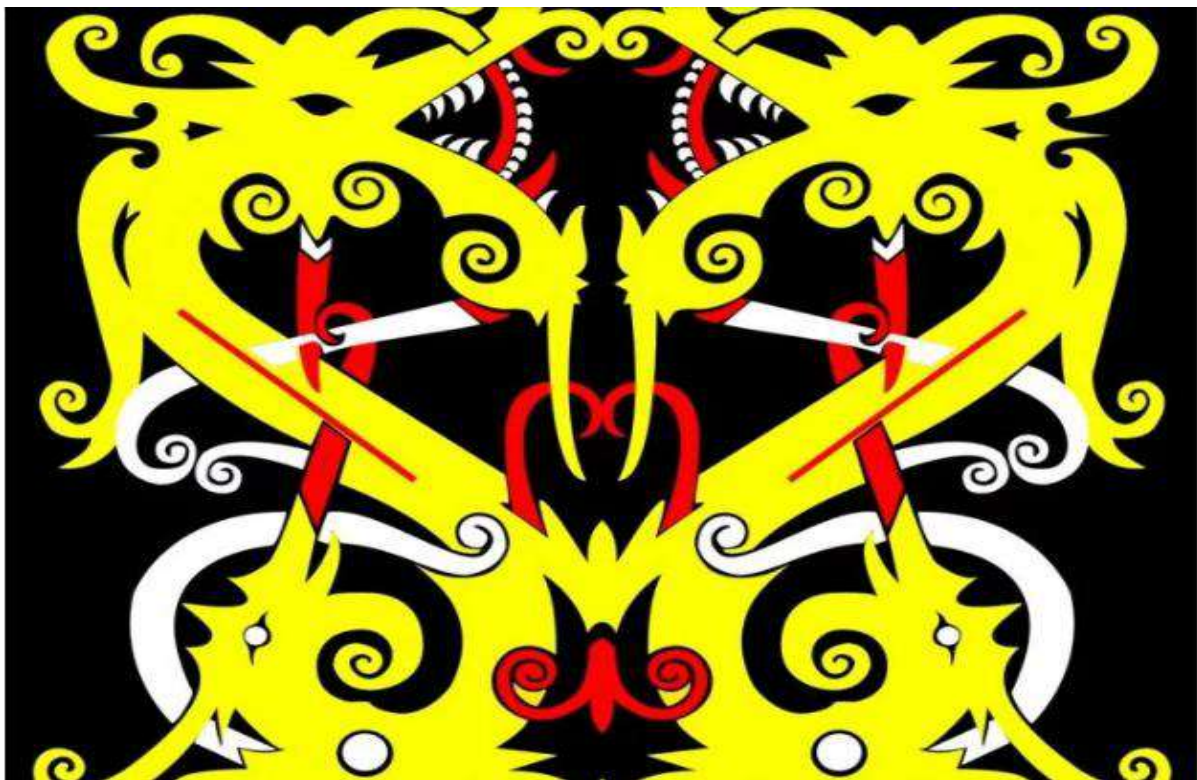


LAPORAN KINERJA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KALIMANTAN TIMUR

2018



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A.... GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
B....LANDASAN HUKUM	2
C....TUGAS POKOK DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI.....	3
D.... ISU STRATEGIS	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA LPMP KALIMANTAN TIMUR	6
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A....CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	9
B.... REALISASI ANGGARAN	78
BAB IV. PENUTUP	85
LAMPIRAN :	
- FORMULIR RENSTRA	
- Capaian Kinerja LPMP KALTIM 2018	
- Pengukuran Kinerja 2018	
- Perjanjian Kinerja Awal 2018	
- Perjanjian Kinerja Revisi 2018	
- Kertas Kerja Reviu Lporan Kinerja	
- Pernyataan telah direviu	

KATA PENGANTAR KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KALIMANTAN TIMUR



Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh...

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua...

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya LPMP Kalimantan Timur berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2018 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja LPMP Kalimantan Timur tahun 2018.

LPMP Kalimantan Timur pada tahun 2018 menetapkan 2 sasaran strategis dan terdapat 14 indikator kinerja sebagaimana tercantum pada perjanjian Kinerja. Pada sasaran strategis ke satu (1) “Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh jenjang pendidikan terdiri atas 12 indikator kinerja sedangkan pada sasaran strategis ke dua (2) “Terwujudnya tatakelola LPMP Kalimantan Timur yang baik “terdiri atas 2 indikator kinerja. Secara umum LPMP Kalimantan Timur telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya :

1. Masih rendahnya capaian SNP di Satuan Pendidikan Kalimantan Timur
2. Hasil pemetaan mutu pendidikan belum dimanfaatkan secara optimal untuk penentuan kebijakan, penyusunan program dan alokasi anggaran pendidikan

3. Budaya mutu belum tumbuh dan berkembang secara optimal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
4. Hasil Rapot mutu secara ONLINE untuk seluruh sekolah belum semuanya dapat diakses dan mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan hasil peta mutu belum dimanfaatkan dalam penyusunan program dan alokasi anggaran.

Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LPMP Kalimantan Timur pada tahun 2018. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja LPMP Kalimantan Timur pada tahun 2018.

Samarinda, 29 Desember 2018

Kepala LPMP Kalimantan Timur,



Mohamad Hartono, SH.M.Ed
NIP.196701101994031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja LPMP Kalimantan Timur Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis LPMP Kalimantan Timur Tahun 2015 – 2019. Laporan kinerja LPMP Kalimantan Timur ini juga memberikan informasi tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) *output* yang terdiri atas 14 indikator kinerja dan 8 sub indikator kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2018 dan capaian program unggulan LPMP Kalimantan Timur tahun 2018.

LPMP Kalimantan Timur menyajikan laporan capaian kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Kalimantan Timur Tahun 2018 yang terkait dengan sasaran strategis yang terdapat dalam renstra LPMP KALTIM yaitu (1) Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan dan (2) Terwujudnya Tata Kelola LPMP Kalimantan Timur yang Baik.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh Jenjang Pendidikan terdapat 2 (dua) *output*, yaitu:

I. Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya

Pada *output* ini ada 8 indikator kinerja yakni :

1. Jumlah SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya;
2. Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya;
3. Jumlah SMP yang telah dipetakan mutunya;
4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya;
5. Jumlah SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya;
6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya;
7. Jumlah SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya;
8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya.

II. Satuan Pendidikan yang difasilitasi dan disupervisi berdasarkan 8 SNP

Pada Output ini ada 4 indikator kinerja, dengan 8 sub indikator yakni :

1. SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP, dengan sub indikator kinerja :
 - 1.a. SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP melalui kegiatan pengembangan sekolah model.
 - 1.b. SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP melalui kegiatan pelaksanaan kurikulum 2013.
2. SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP, dengan sub indikator kinerja :
 - 2.a. SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP melalui kegiatan pengembangan sekolah model.

- 2.b. SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP melalui kegiatan melalui pelaksanaan kurikulum 2013.
- 3. SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP, dengan sub indikator kinerja :
 - 3.a. SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP melalui kegiatan pengembangan sekolah model.
 - 3.b. SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP melalui kegiatan pelaksanaan kurikulum 2013.
- 4. SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP, dengan sub indikator kinerja :
 - 4.a. SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP melalui kegiatan pengembangan sekolah model.
 - 4.b. SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP melalui kegiatan pelaksanaan kurikulum 2013

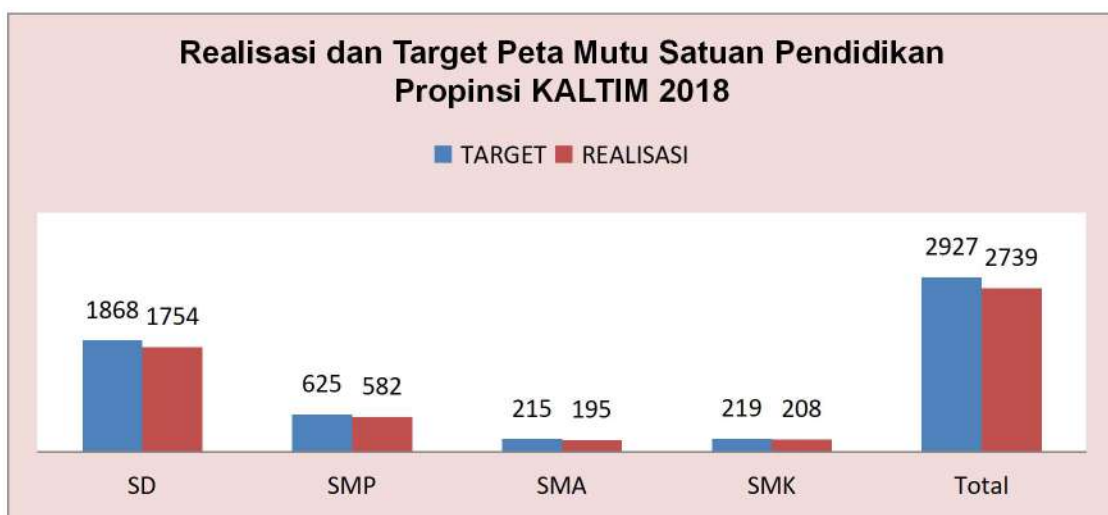
Pada sasaran strategis terwujudnya tata kelola LPMP Kalimantan Timur yang baik, terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

- 1. Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru;
- 2. Nilai Minimal SAKIP LPMP Kalimantan Timur.

A. Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya

Berdasarkan perjanjian kinerja 2018 dan data realisasi kegiatan 2018 LPMP Kalimantan Timur, pada indikator kinerja “Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya di Seluruh Jenjang Pendidikan” mempunyai target 2.927 sekolah, dengan realisasi 2.739 sekolah. Persentase realisasi ini mencapai 93,58%, dan masih terdapat 188 atau 6,42% sekolah yang belum mengirimkan data mutunya.

Grafik 1. Realisasi dan Target Peta Mutu Satuan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

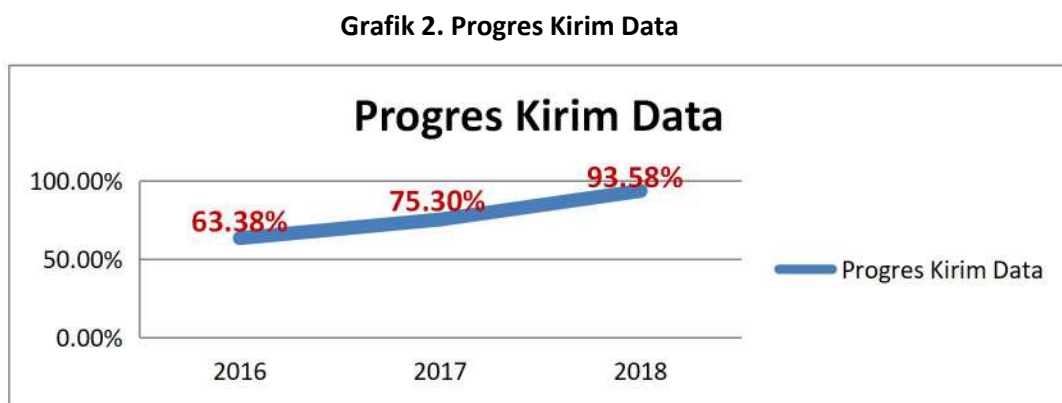


Sumber data: Aplikasi DAPODIK, PMP ONLINE 2017 dan 2018

Realisasi ini masih berada di bawah target awal yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit di jangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.
2. Dalam aplikasi DAPODIK, ada sekolah yang masih terdaftar sementara sekolah tersebut sebenarnya sudah tutup dan tidak aktif beroperasi, dikarenakan tidak dilakukannya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang mempunyai kewenangan terhadap validasi dan pemutakhiran data sehingga mengakibatkan penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.

Tren Progres Pengiriman Data Penjaminan Mutu Pendidikan (Pemetaan Mutu Pendidikan) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, 2017, dan 2018 sebagai berikut:

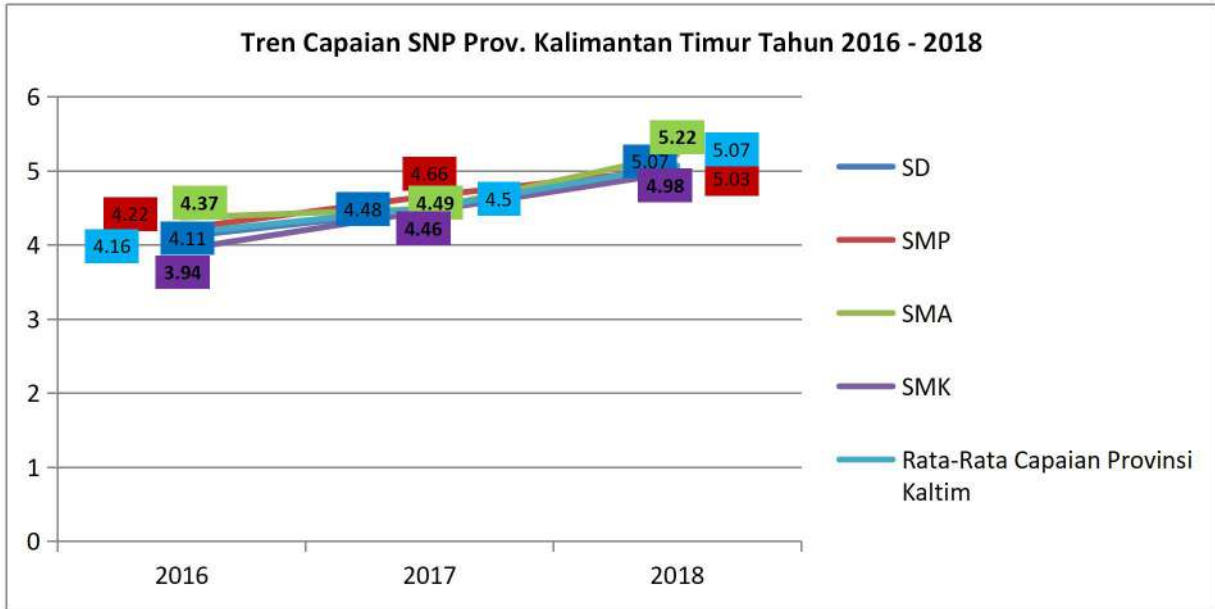


Sumber data: Aplikasi PMP ONLINE 2017 dan 2018

Dari tahun 2016 sampai 2018, progres kirim data PMP Provinsi Kalimantan Timur terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran satuan pendidikan akan pelaksanaan peta mutu semakin baik dan hal ini juga menunjukkan hubungan komunikasi antara LPMP Kaltim dan para *stakeholder* dalam proses pemetaan mutu pendidikan berjalan dengan baik dan semakin efektif.

Adapun hasil capaian 8 SNP/rapot mutu dari tahun 2016 ke tahun 2017 dan dari tahun 2017 ke tahun 2018, yang diperoleh dari aplikasi PMP Online 2017 dan 2018 adalah.

Grafik 3. Tren Capaian SNP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2018

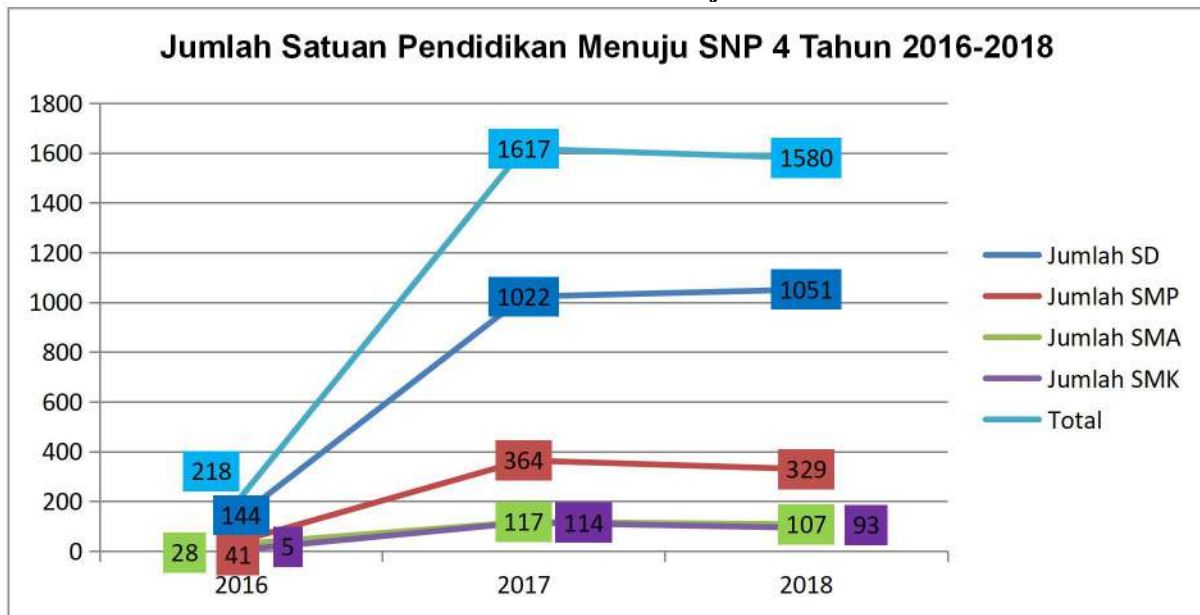


Sumber data : Aplikasi PMP ONLINE 2017 dan 2018

Berdasarkan Tren Capaian 8 SNP per Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016, 2017, dan 2018 menunjukkan terjadinya peningkatan mutu pendidikan. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya nilai capaian SNP dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

Adapun grafik jumlah sekolah per jenjang yang capaian SNP-nya termasuk kategori menuju SNP 4, dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 4. Jumlah Satuan Pendidikan Menuju SNP 4 Tahun 2016-2018



Sumber data : Aplikasi PMP ONLINE 2017 dan 2018

Grafik di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan tahun 2016 dengan tahun 2017, pada tahun 2016 jumlah sekolah dari seluruh jenjang pendidikan yang menuju SNP 4 adalah

218 sekolah, dan pada tahun 2017 terdapat 1.617 sekolah, sedangkan pada tahun 2018 ini jumlah sekolah yang menuju SNP 4 dari seluruh jenjang pendidikan terdapat 1.580 sekolah. Jumlah sekolah yang menuju SNP 4 ini menurun jika dibandingkan tahun 2017. Hal ini disebabkan karena :

1. Pada tahun 2017, kebanyakan sekolah masih belum memahami makna dari pemetaan mutu pendidikan dan menginput data ke dalam aplikasi tidak berdasarkan pada kondisi riil sekolah.
2. Sebagian besar sekolah juga belum memahami bahwa hasil pemetaan mutu tersebut digunakan dalam rangka untuk menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah yang ada hubungannya dengan pengalokasian dana BOS.
3. Capaian SNP untuk seluruh sekolah belum semuanya dapat diakses secara online karena sistem aplikasi online masih perlu pembenahan dan update.

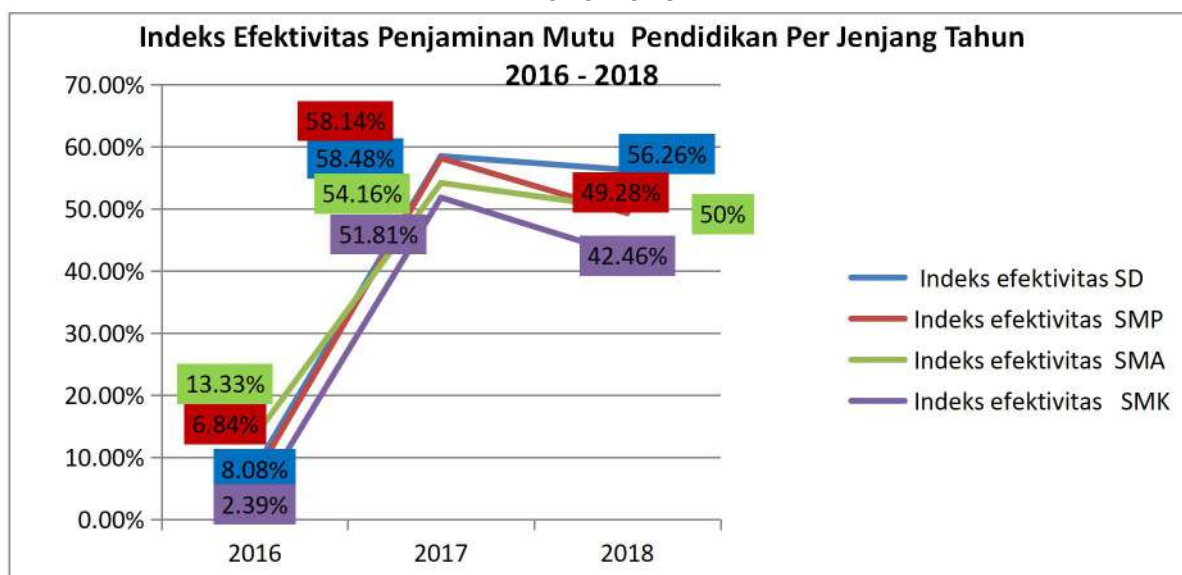
Meskipun jumlah sekolah menuju SNP 4 pada tahun 2018 ini berkurang jika dibanding tahun 2017 tidak mengindikasikan bahwa terjadi penurunan mutu pendidikan, karena capaian rata-rata SNP di seluruh jenjang pendidikan Provinsi Kalimantan Timur meningkat yang berarti terjadi pula peningkatan mutu pendidikan, seiring dengan adanya penerapan dan pemahaman tentang penjaminan mutu pendidikan di satuan-satuan jenjang pendidikan yang ada di Kalimantan Timur. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel persentase satuan pendidikan perjenjang yang meningkat indeks efektivitasnya tahun 2016, 2017, dan 2018 di bawah ini:

Tabel 1. Persentase Satuan Pendidikan Perjenjang yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya Tahun 2016, 2017 dan 2018

Tahun	Indeks efektivitas SD	Indeks efektivitas SMP	Indeks efektivitas SMA	Indeks efektivitas SMK
2016	8,08%	6,84%	13,33%	2,39%
2017	58,48%	58,14%	54,16%	51,81%
2018	56,26%	49,28%	50%	42,46%

Sumber data : Aplikasi PMP ONLINE 2017 dan 2018

Grafik 5. Indeks Efektivitas Penjaminan Mutu Pendidikan Per Jenjang Tahun 2016-2018



Output dari peta mutu pendidikan adalah diperolehnya capaian SNP dan rekomendasi mutu di tingkat sekolah, kabupaten maupun provinsi.

Adapun Rekomendasi secara umum berdasarkan hasil capaian SNP adalah Pemerintah daerah perlu mendorong :

1. Peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah
2. Mengadakan berbagai lomba untuk meningkatkan keterampilan dan kreatifitas siswa untuk semua jenjang
3. Peningkatan kualifikasi guru
4. Peningkatan anggaran pendidikan hingga 20% untuk setiap kabupaten/kota dan Provinsi.

Outcome dari hasil peta mutu sekolah adalah

- a. Dapat digunakan oleh sekolah dan para pengambil kebijakan dalam menyusun program RPJMN dan program Rencana Kerja Tahunan,
- b. Pihak sekolah dapat mengetahui kondisi sekolah mereka yang sebenarnya,
- c. Penjaminan mutu digunakan dalam pengelolaan manajemen sekolah dan manajemen pembelajaran secara mandiri dan berkelanjutan.

Impact dari hasil peta mutu sekolah ini adalah adanya

- a. Peningkatan mutu Pendidikan di sekolah
- b. Terjadinya budaya mutu

Hambatan/kendala permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit dijangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.

- b. Ada sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi tetapi masih terdaftar dalam DAPODIK karena tidak adanya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang berwenang, sehingga penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.
- c. Adanya penggunaan aplikasi ilegal dalam mempercepat proses pengisian PMP

- Langkah antisipasi

Langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam menangani hambatan dan permasalahan di atas adalah

1. Untuk wilayah terpencil yang sulit dengan akses internet dapat melakukan penginputan pada wilayah yang dekat dengan akses internet dan dibentuk tim yang anggotanya berasal dari unsur pengawas sebanyak 351 orang pengawas di 10 Kabupaten/Kota dan operator sekolah sebanyak 29 orang di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dengan maksud agar dapat memberikan arahan dan menyampaikan informasi tentang penginputan data PMP ke dalam aplikasi DAPODIK 2018.
2. Membangun komunikasi dan komitmen yang lebih efektif lagi antara LPMP, Diknas Kab/Kota, Pengawas, dan satuan pendidikan di kab/kota, agar sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi, segera dilakukan pemutakhiran data, melakukan identifikasi dan kontrol validasi secara aktif serta melakukan pemetaan data invalid. Sehingga penginputan data PMP tersebut dapat mencapai 100%
3. Mensosialisasikan kepada seluruh operator agar tidak menggunakan aplikasi yang ilegal sebagai gantinya diadakan penyempurnaan terhadap aplikasi PMP serta pelatihan penggunaan aplikasi PMP kepada operator sekolah.

B. Satuan Pendidikan yang Difasilitasi Berdasarkan SNP

Ketercapaian indikator kinerja satuan pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model dan Implementasi Kurikulum 2013.

B.1. Program Pengembangan Sekolah Model

Jumlah sekolah model (SPMI dan SPME) yang menjadi target LPMP Kalimantan Timur tahun 2018 adalah 220 sekolah dan terealisasi 220 sekolah. Jadi persentase realisasi adalah 100%.

Tabel 2. Jumlah Sekolah Model (SPMI dan SPME)

Jenjang	SD	SMP	SMA	SMK	TOTAL
Target	59	60	50	51	220
Realisasi SPMI/SPME	94	60	38	28	220

Tren capaian 8 SNP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016, 2017 dan 2018 pada sekolah model melalui kegiatan SPMI dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 6. Rata-rata SNP Sekolah Model LPMP Kalimantan Timur 2016-2018



Tabel 3. Capaian 8 SNP Berdasarkan Kategori Di Provinsi Kalimantan Timur

JENJANG	RATA - RATA SNP 2016	kategori SNP	RATA- RATA SNP 2017	kategori SNP	RATA- RATA SNP 2018	kategori SNP
SD	3,23	Menuju SNP 2	4,93	Menuju SNP 3	5,18	Menuju SNP 4
SMP	3,44	Menuju SNP 3	5,07	Menuju SNP 4	5,07	Menuju SNP 4
SMA	4,05	Menuju SNP 3	5,21	Menuju SNP 4	5,38	Menuju SNP 4
SMK	3,43	Menuju SNP 2	4,28	Menuju SNP 3	5,41	Menuju SNP 4
RATA- RATA	3,53	Menuju SNP 2	4,87	Menuju SNP 3	5,26	Menuju SNP 4

Sumber data : aplikasi PMP Online 2017,2018 dan data offline 2018

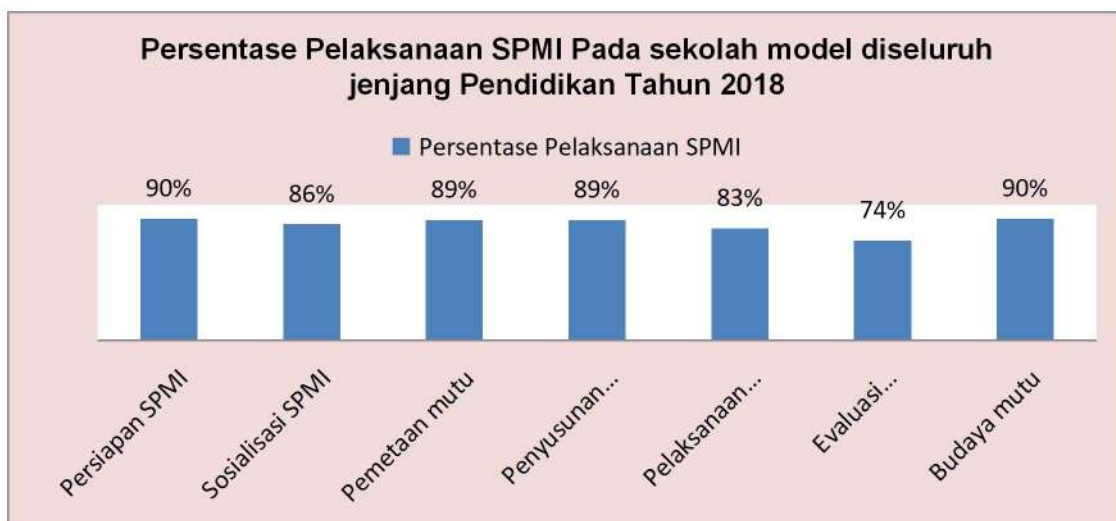
Dalam mengukur ketercapaian indikator “Satuan pendidikan yang telah disupervisi dan difasiltasi berdasarkan SNP”, dapat diperoleh dengan melihat capaian 8 SNP tahun 2016 ke tahun 2017 dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 pada rapor mutu aplikasi DAPODIK online. Peningkatan mutu pendidikan dan penerapan penjaminan mutu pendidikan melalui kegiatan SPMI pada sekolah model, untuk seluruh jenjang pendidikan berdasarkan tabel di atas pada tahun 2016, diperoleh rata-rata capaian SNP adalah 3,53 termasuk kategori menuju SNP 2, sedangkan pada tahun 2017 capaian SNP untuk seluruh jenjang diperoleh rata-rata 4,87 termasuk kategori menuju SNP 3. Pada tahun 2018 ini, diperoleh rata-rata capaian SNP adalah 5,26 termasuk kategori menuju SNP 4, sehingga melalui pengukuran ini maka

ketercapaian sasaran strategis LPMP Kalimantan Timur melalui penjaminan mutu pendidikan, juga dapat terlihat peningkatannya. Hal ini dapat dibuktikan dari makin meningkatnya nilai capaian SNP dari tahun ke tahun yakni dari tahun 2016 ke tahun 2017 dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 pada program sekolah model.

Dengan adanya hasil peta mutu sekolah tersebut, maka output dari program sekolah model ini dapat diperoleh suatu rekomendasi peningkatan mutu baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kabupaten/provinsi dalam rangka penyusunan program tahunan dan 4 tahunan (RKS/RKAS) di sekolah atau program jangka menengah pendidikan di provinsi Kalimantan Timur.

Berikut disajikan hasil implementasi sistem penjaminan mutu Internal pada sekolah model tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik 7. Hasil Implementasi SPMI Sekolah Model Setiap Kab/Kota di Kalimantan Timur



Sumber data : data offline SPMI 2018

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar sekolah model yang ada di 10 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur telah menerapkan siklus SPMI. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya SPMI di sekolah akan dapat membantu sekolah tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikannya dan mampu menerapkan SPMI sebagai bagian dari penerapan manajemen sekolah dan manajemen pembelajaran yang dilaksanakan secara terus menerus, mandiri, akurat, terstandar, dan terdokumentasi agar dapat tercipta budaya mutu di sekolah.

Hambatan/kendala permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja antara lain :

1. Sebagian besar sekolah merasa terbebani dan tidak terbiasa dengan adanya pengadministrasian sekolah model sehingga merasa telah menyita waktu proses belajar mengajar di sekolah.
2. Sebagian besar sekolah belum terbiasa untuk mendokumentasikan capaian kinerja dari apa yang mereka programkan berdasarkan RKAKS.

Langkah antisipasi yang diambil dalam menghadapi permasalahan dalam mencapai target indikator kinerja adalah

1. Senantiasa melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap sekolah model melalui kegiatan monitoring dan evaluasi SPMI agar sekolah dapat memahami penerapan SPMI sebagai suatu sistem yang harus dilaksanakan secara mandiri, terus menerus, terstandar terdokumentasi dan akurat dalam manajemen pembelajaran dan manajemen sekolah sehingga dapat tercipta budaya mutu di sekolah dan memberi pemahaman bahwa hasil dari penerapan SPMI tersebut dapat digunakan dalam rangka penilaian akreditasi sekolah.
2. Senantiasa Memberikan pembinaan dan pemahaman untuk selalu menerapkan SPMI dan mendokumentasikan dokumen sesuai dengan RKAS.

Outcome/Manfaat dari hasil profil mutu/raport mutu sekolah model adalah.

- a. Proses pembelajaran berjalan sesuai standar
- b. Pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai dengan standar.

Dampak/Impact dari pelaksanaan Penjaminan mutu secara terus menerus pada sekolah model adalah :

1. Budaya mutu di satuan pendidikan terbangun
2. Mutu hasil belajar meningkat

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan pada sample 100 sekolah untuk seluruh jenjang pendidikan, rata-rata sekolah yang menerapkan SPMI pada sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan 5 siklus Penjaminan Mutu Pendidikan (pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penetapan standar baru) telah mencapai 86% sekolah yang telah menerapkan SPMI ini baik dalam pengelolaan manajemen sekolah maupun manajemen pembelajaran.

B.2. Program Implementasi Kurikulum 2013

Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada tahun 2018 ditargetkan 967 sekolah dan terealisasi 988 sekolah dengan persentase capaian realisasi 102,17%, untuk seluruh jenjang pendidikan. Pada tahun ke-4 pelaksanaan kurikulum 2013 periode renstra 2015-2019 persentase capaian terhadap renstra 2019 pada tahun 2018 telah mencapai 100% dan melebihi target renstra 80% output Satuan pendidikan yang difasilitasi berdasarkan SNP. Pada tahun 2018 ini kegiatan kurikulum 2013 di seluruh LPMP yang ada di Indonesia akan diambil alih oleh Direktorat Jenderal GTK.

Hambatan/kendala permasalahan yang dihadapi LPMP Kalimantan Timur selama pelaksanaan Kurikulum 2013 di daerah adalah kualitas keberhasilan dari kurikulum 2013, sebagai kurikulum berbasis karakter pada satuan pendidikan itu sendiri sebagian pihak belum cukup dikaji dan belum mengalami uji coba yang memadai untuk diterapkan secara demikian masif.

Langkah antisipasi yang diambil LPMP Kalimantan Timur dalam menangani permasalahan yang timbul adalah mengintegrasikan dan mengadakan sosialisasi pendidikan penguatan karakter pada setiap mata pelajaran serta pengembangan literasi di sekolah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sasaran strategis Meningkatkan Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan yang ada pada renstra 2015–2019 LPMP Kalimantan Timur dan Perjanjian kinerja LPMP Kalimantan Timur 2018 adalah ekuivalen dengan terjadinya peningkatan rata-rata capaian SNP di seluruh jenjang pendidikan pada tahun 2018 diperoleh capaian 5,16 termasuk kategori menuju SNP 4, sedangkan pada tahun 2017, capaian rata-rata SNP di seluruh jenjang pendidikan adalah 4,68 termasuk kategori menuju SNP 3. Terjadinya kenaikan pencapaian dari tahun 2017 sebesar 0,48.

Sedangkan sasaran strategis terwujudnya tata kelola LPMP Kalimantan Timur yang baik, didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yang harus dicapai, yakni :

1. Data Pendidikan Dasar dan Menengah akurat, berkelanjutan dan terbaru.

Data pendidikan dasar dan menengah yang akurat dan terbaru adalah sebesar 93,58%.

Sedangkan tahun 2017 diperoleh 75,3%. Terjadi kenaikan pencapaian dari tahun 2017 sebesar 18,28%, output ini didukung oleh kegiatan Bimtek DAPODIK dalam rangka pemetaan mutu pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 292.820.000 terealisasi sebesar Rp 283.350.900.

2. Nilai minimal SAKIP LPMP Kalimantan Timur.

Untuk mencapai nilai minimal SAKIP LPMP Kalimantan Timur sebagaimana yang dicantumkan dalam perjanjian kinerja 2018, maka perlu melaksanakan proses penjaminan mutu internal di lingkungan LPMP Kalimantan Timur dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kinerja lembaga. Seluruh proses tersebut dilaksanakan secara tim dan sesuai prosedur serta perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan secara internal, rata-rata Pencapaian Kinerja Keluaran (Output) adalah 98,58% termasuk kategori **Sangat Baik** dengan penyerapan anggaran LPMP Kalimantan Timur pada tahun 2018 sampai di akhir bulan Desember ini adalah terealisasi sebesar **94,48%** dari total PAGU anggaran sebesar Rp **51.497.179.000** (lima puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Sedangkan efisiensi pemanfaatan sumber dana (anggaran) pada kegiatan prioritas sebesar **68,35%** yang perhitungannya diperoleh dengan menggunakan rumus dan berdasarkan pada tabel berikut ini

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Dengan nilai kinerja

1. >90% - 100 % : Sangat baik
2. > 80 % - 90 % : Baik
3. > 60 % - 80 % : Cukup
4. > 50 % - 60 % : Kurang
5. ≤ 50 % : Sangat kurang

Sumber : Permenkeu RI No.249/PMK.02/2011

Tabel 4. Target dan Realisasi Anggaran per Keluaran

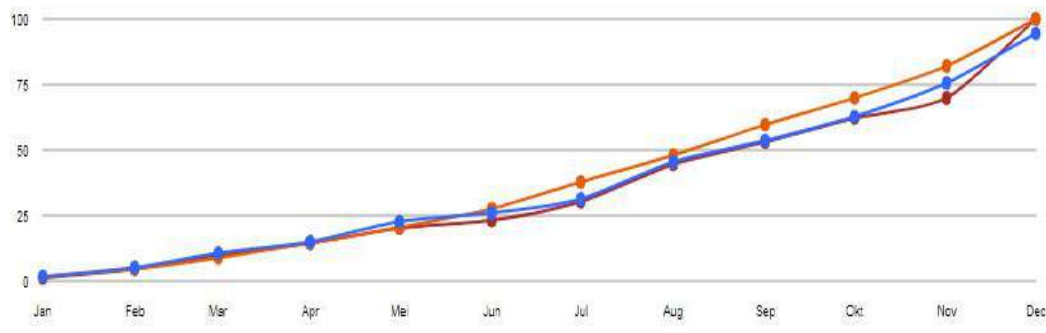
Keluaran	Volume		Anggaran	
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Keluaran 1 (Sekolah)	2.927	2.739	2.771.091.000	2.637.446.085
Keluaran 2(sekolah)	220	220	5.778.830.000	5.341.526.734
Keluaran 3 (sekolah)	967	988	8.606.655.000	8.266.050.691

Sumber data : Aplikasi ONLINE Molk 2018

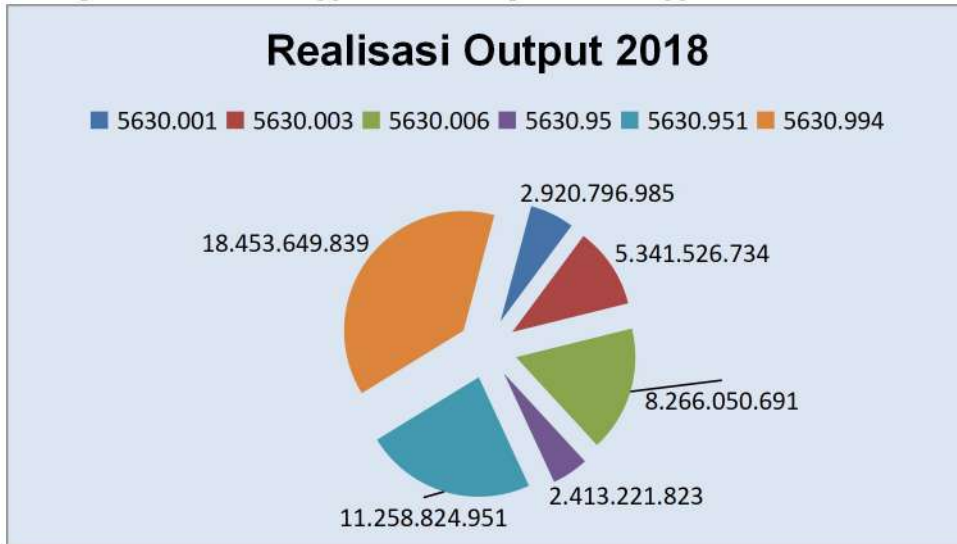
Grafik 8. Realisasi dan Rencana Kegiatan dengan PAGU Rp 51.497.179.000

Berikut disajikan diagram realisasi anggaran per output (Kode output) sampai pada bulan Desember 2018.

Grafik Rencana dan Realisasi Penyerapan



Grafik 9. Capaian Realisasi Anggaran Per Output Per Tanggal 31 Desember Jam 11.09.02



Sumber : Aplikasi Online Molk 2018



Hambatan dalam capaian kinerja input/penyerapan anggaran disebabkan karena pelaksanaan bimtek fasilitator nasional dari pusat pada kegiatan peta mutu dan sekolah model mengalami keterlambatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal dan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan di daerah yang juga mengakibatkan realisasi penyerapan anggaran akan menumpuk di akhir tahun dan tentunya akan berpengaruh pula pada capaian kinerja LPMP pada khususnya dan Ditjen Dikdasmen pada umumnya.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi adalah melakukan koordinasi secara internal antar seksi agar dengan terjadinya perubahan jadwal ini tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di seksi lain.

Melalui Laporan kinerja LPMP Kalimantan Timur tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun 2019 selanjutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum



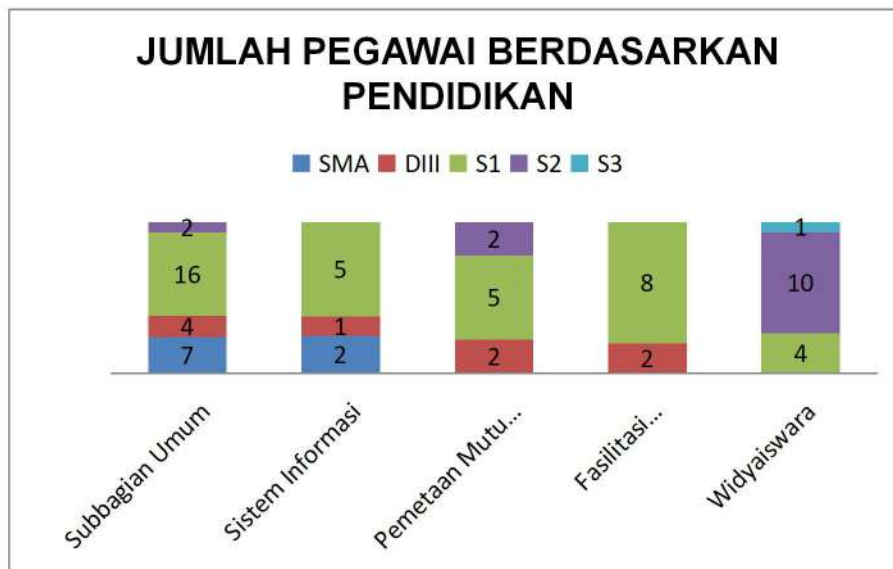
LPMP Kalimantan Timur merupakan satu dari sekian banyak LPMP yang ada di setiap provinsi di Indonesia, dalam perjalanannya mengalami perubahan bentuk dan nama yang berpengaruh pula pada tugas dan fungsinya. Pada awalnya LPMP merupakan Balai Penataran Guru (BPG) yang didirikan secara de jure pada tahun 1991 melalui SK Mendikbud Nomor 0240a/O/1991 tanggal 2 Mei 1991 dengan tugas dan fungsi sebagai Pelaksana

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Guru di provinsi bertanggung jawab langsung pada Direktorat Tenaga Kependidikan yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, memunculkan peraturan dan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional untuk merefungsionalisasi dan merestrukturisasi BPG menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang tertuang pada SK Mendiknas Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003, yang selanjutnya rincian tugas LPMP diatur dalam SK Mendiknas Nomor 044/O/2004, tanggal 14 Mei 2004. LPMP mempunyai tugas sebagai penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.

Tanggal 13 Februari 2007, dengan berdasarkan pada Kepmendiknas Nomor 7 Tahun 2007, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan difungsionalisasi menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dengan maksud untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pada awal berdirinya, LPMP merupakan unit pelaksana teknis pusat yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara teknis dikoordinasikan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan. Selanjutnya sesuai Permendiknas Nomor 31 Tahun 2005 disebutkan bahwa LPMP berada di bawah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Tahun 2010 LPMP berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP). Berdasarkan pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan tahun 2018 ini LPMP Kalimantan Timur dipimpin oleh Mohamad Hartono,SH.M,Ed

Grafik 1.1. Sumber Daya Manusia LPMP Kalimantan Timur



Pegawai 71 orang PNS

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
4. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang SAKIP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1.3. Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

LPMP Kalimantan Timur dalam menjalankan mandat yang dibebankan olehnya, tentunya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Adapun Tugas dan wewenang LPMP Kalimantan Timur sebagai berikut :

Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen.



Kegiatan Pendampingan K13 di Mahakam Ulu



Kegiatan Pendampingan K13 di Mahakam Ulu

Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan dan supervisi terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME.



Kegiatan Pendampingan K13 di Kab.Kubar



Kegiatan Monitoring sekolah model di Kab.Kubar

Menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Dirjen Dikdasmen berdasarkan pemetaan.

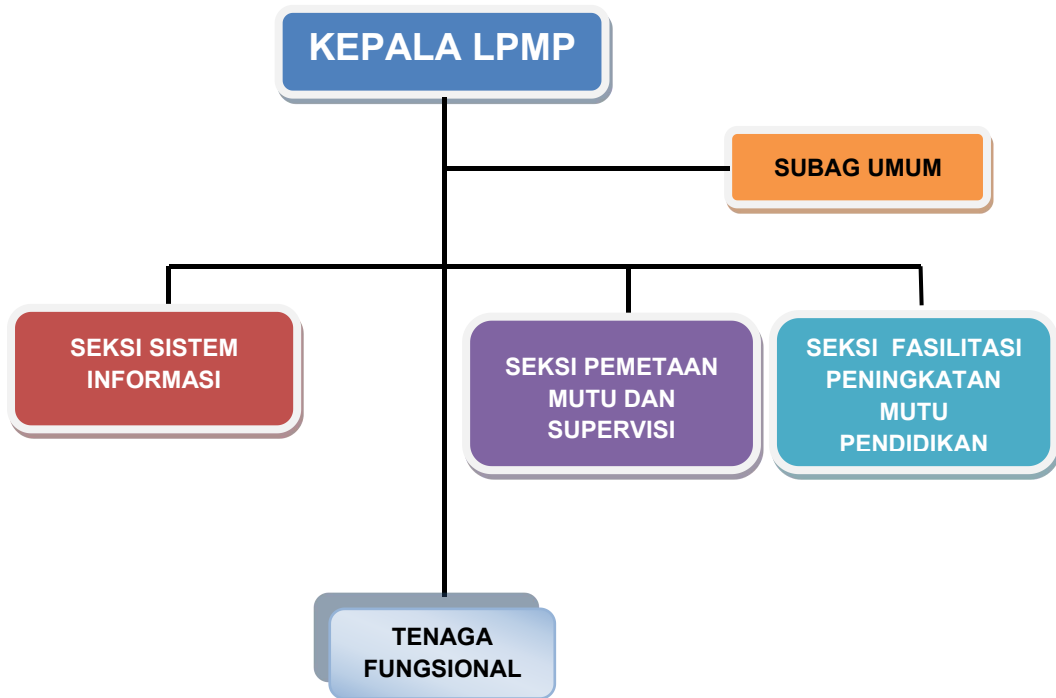
Sebagai Unit Eselon III Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan berbagai kegiatan tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan dan program penjaminan mutu pendidikan di tingkat propinsi. Sebagaimana dalam Permendikbud No.14 Tahun 2015 Pembagian Tugas LPMP sebagai Penjaminan Mutu Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Sistem Informasi melakukan tugas pengumpulan data untuk pemetaan mutu. Tugas tersebut dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, verifikasi dan validasi dan pengelolaan data mutu pendidikan.
- b. Seksi Pemetaan Mutu dan supervisi melaksanakan tugas perencanaan pendidikan. Tugas tersebut dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan identifikasi permasalahan, analisis data mutu pendidikan, penyusunan data mutu pendidikan dan penyusunan perencanaan peningkatan mutu pendidikan.
- c. Seksi fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
Melaksanakan tugas fasilitasi peningkatan mutu pendidikan. Tugas tersebut dilaksanakan melalui kegiatan –kegiatan penyiapan fasilitator daerah (Propinsi dan Kab/Kota), Pengembangan dan pendampingan Sekolah model, disamping itu pelaksanaan kegiatan juga terwujud melalui pelatihan Kurikulum 2013, dan Pendampingan Kurikulum 2013 di seluruh jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.
- d. Sub Bagian Umum melaksanakan tugas perencanaan anggaran, kepegawaian dan tugas-tugas pendukung lainnya.

Berdasarkan Permendikbud No.14 Tahun 2015 di atas adapun struktur organisasi LPMP sebagai berikut :

- a) Kepala;
- b) Subbagian Umum;
- c) Seksi Sistem Informasi;
- d) Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;
- e) Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan 1.1. Struktur Organisasi LPMP
(Permendikbud No. 14 Tahun 2015)**



1.4. Isu Strategis/Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, permasalahan utama/tantangan yang dihadapi LPMP Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsi strategisnya dalam hal peningkatan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut :

5. Masih rendahnya capaian SNP di Satuan Pendidikan Kalimantan Timur
6. Hasil pemetaan mutu pendidikan belum dimanfaatkan secara optimal untuk penentuan kebijakan, penyusunan program dan alokasi anggaran pendidikan
7. Budaya mutu belum tumbuh dan berkembang secara optimal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA LPMP KALIMANTAN TIMUR



Tabel 2.1. Tujuan Strategis

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T.1	Peningkatan mutu diseluruh jenjang pendidikan berdasarkan 8 SNP yang berorientasi pada pembentukan karakter.
T.2	Peningkatan sistem tatakelola yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel

Adapun Ringkasan Perjanjian Kinerja LPMP Kalimantan Timur 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.2.TARGET CAPAIAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	ANGGARAN
1	2	3	4
1..Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	2.927 sekolah	3.229.274.000

pendidikan	1	SD yang telah dipetakan mutunya	100%	.
	2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	75%	
		Output:		
		<i>SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	1.868 sekolah	
	3	SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	
	4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	
		Output:		
		<i>SMP yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	625 sekolah	
	5	SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	
	6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	
		Output:		
		<i>SMA yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	215 sekolah	
	7	SMK yang telah dipetakan mutunya	90 %	
	8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	70 %	
		Output:		
		<i>SMK yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	219 sekolah	
		Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	220 sekolah SD, SMP, SMA, SMK	4.538.043.000
		Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	967 sekolah SD, SMP, SMA, SMK	8.861.719.000
	9	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		Output:		
	<i>a. SD yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	59 sekolah		
	<i>b. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	737 sekolah		

10	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%		
	Output:			
	<i>a. SMP yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	60 sekolah		
	<i>b. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	167 sekolah		2.009.557.000
11	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%		
	Output:			
	<i>a. SMA yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	50 sekolah		
	<i>b. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	50 sekolah		732.107.000
12	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%		
	Output:			
	<i>a. SMK yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	51 sekolah		
	<i>b. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	13 sekolah		371.261.000
1. Terwujudnya tatakelola LPMP Kalimantan Timur yang baik	1	<i>Data pendidikan Dasar dan Menengah akurat, berkelanjutan dan terbaru</i>	92 %	3.391.591.000
	2	<i>Nilai Minimal SAKIP LPMP Kalimantan Timur</i>	78	

Total Jumlah Anggaran Kegiatan Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan : Rp 51.497.179.000 (Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2018 LPMP Kalimantan Timur menetapkan dua sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja. Upaya LPMP Kalimantan Timur meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya dilakukan melalui kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan, monitoring dan evaluasi hasil pemetaan mutu pendidikan, dan fasilitasi satuan pendidikan sesuai delapan Standar Nasional Pendidikan dengan metode pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME. Oleh karena itu untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang di amanatkan maka setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perlu diketahui tingkat ketercapaiannya. Adapun perealisasiannya dari masing-masing sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan

Ketercapaian sasaran strategis “meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan didukung melalui ketercapaian 12 indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya;
2. Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya;
3. Jumlah SMP yang telah dipetakan mutunya;
4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya;
5. Jumlah SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya;
6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya;
7. Jumlah SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya;
8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya;
9. SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP;
10. SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP;
11. SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP;
12. SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjakegiatannya selama tahun 2018:

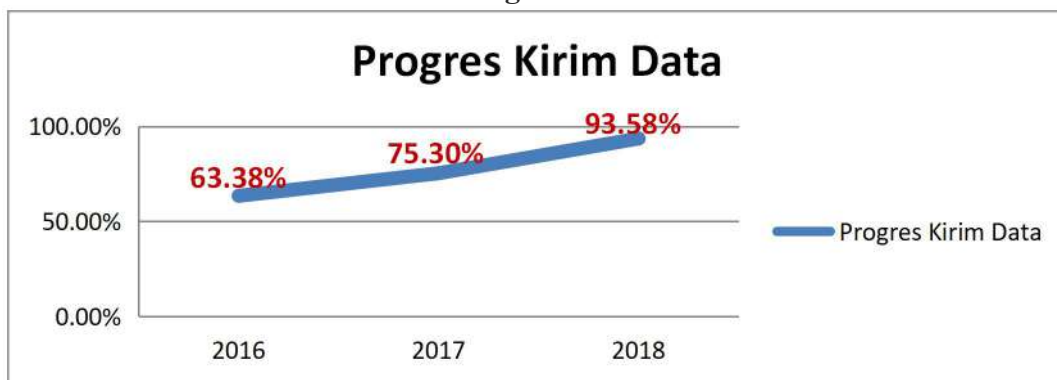
Output A. Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya

Jumlah satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya di seluruh jenjang pendidikan tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Timur adalah 2.739 sekolah dari 2.927 jumlah sekolah yang terdaftar dalam aplikasi DAPODIK dengan persentase capaian realisasi 93,58%. Sementara persentase target sekolah pada perjanjian kinerja adalah 100%. Berarti masih terdapat 188 atau 6,42% sekolah yang belum mengirimkan data mutunya. Realisasi ini masih berada di bawah target awal yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja disebabkan hal sebagai berikut :

1. Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit di jangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.
2. Dalam aplikasi DAPODIK, ada sekolah yang masih terdaftar sementara sekolah tersebut sebenarnya sudah tutup dan tidak aktif beroperasi, dikarenakan tidak dilakukannya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang mempunyai kewenangan terhadap validasi dan pemutakhiran data sehingga mengakibatkan penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.

Tren progres pengiriman data Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP Kalimantan Timur tahun 2016,2017, dan tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik 3.1. Progres Kirim Data



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2016 realisasi jumlah satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya di seluruh jenjang pendidikan adalah 1.855 sekolah dari 2.927 sekolah yang terdaftar dalam aplikasi DAPODIK 2016 atau dengan persentase capaian 63,38%. Sedangkan pada tahun 2017 realisasi jumlah sekolah yang terpetakan mutu pendidikannya di seluruh jenjang pendidikan adalah 2.204 sekolah dari 2.927 sekolah, dengan persentase 75,3%. Pada tahun 2018 ini jumlah sekolah yang terpetakan mutu pendidikannya adalah 2.739 sekolah, dengan persentase 93,58%. Hal ini menunjukkan bahwa mulai tahun 2016, 2017 sampai pada tahun 2018 ini jumlah sekolah yang terpetakan mutu pendidikannya terus mengalami kenaikan seiring dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan para *stakeholder* pendidikan dalam kegiatan penjaminan mutu pendidikan di Kalimantan Timur.

Adapun Grafik Realisasi dan Target Peta Mutu Satuan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur 2018 sebagai berikut :

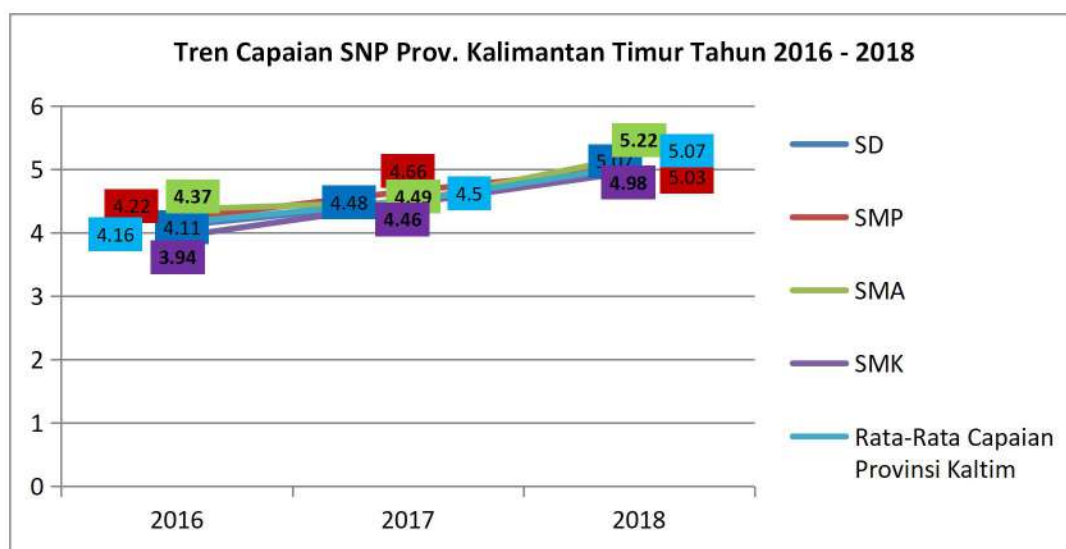
Grafik 3.2. Realisasi dan Target Peta Mutu Satuan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2018



Tabel 3.1. Realisasi dan Target Peta Mutu Satuan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2018

Tahun	SD		SMP		SMA		SMK	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2018	1868	1.754	625	582	215	195	219	208

Grafik 3.3. Tren Capaian SNP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2018



Berdasarkan Tren Capaian 8 SNP Per Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 menunjukkan terjadinya peningkatan mutu

pendidikan hal ini terlihat dari makin meningkatnya nilai capaian SNP dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

Tabel 3.2. Capaian SNP Per Kategori Jenjang Tahun 2016-2018

Jenjang	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Skor rata-rata	Capaian	Skor rata-rata	Capaian	Skor rata-rata	Capaian
SD	4.11	Menuju SNP 3	4,48	Menuju SNP 3	5,07	Menuju SNP 4
SMP	4.22	Menuju SNP 3	4,6	Menuju SNP 3	5,03	Menuju SNP 3
SMA	4.37	Menuju SNP 3	4,49	Menuju SNP 3	5,22	Menuju SNP 4
SMK	3,94	Menuju SNP 3	4,46	Menuju SNP 3	4,98	Menuju SNP 3
Rata-rata Capaian Provinsi Kalimantan Timur	(4,16)	Menuju SNP 3	4,50	Menuju SNP 3	5,07	Menuju SNP4

Tabel 3.3. Daftar Rentang Nilai Capaian SNP

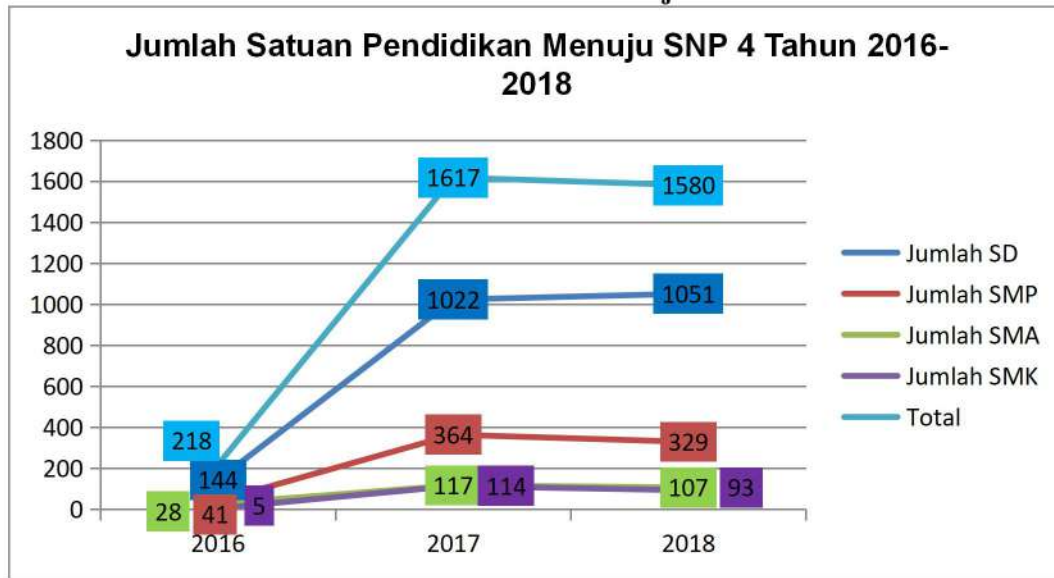
Kategori	Batas bawah	Batas atas
Menuju SNP 1	0,00	2,04
Menuju SNP 2	2,04	3,70
Menuju SNP 3	3,70	5,06
Menuju SNP 4	5,06	6,66
SNP	6,66	7,00

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil raport mutu jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tahun 2016 diperoleh capaian rata-rata SNP adalah 4,16 sedangkan pada tahun 2017, capaian rata-rata SNP adalah 4,50 berarti terjadi peningkatan mutu pendidikan. Pada tahun 2018 ini diperoleh capaian rata-rata SNP adalah 5,07. Hal ini

menunjukkan adanya peningkatan capaian SNP dibandingkan dengan tahun 2017 meski masih dalam kategori menuju SNP 3. Peningkatan capaian SNP tersebut menunjukkan pula adanya peningkatan indeks efektivitas satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur yang berarti bahwa terjadi peningkatan mutu pendidikan.

Berikut ini disajikan grafik jumlah satuan pendidikan per jenjang yang capaian SNP-nya termasuk kategori menuju SNP 4 dari tahun 2016 ke tahun 2017 dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik 3.4. Jumlah Satuan Pendidikan Menuju SNP 4 Tahun 2016-2018



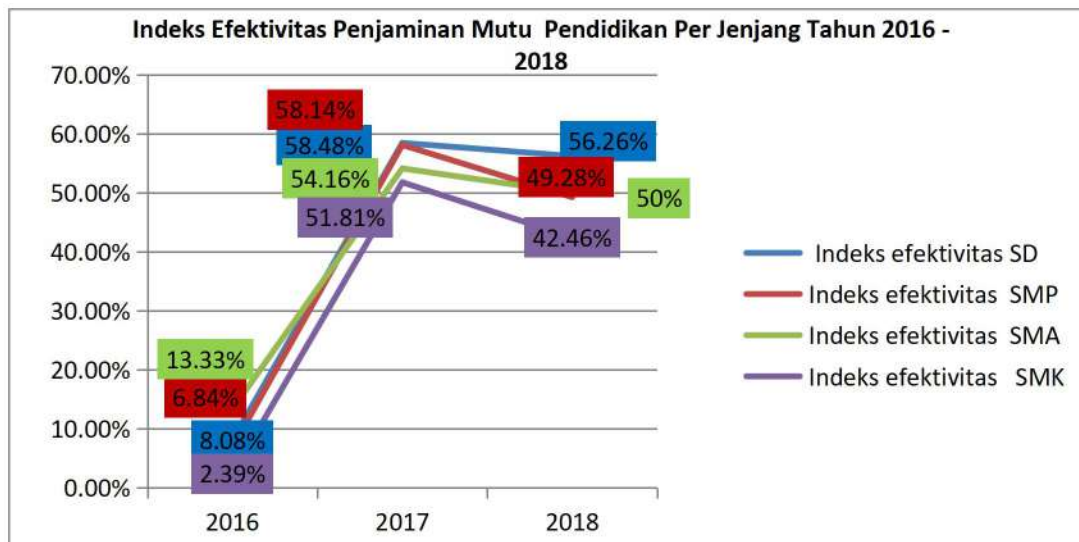
Sumber Data: PMP Kemdikbud.go.id tahun 2017 dan 2018

Grafik di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan tahun 2016 dengan tahun 2017, pada tahun 2016 jumlah sekolah dari seluruh jenjang pendidikan yang menuju SNP 4 adalah 218 sekolah sedangkan pada tahun 2017 terdapat 1617 sekolah, pada tahun 2018 ini jumlah sekolah yang menuju SNP 4 dari seluruh jenjang pendidikan terdapat 1580 sekolah. Jumlah sekolah yang menuju SNP 4 ini menurun jika dibanding tahun 2017. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 kebanyakan sekolah masih belum memahami makna dari pemetaan mutu pendidikan dan menginput data ke dalam aplikasi tidak berdasarkan pada kondisi riil sekolah, disamping itu sebagian besar sekolah juga belum memahami bahwa hasil pemetaan mutu tersebut digunakan dalam rangka untuk menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah yang ada hubungannya dengan pengalokasian dana BOS. Di samping itu pula, capaian SNP untuk seluruh sekolah belum semuanya dapat diakses secara online karena sistem aplikasi online masih perlu diperbaharui. Akan tetapi, meski jumlah sekolah menuju SNP 4 pada tahun 2018 ini berkurang jika dibanding tahun 2017, tetapi tidak mengindikasikan bahwa terjadi penurunan mutu pendidikan. Hal ini terjadi peningkatan mutu pendidikan karena capaian rata-rata SNP di seluruh jenjang pendidikan propinsi Kalimantan Timur meningkat yang berarti meningkat pula pelaksanaan pemahaman sekolah tentang penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.

Tabel 3.4. Jumlah Sekolah Per Jenjang yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya Tahun 2016,2017, dan 2018

Tahun	Indeks efektivitas SD	Indeks efektivitas SMP	Indeks efektivitas SMA	Indeks efektivitas SMK
2016	8,08%	6,84%	13,33%	2,39%
2017	58,48%	58,14%	54,16%	51,81%
2018	56,26%	49,28%	50%	42,46%

Grafik 3.5. Indeks Efektivitas Penjaminan Mutu Pendidikan Per Jenjang Tahun 2016-2018



Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa output dari peta mutu pendidikan adalah diperolehnya capaian SNP dan rekomendasi mutu di tingkat sekolah, kabupaten maupun provinsi.

Ketercapaian dari output “Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya” didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja “Jumlah SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya”

Tabel 3.5. Jumlah SD yang Telah Dipetakan Mutu Pendidikannya.

Realisasi 2017	Tahun 2018			Capaian sampai tahun 2018
	Target	Realisasi	% Capaian	
1382 sekolah	1868 sekolah	1754 sekolah	93,12 %	93,12 %

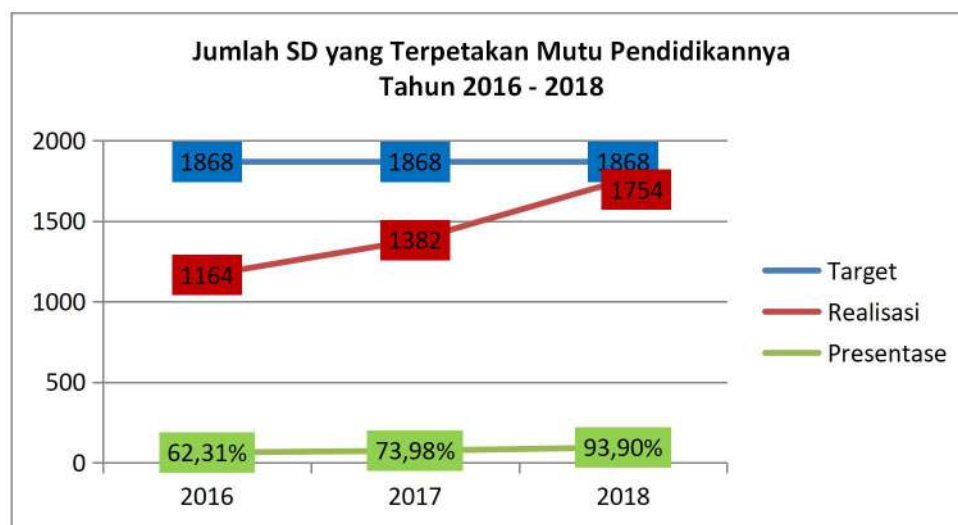
Berdasarkan data DAPODIK 2018 jumlah SD di Kalimantan Timur terdapat 1868 sekolah.

Target kinerja LPMP Kalimantan Timur tahun 2018 untuk indikator SD yang dipetakan mutunya adalah 1868 sekolah, sedangkan jumlah SD yang melaksanakan pemetaan dan yang mengirimkan data mutu pada tahun 2018 adalah 1.754 sekolah (terrealisasi 1.754 sekolah). Jadi, persentase capaian realisasi adalah 93,12%. Hal ini menunjukkan bahwa ketercapaian target kinerja ini adalah masih berada di bawah target jumlah sekolah dasar yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja, hal ini disebabkan karena :

1. Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit di jangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.
2. Dalam aplikasi DAPODIK, ada sekolah yang masih terdaftar sementara sekolah tersebut sebenarnya sudah tutup dan tidak aktif beroperasi, dikarenakan tidak dilakukannya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang mempunyai kewenangan terhadap validasi dan pemutakhiran data sehingga mengakibatkan penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.

Berdasarkan data DAPODIK 2018, jumlah sekolah dasar yang terdaftar dalam aplikasi online ini dan dinyatakan aktif beroperasi adalah 1.868 sekolah. Jumlah sekolah yang mengirimkan data mutunya hanya 1.754 sekolah jadi masih tersisa 114 sekolah yang belum mengirimkan data mutunya dan belum diperoleh raport mutunya. Jumlah SD yang dipetakan mutunya pada tahun 2016 terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2018 ini. Pada tahun 2016, jumlah SD yang telah dipetakan mutunya sebanyak 1.164 sekolah, meningkat menjadi 1.382 sekolah pada tahun 2017. Kemudian, pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 1.754 sekolah.

Grafik 3.6. Jumlah SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya Tahun 2016-2018



Meningkatnya jumlah SD yang berhasil dipetakan mutu pendidikannya di tahun 2018 disebabkan karena semakin efektifnya hubungan kerjasama dan koordinasi antara LPMP Kalimantan Timur dengan para stakeholder pendidikan yakni Dinas Pendidikan

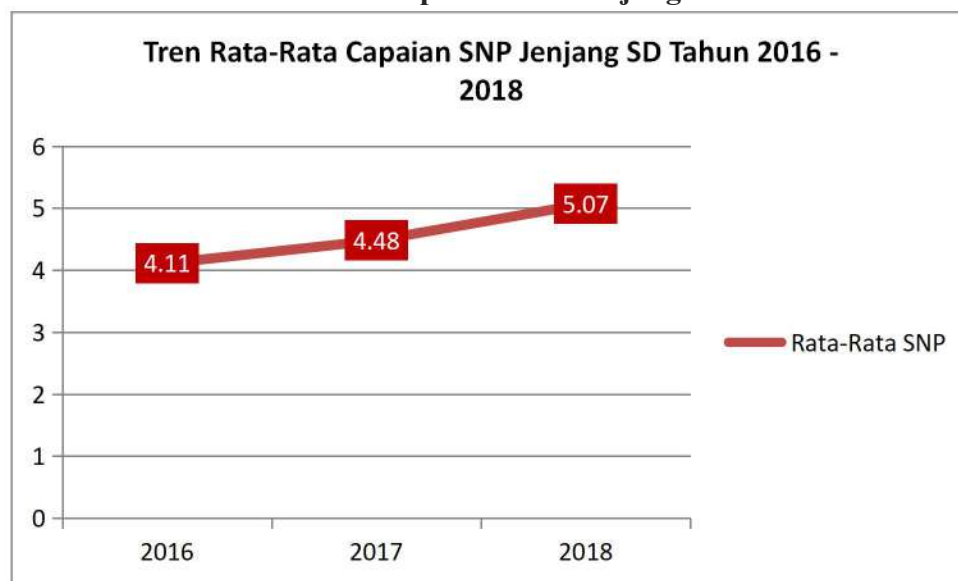
Kabupaten/Kota, pengawas sekolah, dan para operator sekolah, kepala sekolah, serta guru yang tentunya berperan penting dalam pengiriman data mutu pendidikan ke dalam aplikasi DAPODIK tersebut. Namun demikian, dalam pelaksanaan pemetaan mutu dan pengiriman data mutu masih ditemukan hambatan dan kendala dalam penggunaannya, yakni:

- a. Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit dijangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.
- b. Ada sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi tetapi masih terdaftar dalam DAPODIK karena tidak adanya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang berwenang, sehingga penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.
- c. Adanya penggunaan aplikasi ilegal dalam mempercepat proses pengisian PMP.

Ketercapaian dari output Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya, setiap tahun ditargetkan 100% jumlah sekolah, sampai periode akhir renstra tahun 2019 juga ditargetkan 100%. Kegiatan peta mutu yang sudah masuk tahun ke-4 dari renstra ini, jumlah sekolah yang terpetakan mutu pendidikannya di Kalimantan Timur belum pernah mencapai 100%, bahkan pada tahun 2018 ini baru tercapai sebesar 93,58%. Hal ini disebabkan karena masih ada sekolah yang masih aktif beroperasi, belum mengirimkan data mutunya dan juga ada sekolah yang sudah tidak aktif lagi masih terdaftar di dalam DAPODIK. Kegiatan pemetaan mutu pendidikan ini sebenarnya ditujukan untuk seluruh satuan pendidikan yang masih aktif beroperasi sehingga setiap tahun juga ditargetkan 100%. Jumlah SD yang melaksanakan pemetaan mutu dan yang telah mengirimkan data mutunya pada tahun 2018 adalah 1754 sekolah dari 1868 sekolah yang terdaftar dalam DAPODIK.

Tren rata-rata capaian SNP jenjang SD di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016, 2017, dan 2018 sebagai berikut :

Grafik 3.7. Tren Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SD Tahun 2016 -2018

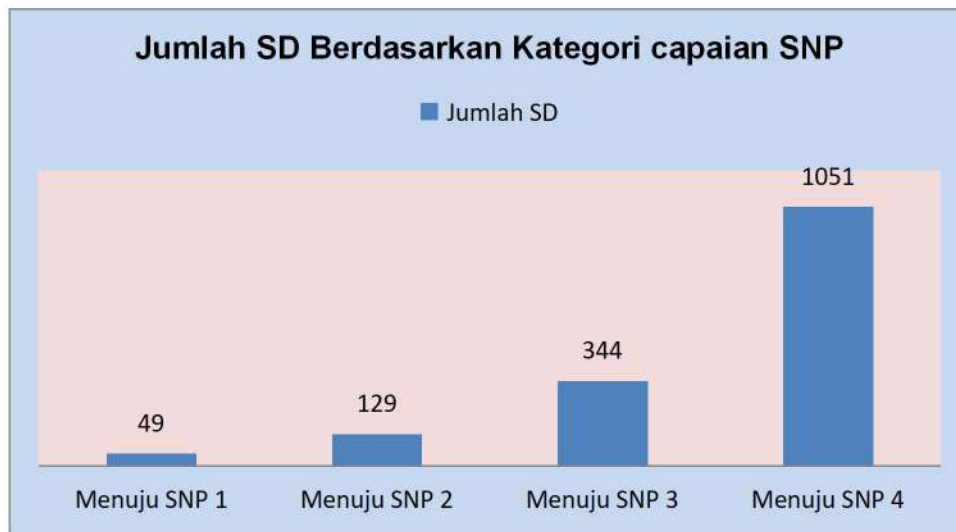


Berdasarkan Tren capaian 8 SNP jenjang SD di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 menunjukkan terjadinya peningkatan mutu pendidikan.

Hal ini terlihat dari makin meningkatnya nilai capaian SNP dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

Berikut ini disajikan grafik jumlah SD berdasarkan kategori capaian di tahun 2018 :

Grafik 3.8. Jumlah SD Berdasarkan Kategori capaian SNP



Berdasarkan grafik jumlah SD berdasarkan kategori capaian SNP di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dari total 1.868 SD yang terdaftar dalam DAPODIK, sebanyak 1.051 sekolah berada pada capaian “Menuju SNP 4”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah Dasar di Provinsi Kalimantan Timur sudah mendekati SNP, namun belum ada yang mencapai SNP. Bahkan masih ada SD yang capaian mutunya berada pada capaian “Menuju SNP 1 dan Menuju SNP 2” serta menuju SNP 3. Dan apabila dirata-ratakan jumlah nilai perstandar pendidikan, di provinsi Kalimantan Timur untuk jenjang SD masih tergolong capaian SNP menuju SNP 3.

- Hambatan dan kendala
Pada tahun 2018 ini, hambatan dan permasalahan yang bersifat umum dan masih ditemukan dalam kegiatan pemetaan mutu pendidikan adalah
 - a. Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit dijangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.
 - b. Ada sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi tetapi masih terdaftar dalam DAPODIK karena tidak adanya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang berwenang, sehingga penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.
 - c. Adanya penggunaan aplikasi ilegal dalam mempercepat proses pengisian PMP.
- Langkah antisipasi
Langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam menangani hambatan dan permasalahan di atas adalah
 - a. Untuk wilayah terpencil yang sulit dengan akses internet dapat melakukan penginputan pada wilayah yang dekat dengan akses internet dan dibentuk tim yang anggotanya berasal dari unsur pengawas sebanyak 351 orang pengawas di 10

Kabupaten/Kota dan operator sekolah sebanyak 29 orang di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dengan maksud agar dapat memberikan arahan dan menyampaikan informasi tentang penginputan data PMP ke dalam aplikasi DAPODIK 2018.

- b. Membangun komunikasi dan komitmen yang lebih efektif lagi antara LPMP, Diknas Kab/Kota, Pengawas, dan satuan pendidikan di kab/kota, agar sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi, segera dilakukan pemutakhiran data, melakukan identifikasi dan kontrol validasi secara aktif serta melakukan pemetaan data invalid. Sehingga penginputan data PMP tersebut dapat mencapai 100%.
- c. Mensosialisasikan kepada seluruh operator agar tidak menggunakan aplikasi yang ilegal sebagai gantinya diadakan penyempurnaan terhadap aplikasi PMP serta pelatihan penggunaan aplikasi PMP kepada operator sekolah.

Gambar 3.1. Kegiatan Bimtek DAPODIK Tingkat Provinsi



2. Indikator Kinerja “Persentase SD yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya”

Tabel 3.6. Persentase SD yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya

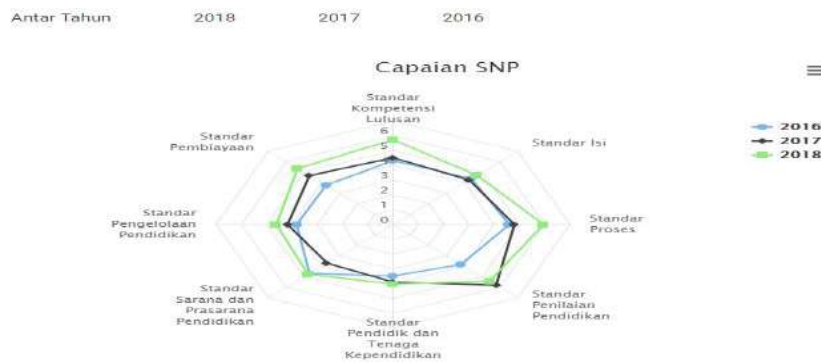
Realisasi 2017	Tahun 2018			Capaian sampai dengan tahun 2018
	Target	Realisasi	%Capaian	
58,48 %	75%	1051 sekolah	56,26%	56,26%

Pada indikator kinerja persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya, di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 ini masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dari target 75%, baru berhasil terealisasi sebesar 56,26%. Hal ini mengalami penurunan realisasi dari tahun 2017 dengan persentase penurunan sebesar 2,22% atau terdapat 1.051 SD yang

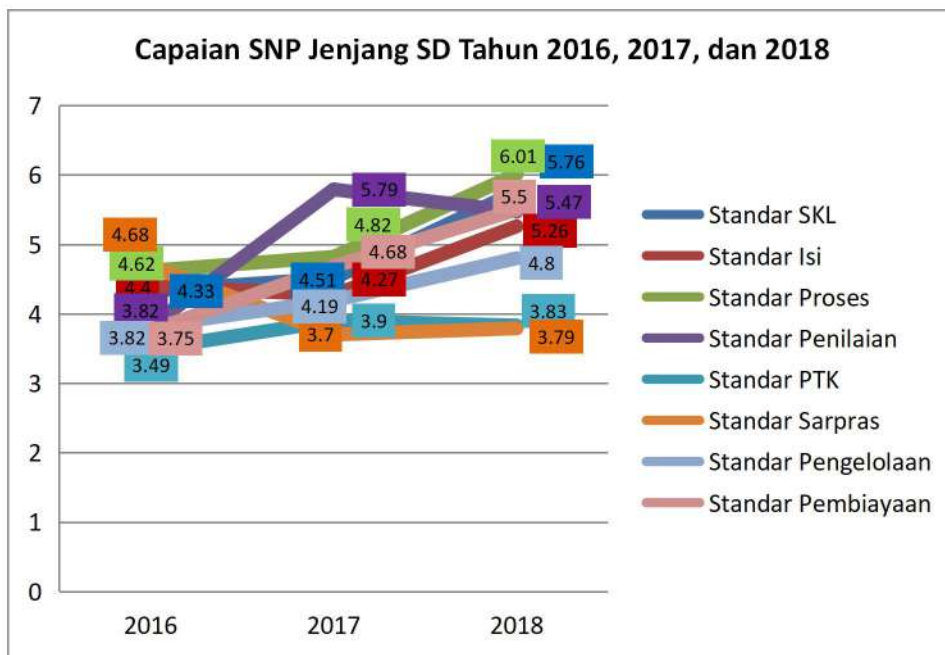
mencapai kategori menuju SNP 4. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2017 kebanyakan sekolah masih belum memahami makna dari pemetaan mutu pendidikan dan menginput data ke dalam aplikasi tidak berdasar pada kondisi riil sekolah, disamping itu sebagian besarsekolah telah memahami bahwa hasil pemetaan mutu tersebut digunakan dalam rangka untuk menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah dan ada hubungannya dengan pengalokasian dana BOS. Akan tetapi, meski jumlah sekolah menuju SNP 4 pada tahun 2018 ini berkurang jika dibanding tahun 2017 tidak mengindikasikan bahwa terjadi penurunan mutu pendidikan. Hal ini melainkan terjadi peningkatan mutu pendidikan karena capaian rata-rata SNP di seluruh jenjang pendidikan provinsi Kalimantan Timur meningkat yang berarti meningkat pula pelaksanaan dan pemahaman sekolah tentang penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.

Capaian indikator ini baru mencapai 59,21% dari 95% target renstra 2019. Berikut ini disajikan hasil capaian 8 SNP/Rapot Mutu Jenjang SD 2017 dan 2018 yang diperoleh dari aplikasi DAPODIK 2018.

Diagram 3.1. Hasil Capaian 8 SNP/Rapot Mutu Jenjang SD 2017 dan 2018



Grafik 3.9. Capaian SNP Jenjang SD Tahun 2016, 2017, dan 2018

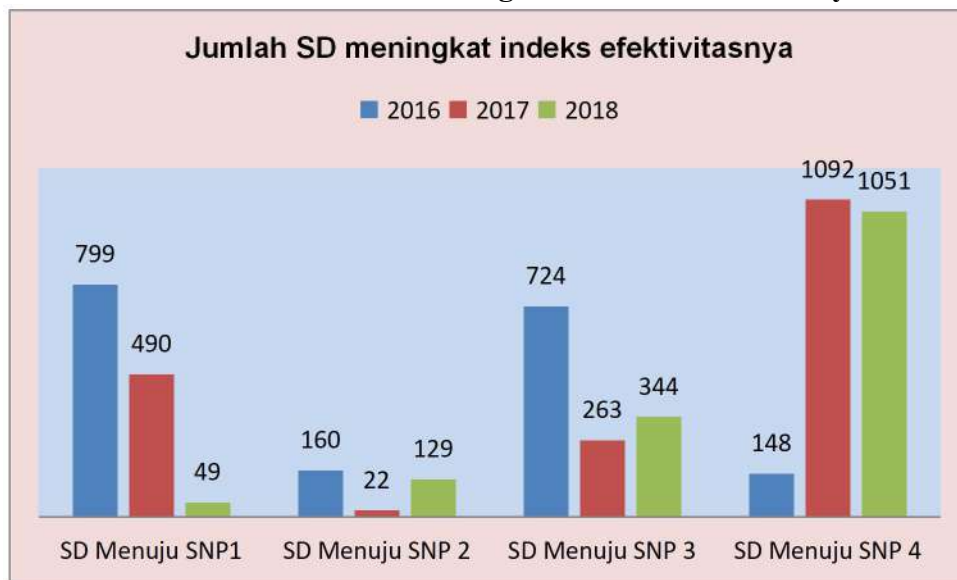


Tabel 3.7. Capaian SNP Jenjang SD Tahun 2016, 2017, dan 2018

No	Standar/Indikator/Sub	Capaian 2018		Kinerja	Sasaran				
		Nilai	Kategori		M1	M2	M3	M4	SNP
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5,76	★★★★		65	102	77	1.189	154
2.	Standar Isi	5,26	★★★★		54	131	320	1.076	6
3.	Standar Proses	6,01	★★★★		52	109	75	970	381
4.	Standar Penilaian Pendidikan	5,47	★★★★		68	103	243	1.107	38
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,83	★★★		37	571	973	6	0
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,79	★★★		65	494	983	45	0
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	4,80	★★★		121	128	394	943	1
8.	Standar Pembiayaan	5,50	★★★★		11	91	291	1.126	68

Jumlah SD yang mengalami peningkatan indeks efektivitas berdasarkan hasil peta mutu tahun 2016, 2017, dan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.10. Jumlah SD Meningkat Indeks Efektivitasnya



Grafik 3.11. Keadaan Indeks Efektivitas 2017 dan 2018



Adapun peningkatan indeks efektivitas berdasarkan capaian mutu per kategori dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8. Peningkatan Indeks Efektivitas Capaian Mutu SD Per Kategori

TAHUN	SNP1	SNP2	SNP3	SNP4	% indeks efektivitas
2016	799	160	724	148	8,08 %
2017	490	22	263	1092	58,48 %
%Kenaikan					50,4%
2018	49	129	344	1051	56,26%
%penurunan					2,22 %

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2016 jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP 4 terdapat 148 sekolah. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP 4 terdapat 1.092 sekolah. Sehingga persentase kenaikan satuan pendidikan SD yang meningkat indeks efektivitasnya pada tahun 2017 diperoleh 50,4%. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah sekolah yang berada pada kategori menuju SNP4 terdapat 1051 sekolah. Sehingga persentase satuan pendidikan SD yang meningkat indeks efektivitasnya pada tahun 2018 diperoleh 56,26%. Angka ini menurun 2,22% dari tahun 2017. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 kebanyakan sekolah masih belum memahami makna dari pemetaan mutu pendidikan dan menginput data ke dalam aplikasi tidak berdasar pada kondisi riil sekolah, disamping itu sebagian besar sekolah telah memahami bahwa hasil pemetaan mutu tersebut digunakan dalam rangka untuk menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah dan ada hubungannya dengan pengalokasian dana BOS. Akan tetapi, meski jumlah sekolah menuju SNP 4 pada tahun 2018 ini berkurang jika dibanding tahun 2017 tidak mengindikasikan bahwa terjadi penurunan mutu pendidikan. Hal ini melainkan terjadi peningkatan mutu pendidikan karena capaian rata-rata SNP di seluruh jenjang pendidikan provinsi Kalimantan Timur meningkat yang berarti meningkat pula pelaksanaan dan pemahaman sekolah tentang penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.

Gambar 3.2. Kegiatan Analisis Data Mutu Pendidikan di Hotel Zurich Balikpapan



3. Indikator Kinerja “Jumlah SMP yang Telah Dipetakan Mutu Pendidikannya.”

Tabel 3.9. Jumlah SMP yang Telah Dipetakan Mutu Pendidikannya

Realisasi 2017	Tahun 2018			Capaian sampai tahun 2018
	Target	Realisasi	% Capaian	
485 sekolah	625 sekolah	582 sekolah	93,12 %	93,12 %

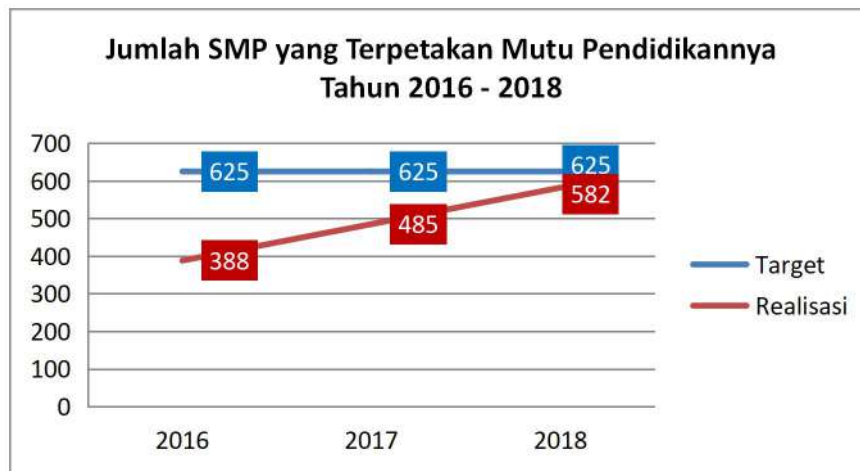
Berdasarkan data DAPODIK tahun 2018, jumlah SMP di Kalimantan Timur terdapat 625 sekolah.

Target kinerja LPMP Kalimantan Timur Tahun 2018 untuk indikator SMP yang dipetakan mutunya adalah 625 sekolah, sedangkan jumlah SMP yang melaksanakan pemetaan dan yang mengirimkan data mutu pada tahun 2018 adalah 582 sekolah (terrealisasi 582 sekolah). Jadi, persentase capaian realisasi adalah 93,12%. Hal ini menunjukkan bahwa ketercapaian target kinerja ini adalah masih berada di bawah target jumlah Sekolah Menengah Pertama yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja. Hal ini disebabkan karena :

1. Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit di jangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.
2. Dalam aplikasi DAPODIK, ada sekolah yang masih terdaftar sementara sekolah tersebut sebenarnya sudah tutup dan tidakaktif beroperasi, dikarenakan tidak dilakukannya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang mempunyai kewenangan terhadap validasi dan pemutakhiran data sehingga mengakibatkan penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.

Berdasarkan data DAPODIK tahun 2016, jumlah SMP yang dipetakan mutunya adalah 388 sekolah. Pada tahun 2017, jumlah SMP yang dipetakan mutunya adalah 485 sekolah sedangkan pada tahun 2018 jumlah SMP yang dipetakan mutunya adalah 582 sekolah. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Grafik 3.12. Jumlah SMP yang Terpetakan Mutu Pendidikannya Tahun 2016-2018



Meningkatnya jumlah SMP yang berhasil dipetakan mutu pendidikannya di tahun 2016 sampai tahun 2018 karena semakin efektifnya hubungan kerjasama dan koordinasi antara LPMP Kalimantan Timur dengan para *stakeholder* pendidikan, yakni Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pengawas sekolah dan para operator sekolah, kepala sekolah, guru yang berperan penting dalam penginputan DAPODIK dan pengiriman data mutu pendidikan atau penginputan PMP kedalam aplikasi DAPODIK tersebut. Namun demikian, dalam pelaksanaan pemetaan mutu dan pengiriman data mutu masih ditemukan hambatan dan kendala dalam penggunaannya, yakni sebagai berikut :

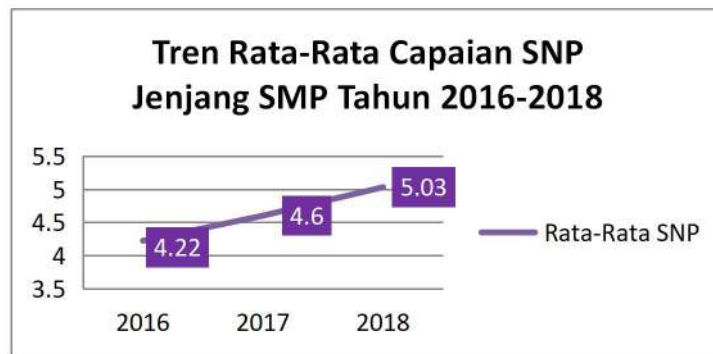
- a. Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit dijangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.
- b. Ada sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi tetapi masih terdaftar dalam DAPODIK karena tidak adanya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang berwenang, sehingga penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.
- c. Adanya penggunaan aplikasi ilegal dalam mempercepat proses pengisian PMP.

Ketercapaian dari *output* “Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya”, setiap tahun ditargetkan 100% jumlah sekolah, sampai periode akhir renstra tahun 2019 juga ditargetkan 100%. Kegiatan peta mutu yang sudah masuk tahun ke-4 dari renstra ini, jumlah satuan pendidikan jenjang SMP yang terpetakan mutu pendidikannya di Kalimantan Timur belum pernah mencapai 100%, bahkan pada tahun 2018 ini baru tercapai sebesar 93,12%. Hal ini disebabkan karena masih ada sekolah yang masih aktif beroperasi, belum mengirimkan data mutunya dan juga ada sekolah yang sudah tidak aktif lagi masih terdaftar di dalam DAPODIK. Kegiatan pemetaan mutu pendidikan ini sebenarnya ditujukan untuk seluruh satuan pendidikan yang masih aktif beroperasi sehingga setiap tahun juga ditargetkan

100%.Jumlah SMP yang melaksanakan pemetaan mutu dan yang mengirimkan data mutu pada tahun 2018 adalah 582 sekolah.

Tren rata-rata capaian SNP jenjang SMP di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016, 2017, dan 2018 sebagai berikut:

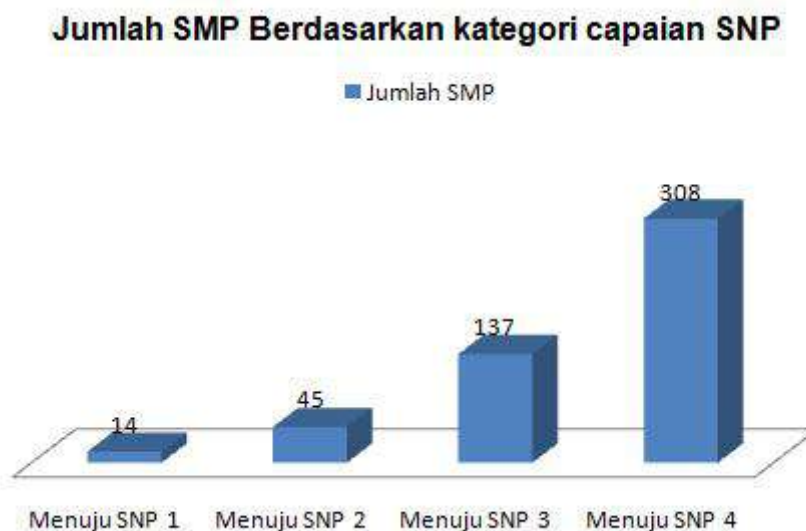
Grafik 3.13. Tren Rata-rata Capaian SNP Jenjang SMP Tahun 2016-2018



Berdasarkan Tren Capaian 8 SNP Jenjang SMP di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 menunjukkan terjadinya peningkatan mutu pendidikan. Hal ini terlihat dari makin meningkatnya nilai capaian SNP dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

Berikut ini disajikan grafik jumlah SMP berdasarkan kategori capaian di tahun 2018 :

Grafik 3.14. Jumlah SMP Berdasarkan Kategori Capaian SNP



Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, dari total 625 SMP yang terdaftar dalam DAPODIK, dan yang terkirim data mutunya terdapat 582 sekolah, sebanyak 308 sekolah berada pada capaian “Menuju SNP 4”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Kalimantan Timur sudah mendekati SNP. Akan tetapi, belum ada yang mencapai SNP. Bahkan masih ada SMP yang capaian mutunya berada pada capaian Menuju SNP 1, Menuju SNP 2, serta menuju SNP 3. Apabila dirata-ratakan

jumlah nilai perstandar pendidikan, di Provinsi Kalimantan Timur masih tergolong capaian SNP menuju SNP 3.

- Hambatan dan kendala
Pada tahun 2008 ini, hambatan dan permasalahan yang bersifat umum dan masih ditemukan dalam kegiatan pemetaan mutu pendidikan adalah:
 - a. Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit dijangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.
 - b. Ada sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi tetapi masih terdaftar dalam DAPODIK karena tidak adanya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang berwenang, sehingga penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.
 - c. Adanya penggunaan aplikasi ilegal dalam mempercepat proses pengisian PMP.
- Langkah antisipasi
Langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam menangani hambatan dan permasalahan di atas adalah:
 - a. Untuk wilayah terpencil yang sulit dengan akses internet dapat melakukan penginputan pada wilayah yang dekat dengan akses internet dan dibentuk tim yang anggotanya berasal dari unsur pengawas sebanyak 351 orang pengawas di 10 Kabupaten/Kota dan operator sekolah sebanyak 29 orang di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dengan maksud agar dapat memberikan arahan dan menyampaikan informasi tentang penginputan data PMP ke dalam aplikasi DAPODIK 2018.
 - b. Membangun komunikasi dan komitmen yang lebih efektif lagi antara LPMP, Diknas Kab/Kota, Pengawas, dan satuan pendidikan di kab/kota, agar sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi, segera dilakukan pemutakhiran data, melakukan identifikasi dan kontrol validasi secara aktif serta melakukan pemetaan data invalid. Sehingga penginputan data PMP tersebut dapat mencapai 100%.
 - c. Mensosialisasikan kepada seluruh operator agar tidak menggunakan aplikasi yang ilegal sebagai gantinya diadakan penyempurnaan terhadap aplikasi PMP serta pelatihan penggunaan aplikasi PMP kepada operator sekolah.

Gambar 3.3. Kegiatan BIMTEK DAPODIK Tingkat Provinsi



4. Indikator Kinerja “Persentase SMP yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya.”

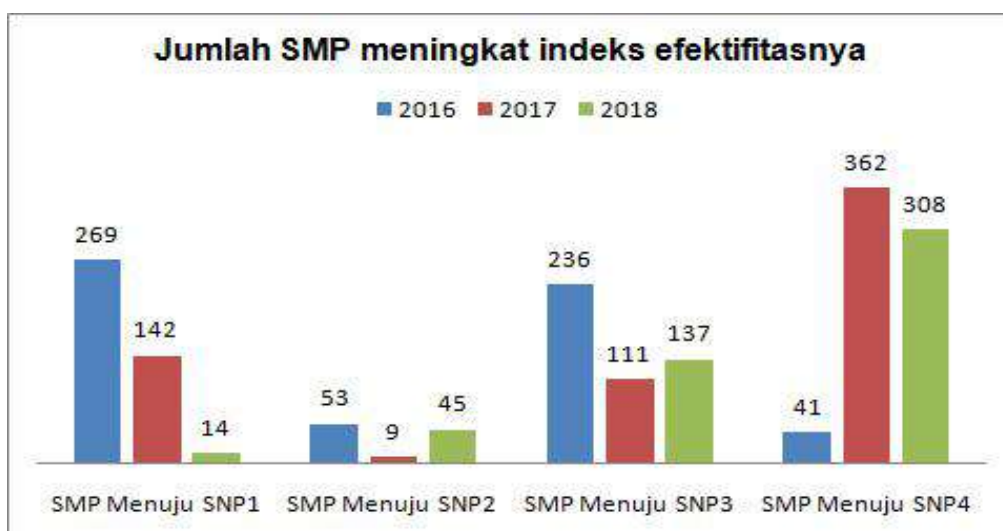
Tabel 3.10. Persentase SMP yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya

Realisasi 2017	Tahun 2018			Capaian sampai tahun 2018
	Target	Realisasi	%Capaian	
58,14 %	80 %	329 sekolah	49,28%	49,28%

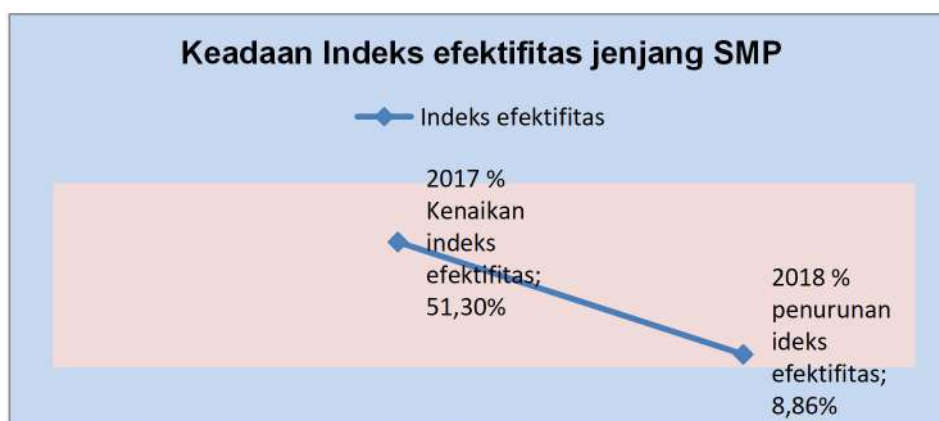
Pada Indikator kinerja persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya, di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 ini masih berada dibawah target yang ditetapkan. Dari target 80%, terealisasi hanya sebesar 49,28%. Persentase ini mengalami penurunan realisasi dari tahun 2017 sebesar 8,86% karena hanya terdapat 308 SMP yang mencapai kategori menuju SNP 4. Capaian indikator ini baru mencapai 51,85% dari 95% target renstra 2019.

Jumlah SMP yang mengalami peningkatan indeks efektivitas berdasarkan hasil peta mutu tahun 2016, 2017 dan 2018, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.15. Jumlah SMP Meningkatkan Indeks Efektivitasnya



Grafik 3.16. Keadaan Indeks Efektivitas Jenjang SMP

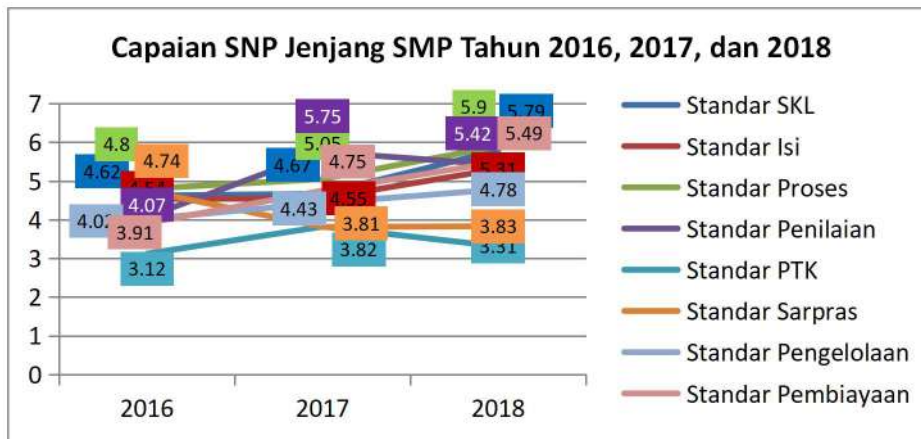


Berikut ini disajikan pula hasil capaian 8 SNP/rapot mutu jenjang SMP 2017 dan 2018 yang diperoleh dari aplikasi PMP online 2018.

Diagram 3.2. Hasil Capaian 8 SNP/Rapot Mutu Jenjang SMP 2017 dan 2018



Grafik 3.17. Capaian SNP Jenjang SMP Tahun 2016, 2017, dan 2018



Tabel 3.11. Capaian SNP Jenjang SMP Tahun 2016, 2017, dan 2018

No	Standar/Indikator/Sub	Capaian 2018		Kinerja	Sasaran				
		Nilai	Kategori		M1	M2	M3	M4	SNP
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5,79	★★★★		17	32	46	354	56
2.	Standar Isi	5,31	★★★★		14	44	104	321	22
3.	Standar Proses	5,90	★★★★		16	34	33	337	85
4.	Standar Penilaian Pendidikan	5,42	★★★★		20	34	80	343	18
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,31	★★		48	263	194	0	0
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,83	★★★		14	161	314	16	0
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	4,78	★★★		32	51	135	287	0
8.	Standar Pembiayaan	5,49	★★★★		0	33	109	336	27

Adapun peningkatan indeks efektivitas berdasarkan capaian mutu per kategori dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12. Peningkatan Indeks Efektivitas Capaian Mutu SMP Per Kategori

TAHUN	SNP1	SNP2	SNP3	SNP4	% Indeks Efektifitas
2016	269	53	236	41	6,84 %
2017	142	9	111	364	58,14 %
%Kenaikan					51,3 %
2018	14	45	137	308	49,28%
%penurunan					8,86 %

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2016 jumlah sekolah jenjang SMP yang berada pada kategori menuju SNP 4 terdapat 41 sekolah. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah SMP yang berada pada kategori menuju SNP 4 terdapat 364 sekolah. Sehingga persentase kenaikan satuan pendidikan SMP yang meningkat indeks efektifitasnya pada tahun 2017 adalah 51,3%. Pada tahun 2018 ini jumlah SMP yang berada pada kategori menuju SNP 4 terdapat 308 sekolah. Sehingga persentase satuan pendidikan SMP yang meningkat indeks efektifitasnya pada tahun 2018 diperoleh 49,28%. Angka ini menurun 8,86% dari tahun 2017. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 kebanyakan sekolah masih belum memahami makna dari pemetaan mutu pendidikan dan menginput data ke dalam aplikasi tidak berdasar pada kondisi riil sekolah, disamping itu sebagian besar sekolah telah memahami bahwa hasil pemetaan mutu tersebut digunakan dalam rangka untuk menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah dan ada hubungannya dengan pengalokasian dana BOS. Akan tetapi, meski jumlah sekolah menuju SNP 4 pada tahun 2018 ini berkurang jika dibanding tahun 2017 tidak mengindikasikan bahwa terjadi penurunan mutu pendidikan. Hal ini melainkan terjadi peningkatan mutu pendidikan karena capaian rata-rata SNP di seluruh jenjang pendidikan provinsi Kalimantan Timur meningkat yang berarti meningkat pula pelaksanaan dan pemahaman sekolah tentang penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.

5. Indikator Kinerja “Jumlah SMA yang Telah Dipetakan Mutu Pendidikannya”.

Tabel 3.13. Jumlah SMA yang Telah Dipetakan Mutu Pendidikannya

Realisasi 2017	Tahun 2018			Capaian sampai tahun 2018
	Target	Realisasi	% Capaian	
159 sekolah	215 sekolah	195 sekolah	90,7 %	90,7 %

Berdasarkan data DAPODIK 2018, jumlah SMA di Kalimantan Timur terdapat 215 sekolah. Target kinerja LPMP Kalimantan Timur tahun 2018 untuk indikator SMA yang dipetakan mutunya adalah 215 sekolah, sedangkan jumlah SMA yang melaksanakan pemetaan dan yang mengirimkan data mutu pada tahun 2018 adalah 195 sekolah (terrealisasi 195 sekolah). Jadi, persentase capaian realisasi adalah 90,7%. Hal ini menunjukkan bahwa ketercapaian target kinerja ini adalah masih berada di bawah target jumlah sekolah yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja, hal ini disebabkan karena :

- a. Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit dijangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.
- b. Dalam aplikasi DAPODIK, ada sekolah yang masih terdaftar sementara sekolah tersebut sebenarnya sudah tutup dan tidak aktif beroperasi, dikarenakan tidak dilakukannya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang mempunyai kewenangan terhadap validasi dan pemutakhiran data sehingga mengakibatkan penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.

Berdasarkan data DAPODIK 2018, jumlah SMA yang terdaftar dalam aplikasi online ini dan dinyatakan aktif beroperasi adalah 215 sekolah. Jumlah sekolah yang mengirimkan data mutunya hanya 195 sekolah jadi masih tersisa 20 sekolah yang belum mengirimkan data mutunya dan belum diperoleh raport mutunya. Jumlah SMA yang dipetakan mutunya pada tahun 2016 terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2018 ini. Pada tahun 2016 jumlah SMA yang telah dipetakan mutunya sebanyak 152 sekolah, meningkat menjadi 159 sekolah pada tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 195 sekolah.

Grafik 3.18. Jumlah SMA yang Terpetakan Mutu Pendidikannya Tahun 2016 - 2018



Meningkatnya jumlah SMA yang berhasil dipetakan mutu pendidikannya di tahun 2018 disebabkan karena semakin efektifnya hubungan kerjasama dan koordinasi antara LPMP Kalimantan Timur dengan para *stakeholder* pendidikan yakni Dinas Pendidikan

Kabupaten/kota, pengawas sekolah dan para operator sekolah, kepala sekolah, serta guru yang tentunya berperan penting dalam pengiriman data mutu pendidikan kedalam aplikasi DAPODIK tersebut. Namun demikian, dalam pelaksanaan pemetaan mutu dan pengiriman data mutu masih ditemukan hambatan dan kendala dalam penggunaannya, yakni :

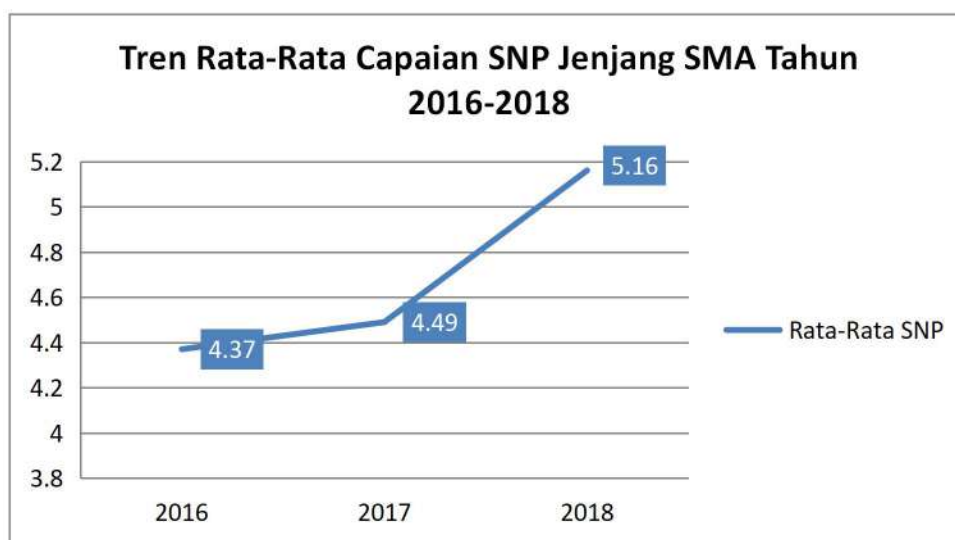
- a. Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit dijangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.
- b. Ada sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi tetapi masih terdaftar dalam DAPODIK karena tidak adanya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang berwenang, sehingga penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.
- c. Adanya penggunaan aplikasi ilegal dalam mempercepat proses pengisian PMP.

Ketercapaian dari *output* “Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya” pada indikator ini setiap tahun ditargetkan 100% jumlah sekolah, sampai periode akhir renstra tahun 2019 juga ditargetkan 100%. Kegiatan peta mutu yang sudah masuk tahun ke-4 dari renstra ini, jumlah sekolah yang terpetakan mutu pendidikannya di Kalimantan Timur belum pernah mencapai 100% bahkan pada tahun 2018 ini baru tercapai sebesar 90,7% karena masih ada sekolah yang masih aktif beroperasi, belum mengirimkan data mutunya disebabkan dari akses internet yang masih sangat sulit di daerah tersebut dan juga ada sekolah yang sudah tidak aktif lagi masih terdaftar di dalam DAPODIK.

Kegiatan pemetaan mutu pendidikan ini sebenarnya ditujukan untuk seluruh satuan pendidikan yang masih aktif beroperasi sehingga setiap tahun juga ditargetkan 100%. Jumlah SMA yang melaksanakan pemetaan mutu dan yang mengirimkan data mutu pada tahun 2018 adalah 195 sekolah dari 215 sekolah yang terdaftar dalam aplikasi DAPODIK 2018.

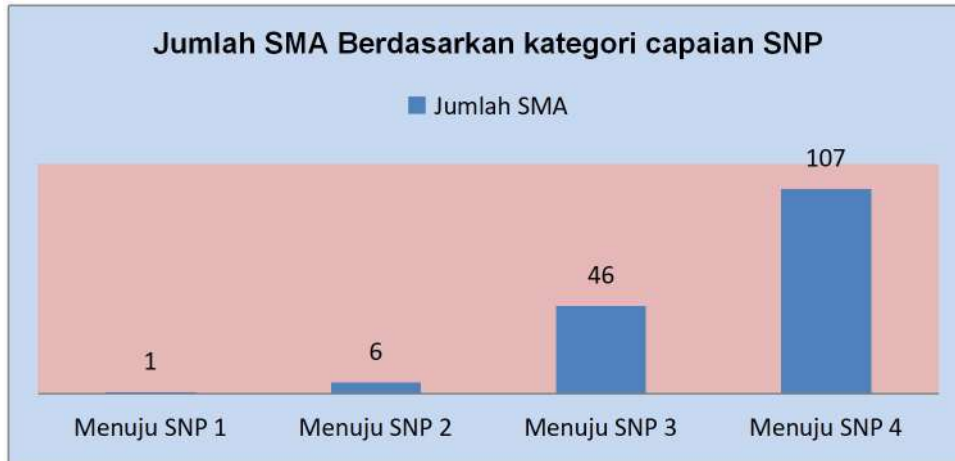
Tren rata-rata capaian SNP jenjang SMA di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016, 2017, dan 2018 sebagai berikut :

Grafik 3.19. Tren Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SMA Tahun 2016-2018



Berdasarkan Tren capaian 8 SNP jenjang SMA di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 menunjukkan terjadinya peningkatan mutu pendidikan hal ini terlihat dari makin meningkatnya nilai capaian SNP dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Berikut ini disajikan grafik jumlah SMA berdasarkan kategori capaian di tahun 2018 :

Grafik 3.20. Jumlah SMA Berdasarkan Kategori Capaian SNP



Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dari total 215 SMA yang terdaftar dalam DAPODIK, sebanyak 195 sekolah berada pada capaian “Menuju SNP 4”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah Menengah Atas di Provinsi Kalimantan Timur sudah mendekati SNP. Akan tetapi, belum ada yang mencapai SNP. Bahkan masih ada SMA yang capaian mutunya berada pada capaian “ Menuju SNP 1 dan Menuju SNP 2” serta “Menuju SNP 3”. Dan apabila dirata-ratakan jumlah nilai perstandar pendidikan, di provinsi Kalimantan Timur masih tergolong capaian SNP menuju SNP 3.

- Hambatan dan kendala

Pada tahun 2018 ini, hambatan dan permasalahan yang bersifat umum dan masih ditemukan dalam kegiatan pemetaan mutu pendidikan adalah

 - a. Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit dijangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.
 - b. Ada sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi namun masih terdaftar dalam DAPODIK karena tidak adanya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang berwenang, sehingga penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.
 - c. Adanya penggunaan aplikasi ilegal dalam mempercepat proses pengisian PMP
- Langkah antisipasi

Langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam menangani hambatan dan permasalahan di atas adalah

 - a. Untuk wilayah terpencil yang sulit dengan akses internet dapat melakukan penginputan pada wilayah yang dekat dengan akses internet dan dibentuk tim yang anggotanya berasal dari unsur pengawas sebanyak 351 orang pengawas di 10

Kabupaten/Kota dan operator sekolah sebanyak 29 orang di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dengan maksud agar dapat memberikan arahan dan menyampaikan informasi tentang penginputan data PMP ke dalam aplikasi DAPODIK 2018.

- b. Membangun komunikasi dan komitmen yang lebih efektif lagi antara LPMP, Diknas Kab/Kota, Pengawas, dan satuan pendidikan di kab/kota, agar sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi, segera dilakukan pemutakhiran data, melakukan identifikasi dan kontrol validasi secara aktif serta melakukan pemetaan data invalid. Sehingga penginputan data PMP tersebut dapat mencapai 100%.
- c. Mensosialisasikan kepada seluruh operator agar tidak menggunakan aplikasi yang ilegal sebagai gantinya diadakan penyempurnaan terhadap aplikasi PMP serta pelatihan penggunaan aplikasi PMP kepada operator sekolah.

Gambar 3.4. Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Mutu Pendidikan



6. Indikator Kinerja “Persentase SMA yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya”.

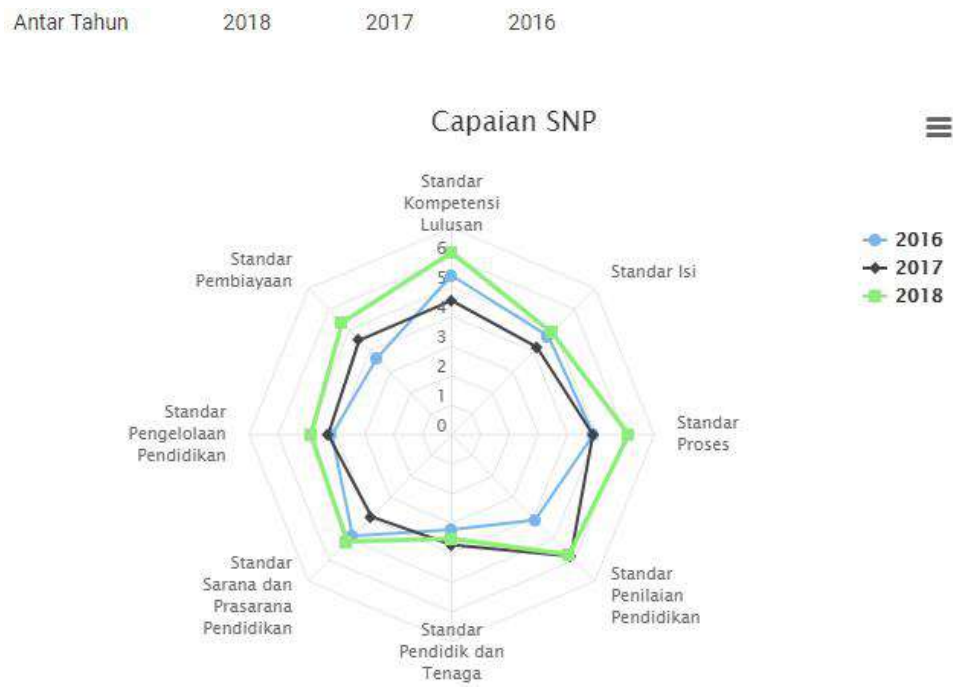
Tabel 3.14. Persentase SMA yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya

Realisasi 2017	Tahun 2018			Capaian sampai tahun 2018
	Target	Realisasi	%Capaian	
54,16 %	80 %	107 sekolah	50%	50%

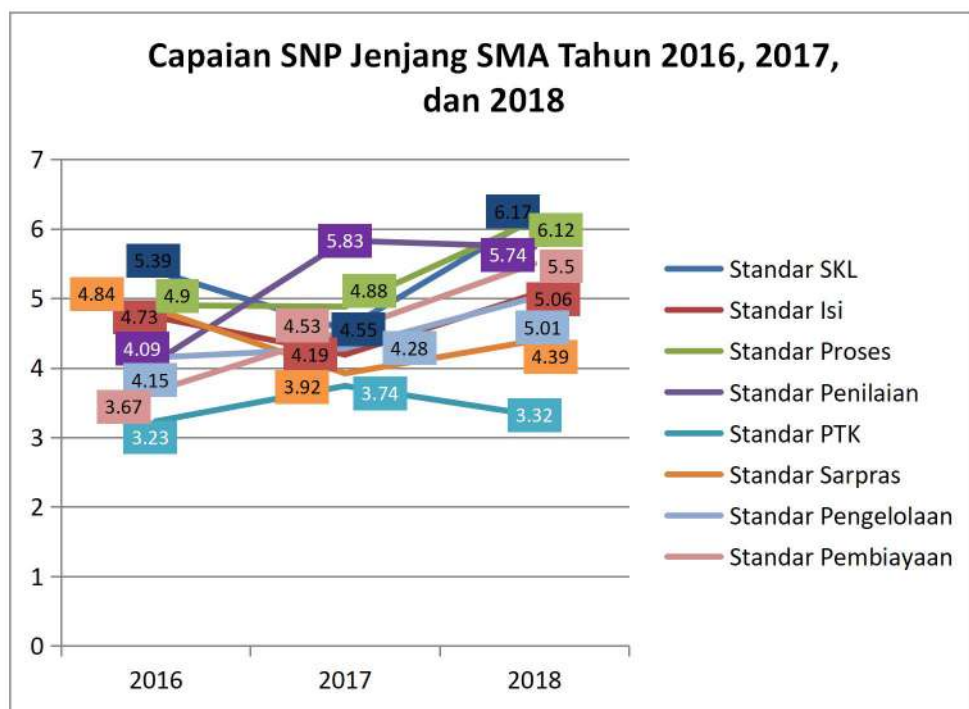
Pada indikator kinerja persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya, di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 ini terealisasi di bawah target yang ditetapkan. Dari target 80%, hanya terealisasi sebesar 50% dengan persentase penurunan sebesar 4,16% karena hanya terdapat 107 SMA yang mencapai kategori menuju SNP 4. Capaian indikator

ini baru mencapai 52,45% dari 95% target renstra 2019. Berikut ini disajikan hasil capaian 8 SNP/rapot mutu jenjang SMA 2017 dan 2018 yang diperoleh dari aplikasi Online PMP 2018.

Diagram 3.3. Hasil Capaian 8 SNP/Rapot Mutu Jenjang SMA 2017 dan 2018



Grafik 3.21. Capaian SNP Jenjang SMA Tahun 2016, 2017, dan 2018

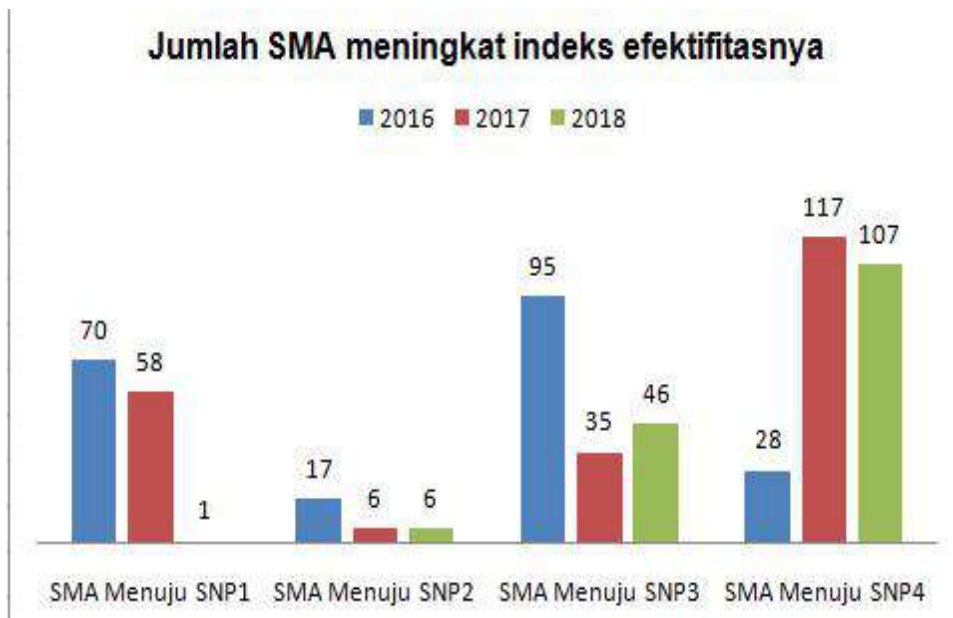


Tabel 3.15. Capaian SNP Jenjang SMA Tahun 2016, 2017, dan 2018

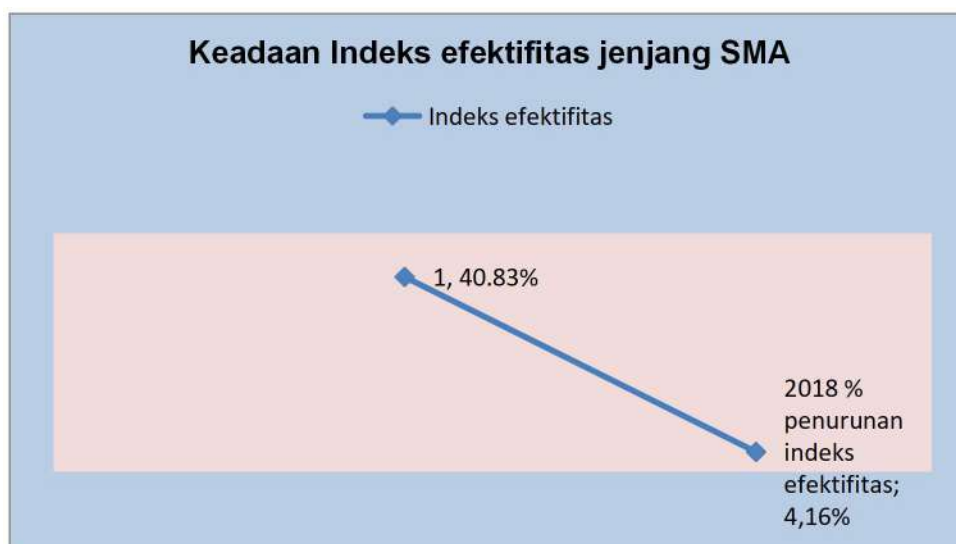
No	Standar/Indikator/Sub	Capaian 2018		Kinerja	Sasaran				
		Nilai	Kategori		M1	M2	M3	M4	SNP
1.	Standar Kompetensi Lulusan	6,17	★★★★		1	5	6	122	29
2.	Standar Isi	5,06	★★★★		2	14	55	89	3
3.	Standar Proses	6,12	★★★★		1	5	9	123	25
4.	Standar Penilaian Pendidikan	5,74	★★★★		1	9	16	123	13
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,32	★★		11	84	68	0	0
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,39	★★★		1	28	122	12	0
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	5,01	★★★		4	12	40	107	0
8.	Standar Pembiayaan	5,50	★★★★		1	6	31	119	6

Jumlah SMA yang mengalami peningkatan indeks efektivitas berdasarkan hasil peta mutu tahun 2016, 2017 dan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.22. Jumlah SMA yang Mengalami Peningkatan Indeks Efektivitas



Grafik 3.23. Keadaan Indeks efektifitas jenjang SMA



Adapun peningkatan indeks efektifitas berdasarkan capaian mutu per kategori dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16. Peningkatan Indeks Efektivitas Capaian Mutu SMA Per Kategori

TAHUN	SNP1	SNP2	SNP3	SNP4	% indeks efektifitas
2016	70	17	95	28	13,33%
2017	58	6	35	117	54,16 %
%Kenaikan					40,83 %
2018	1	6	46	107	50 %
%penurunan					4,16 %

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2016 jumlah sekolah untuk jenjang SMA yang berada pada kategori “menuju SNP 4” terdapat 28 sekolah. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah sekolah yang berada pada kategori “menuju SNP 4” terdapat 117 sekolah. Sehingga persentase kenaikan satuan pendidikan SMA yang meningkat indeks efektifitasnya pada tahun 2017 diperoleh 40,83%. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah sekolah yang berada pada kategori “menuju SNP4” terdapat 107 sekolah. Sehingga persentase kenaikan satuan pendidikan SMA yang meningkat indeks efektifitasnya pada tahun 2018 diperoleh 50%. Pada tahun 2018 ini jumlah SMA yang berada pada kategori “menuju SNP 4” terdapat 107 sekolah. Sehingga persentase satuan pendidikan SMA yang meningkat indeks efektifitasnya pada tahun 2018 diperoleh 50 %. Angka ini menurun 4,16 % dari tahun 2017. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 kebanyakan sekolah masih belum memahami makna dari pemetaan

mutu pendidikan dan menginput data ke dalam aplikasi tidak berdasar pada kondisi riil sekolah, disamping itu sebagian besar sekolah telah memahami bahwa hasil pemetaan mutu tersebut digunakan dalam rangka untuk menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah dan ada hubungannya dengan pengalokasian dana BOS. Akan tetapi, meski jumlah sekolah menuju SNP 4 pada tahun 2018 ini berkurang jika dibanding tahun 2017 tidak mengindikasikan bahwa terjadi penurunan mutu pendidikan hal ini melainkan terjadi peningkatan mutu pendidikan karena capaian rata-rata SNP di seluruh jenjang pendidikan provinsi Kalimantan Timur meningkat yang berarti meningkat pula pelaksanaan dan pemahaman sekolah tentang penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.

7. Indikator Kinerja “Jumlah SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya.

Tabel 3.17. Jumlah SMK yang Telah Dipetakan Mutu Pendidikannya

Realisasi 2017	Tahun 2018			Capaian sampai tahun 2018
	Target	Realisasi	% Capaian	
178 sekolah	219 sekolah	208 sekolah	94,98 %	94,98 %

Berdasarkan data DAPODIK 2018 jumlah SMK di Kalimantan Timur terdapat 219 sekolah. Target kinerja LPMP KALTIM tahun 2018 untuk indikator SMK yang dipetakan mutunya adalah 219 sekolah sedangkan jumlah SMK yang melaksanakan pemetaan dan yang mengirimkan data mutu pada tahun 2018 adalah 208 sekolah (terrealisasi 208 sekolah). Jadi persentase capaian realisasi adalah 94,98%. Hal ini menunjukkan bahwa ketercapaian target kinerja ini adalah masih berada di bawah target jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja, hal ini disebabkan karena :

- a. Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit dijangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.
- b. Dalam aplikasi DAPODIK, ada sekolah yang masih terdaftar sementara sekolah tersebut sebenarnya sudah tutup dan tidak aktif beroperasi, dikarenakan tidak dilakukannya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang mempunyai kewenangan terhadap validasi dan pemutakhiran data sehingga mengakibatkan penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.

Jika jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang terdaftar dalam aplikasi DAPODIK dan dinyatakan aktif beroperasi adalah 219 sekolah sementara jumlah sekolah yang mengirimkan data mutunya hanya 208 sekolah jadi masih tersisa 11 sekolah yang belum mengirimkan data mutunya dan belum diperoleh raport mutunya. Jumlah SMK yang dipetakan mutunya pada tahun 2016 terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2018 ini.

Pada tahun 2016, jumlah SMK yang telah dipetakan mutunya sebanyak 151 sekolah, meningkat menjadi 178 sekolah pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 208 sekolah.

Grafik 3.24. Jumlah SMK yang Terpetakan Mutu Pendidikannya Tahun 2016-2018



Meningkatnya jumlah SMK yang berhasil dipetakan mutu pendidikannya di tahun 2018 disebabkan karena semakin efektifnya hubungan kerjasama dan koordinasi antara LPMP Kalimantan Timur dengan para *stakeholder* pendidikan yakni Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pengawas sekolah dan para operator sekolah, kepala sekolah, serta guru yang tentunya berperan penting dalam pengiriman data mutu pendidikan kedalam aplikasi DAPODIK tersebut. Namun demikian, dalam pelaksanaan pemetaan mutu dan pengiriman data mutu masih ditemukan hambatan dan kendala dalam penggunaannya yakni :

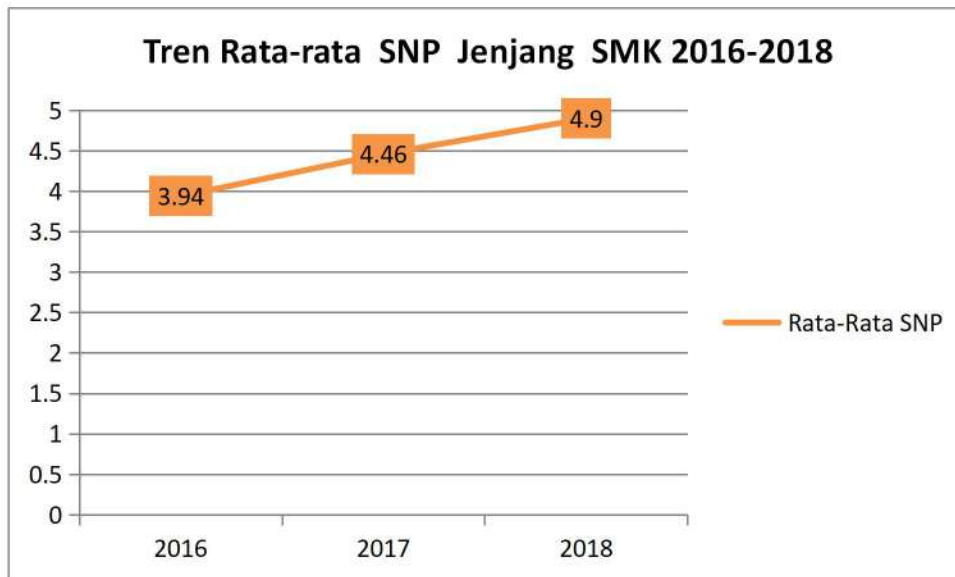
- Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit dijangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.
- Ada sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi tetapi masih terdaftar dalam DAPODIK karena tidak adanya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang berwenang, sehingga penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.
- Adanya penggunaan aplikasi ilegal dalam mempercepat proses pengisian PMP.

Ketercapaian dari *output* “Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya”, setiap tahun ditargetkan 100% jumlah sekolah, sampai periode akhir renstra tahun 2019 juga ditargetkan 100%. Kegiatan peta mutu yang sudah masuk tahun ke-4 dari renstra ini, jumlah sekolah yang terpetakan mutu pendidikannya di Kalimantan Timur belum pernah mencapai 100% bahkan pada tahun 2018 ini baru tercapai sebesar 94,98%. Hal ini dikarenakan masih ada sekolah yang masih aktif beroperasi, belum mengirimkan data mutunya disebabkan jaringan internet yang sulit diakses dan juga ada sekolah yang sudah tidak aktif lagi masih terdaftar di dalam DAPODIK sehingga di daerah tersebut tidak dapat mencapai 100%.

Kegiatan pemetaan mutu pendidikan ini sebenarnya ditujukan untuk seluruh satuan pendidikan yang masih aktif beroperasi sehingga setiap tahun juga ditargetkan 100%. Jumlah SMK yang melaksanakan pemetaan mutu dan yang mengirimkan data mutu pada tahun 2018 adalah 208 sekolah.

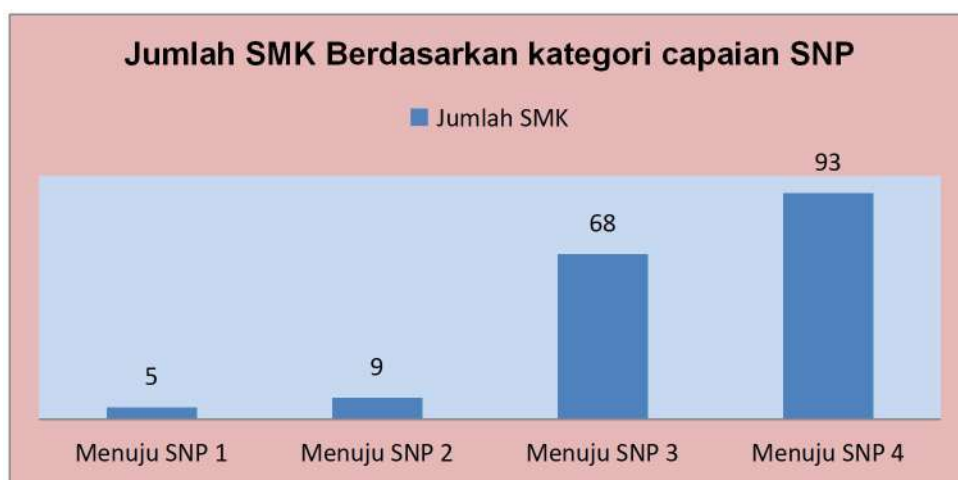
Tren rata-rata capaian SNP jenjang SMK di provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016, 2017, dan 2018 sebagai berikut :

Grafik 3.25. Tren Rata-rata Capaian SNP Jenjang SMK 2016, 2017, dan 2018



Berdasarkan Tren capaian 8 SNP jenjang SMK di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 menunjukkan terjadinya peningkatan mutu pendidikan. Hal ini terlihat dari makin meningkatnya nilai capaian SNP dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Berikut ini disajikan grafik jumlah SMK berdasarkan kategori capaian di tahun 2018 :

Grafik 3.26. Jumlah SMK Berdasarkan Kategori Capaian SNP



Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dari total 219 SMK yang terdaftar dalam DAPODIK, sebanyak 93 sekolah berada pada capaian “Menuju SNP 4”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Kalimantan Timur sudah mendekati SNP. Akan tetapi, belum ada yang mencapai SNP. Bahkan masih ada SMK yang capaian mutunya berada pada capaian “Menuju SNP 1 dan Menuju SNP 2” serta “menuju SNP 3”. Dan apabila dirata-ratakan jumlah nilai perstandar pendidikan, di provinsi Kalimantan Timur masih tergolong capaian SNP menuju SNP 3.

- Hambatan dan kendala

Pada tahun 2018 ini, hambatan dan permasalahan yang bersifat umum dan masih ditemukan dalam kegiatan pemetaan mutu pendidikan adalah

- a. Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit dijangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.
- b. Ada sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi tetapi masih terdaftar dalam DAPODIK karena tidak adanya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang berwenang, sehingga penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.
- c. Adanya penggunaan aplikasi ilegal dalam mempercepat proses pengisian PMP

- Langkah antisipasi

Langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam menangani hambatan dan permasalahan di atas adalah

- a. Untuk wilayah terpencil yang sulit dengan akses internet dapat melakukan penginputan pada wilayah yang dekat dengan akses internet dan dibentuk tim yang anggotanya berasal dari unsur pengawas sebanyak 351 orang pengawas di 10 Kabupaten/Kota dan operator sekolah sebanyak 29 orang di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dengan maksud agar dapat memberikan arahan dan menyampaikan informasi tentang penginputan data PMP ke dalam aplikasi DAPODIK 2018.
- b. Membangun komunikasi dan komitmen yang lebih efektif lagi antara LPMP, Diknas Kab/Kota, Pengawas, dan satuan pendidikan di kab/kota, agar sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi, segera dilakukan pemutakhiran data, melakukan identifikasi dan kontrol validasi secara aktif serta melakukan pemetaan data invalid. Sehingga penginputan data PMP tersebut dapat mencapai 100%.
- c. Mensosialisasikan kepada seluruh operator agar tidak menggunakan aplikasi yang ilegal sebagai gantinya diadakan penyempurnaan terhadap aplikasi PMP serta pelatihan penggunaan aplikasi PMP kepada operator sekolah.

Gambar 3.5. Kegiatan Analisis Data Mutu Pendidikan



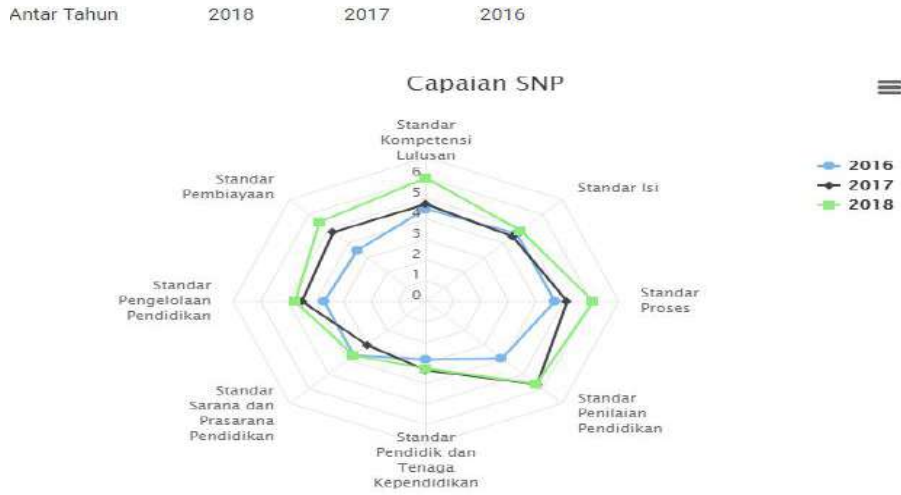
8. Indikator Kinerja “Persentase SMK yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya”.

Tabel 3.18. Persentase SMK yang Meningkatkan Indeks Efektivitasnya

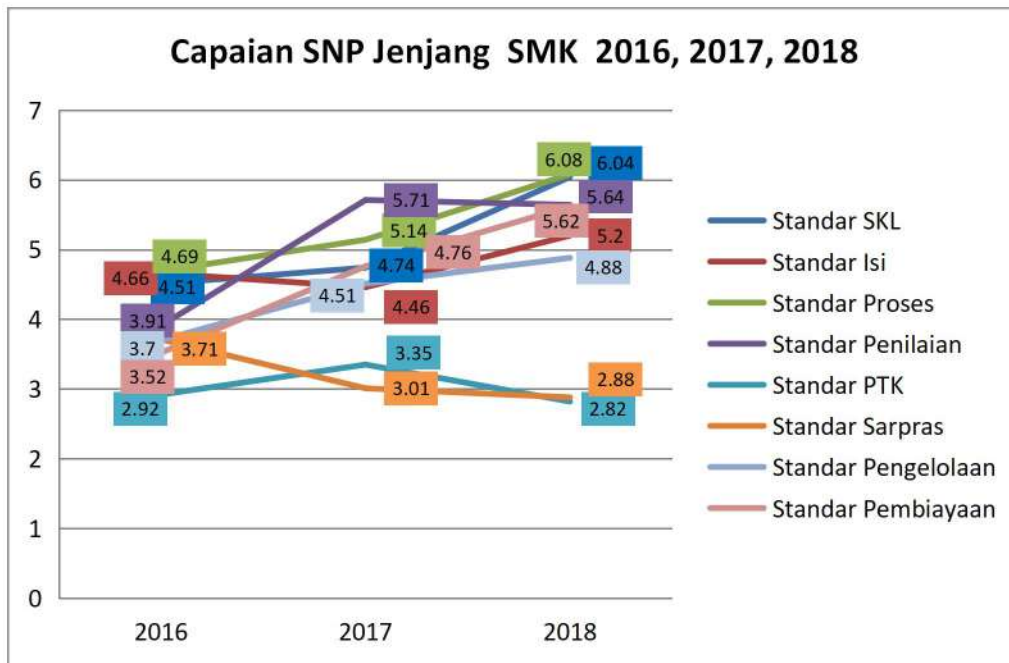
Realisasi 2017	Tahun 2018			Capaian Sampai Tahun 2018
	Target	Realisasi	%Capaian	
51,81 %	70 %	93 sekolah	42,46%	42,46%

Pada indikator kinerja persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya, di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 ini masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dari target 70%, berhasil terealisasi sebesar 42,46%. Angka ini mengalami penurunan dengan persentase sebesar 9,35% atau terdapat 93 SMK yang mencapai kategori menuju SNP 4. Capaian indikator ini baru mencapai 44,71% dari 95% target renstra 2019. Berikut ini disajikan hasil capaian 8 SNP/Rapot Mutu jenjang SMK 2017 dan 2018 yang diperoleh dari aplikasi Online PMP 2018.

Diagram 3.4. Hasil Capaian 8 SNP/Rapot Mutu Jenjang SMK 2017 Dan 2018



Grafik 3.27. Capaian SNP Jenjang SMK 2016, 2017, 2018

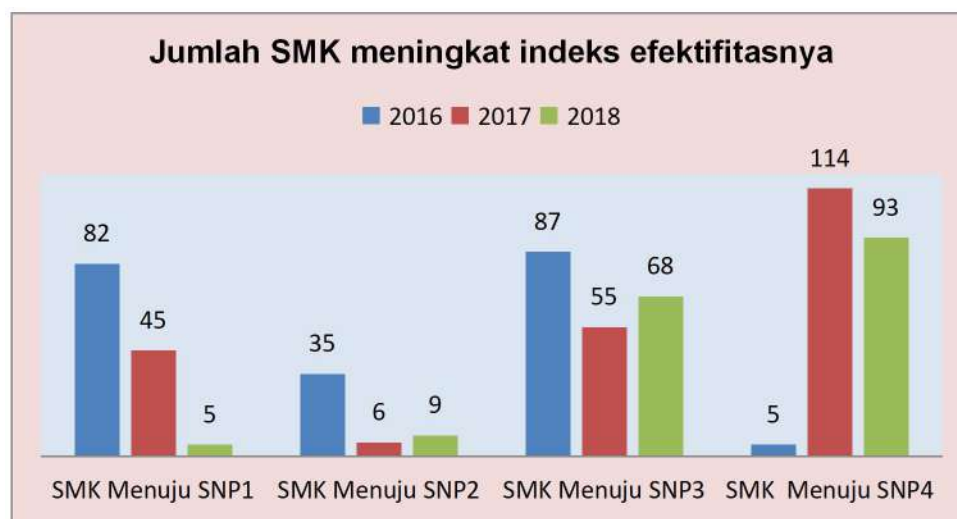


Tabel 3.19. Capaian SNP Jenjang SMK 2016, 2017, 2018

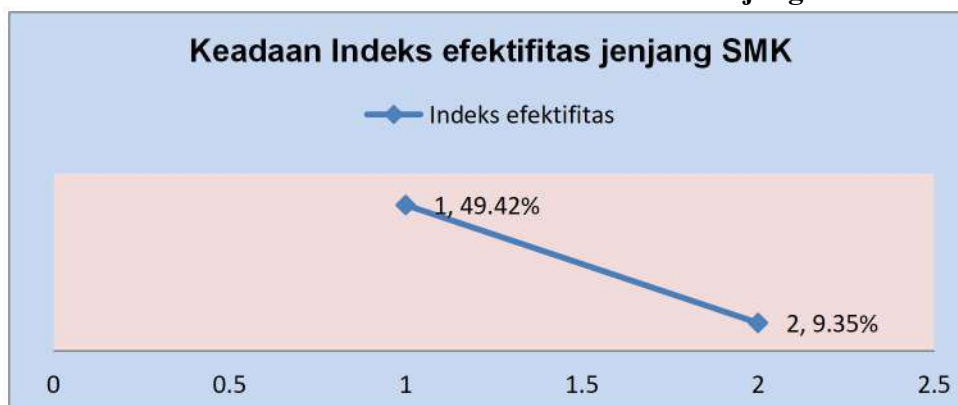
No	Standar/Indikator/Sub	Capaian 2018		Kinerja	Sasaran				
		Nilai	Kategori		M1	M2	M3	M4	SNP
1.	Standar Kompetensi Lulusan	6,04	★★★★		5	7	9	128	26
2.	Standar Isi	5,20	★★★★		5	8	56	103	3
3.	Standar Proses	6,08	★★★★		4	8	9	123	31
4.	Standar Penilaian Pendidikan	5,64	★★★★		5	9	24	124	12
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,92	★★		20	135	20	0	0
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2,88	★★		15	160	0	0	0
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	4,88	★★★		11	7	47	110	0
8.	Standar Pembiayaan	5,62	★★★★		0	8	22	139	6

Jumlah SMK yang mengalami peningkatan indeks efektivitas berdasarkan hasil peta mutu tahun 2016, 2017, dan 2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.28. Jumlah SMK Meningkat Indeks Efektivitasnya



Grafik 3.29. Keadaan Indeks Efektivitas Jenjang SMK



Adapun peningkatan indeks efektifitas berdasarkan capaian mutu per kategori dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.20. Peningkatan Indeks Efektivitas Capaian Mutu SMK Per Kategori

TAHUN	SNP1	SNP2	SNP3	SNP4	% indeks efektifitas
2016	82	35	87	5	2,38 %
2017	45	6	55	114	51,81 %
%Kenaikan					49,42 %
2018	5	9	68	93	42,46 %
%penurunan					9,35 %

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2016 jumlah sekolah jenjang SMK yang berada pada kategori “menuju SNP 4” hanya terdapat 5 sekolah. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah sekolah yang berada pada kategori “ menuju SNP 4” telah terdapat 114 sekolah. Sehingga persentase kenaikan satuan pendidikan SMK yang meningkat indeks efektifitasnya pada tahun 2017 adalah 49,42%. Pada tahun 2018 ini jumlah sekolah yang berada pada kategori “menuju SNP 4” telah terdapat 93 sekolah. Sehingga persentase kenaikan satuan pendidikan SMK yang meningkat indeks efektifitasnya pada tahun 2018 ini diperoleh 42,46%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 kebanyakan sekolah masih belum memahami makna dari pemetaan mutu pendidikan dan menginput data ke dalam aplikasi tidak berdasar pada kondisi riil sekolah, disamping itu sebagian besar sekolah telah memahami bahwa hasil pemetaan mutu tersebut digunakan dalam rangka untuk menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah dan ada hubungannya dengan pengalokasian dana BOS. Akan tetapi, meski jumlahsekolah menuju SNP 4 pada tahun 2018 ini berkurang jika dibanding tahun 2017 tidak mengindikasikan bahwa terjadi penurunan mutu pendidikan. Hal ini melainkan terjadi peningkatan mutu pendidikan karena capaian rata-rata SNP di seluruh

jenjang pendidikan provinsi Kalimantan Timur meningkat yang berarti meningkat pula pelaksanaan pemahaman sekolah tentang penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.

Ketercapaian ke-4 indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya dukungan oleh beberapa program/kegiatan :

- a. Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan
- b. Koordinasi PPG dengan Perguruan Tinggi
- c. Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Pengumpulan Data
- d. Bimbingan Teknis Pengawas
- e. Pelaksanaan Pengumpulan Data
- f. Verifikasi dan Validasi
- g. Bimtek Dapodik Tingkat Propinsi
- h. Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu
- i. Analisis Data Mutu
- j. Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu
- k. Diseminasi Pemetaan Mutu.

Empat indikator dari *output* “Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya dapat disimpulkan bahwa

- *Output* dari peta mutu pendidikan adalah diperolehnya capaian SNP dan rekomendasi mutu di tingkat sekolah, kabupaten maupun provinsi. Adapun Rekomendasi secara umum berdasarkan hasil capaian SNP adalah Pemerintah Daerah perlu mendorong :
 1. Peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah
 2. Mengadakan berbagai lomba untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas siswa untuk semua jenjang
 3. Peningkatan kualifikasi guru
 4. Peningkatan anggaran pendidikan hingga 20% untuk setiap kabupaten/kota dan provinsi.
- *Outcome* dari hasil peta mutu sekolah adalah
 1. Peta mutu tersebut digunakan oleh sekolah dan para pengambil kebijakan dalam menyusun program RPJMN dan program Rencana Kerja Tahunan,
 2. Pihak sekolah dapat mengetahui kondisi sekolah mereka yang sebenarnya.
 3. Penjaminan mutu digunakan dalam pengelolaan manajemen sekolah dan manajemen pembelajaran secara mandiri dan berkelanjutan
- *Impact* dari peta mutu sekolah ini adalah
 1. Adanya peningkatan mutu pendidikan di sekolah
 2. Terjadinya budaya mutu
- Hambatan/kendala permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :
 - a. Masih adanya daerah terpencil yang sangat jauh dan sulit dijangkau oleh pengawas dimana akses dan layanan internet juga masih sulit diperoleh.

- b. Ada sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi tetapi masih terdaftar dalam DAPODIK karena tidak adanya pemutakhiran data dan kontrol validasi secara aktif oleh instansi yang berwenang, sehingga penginputan data PMP pun di kabupaten tersebut tidak dapat mencapai 100%.
 - c. Adanya penggunaan aplikasi ilegal dalam mempercepat proses pengisian PMP
- Langkah antisipasi
Langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam menangani hambatan dan permasalahan di atas adalah
 - a. Untuk wilayah terpencil yang sulit dengan akses internet dapat melakukan penginputan pada wilayah yang dekat dengan akses internet dan dibentuk TIM yang anggotanya berasal dari unsur pengawas, operator sekolah dengan maksud agar dapat memberikan arahan dan menyampaikan informasi tentang penginputan data PMP ke dalam aplikasi DAPODIK 2018
 - b. Membangun komunikasi dan komitmen yang lebih efektif lagi antara LPMP, Diknas Kab/Kota, Pengawas, dan satuan pendidikan di kab/kota, agar sekolah yang sudah tidak aktif beroperasi, segera dilakukan pemutakhiran data, melakukan identifikasi dan kontrol validasi secara aktif serta melakukan pemetaan data invalid sehingga penginputan data PMP tersebut dapat mencapai 100%.
 - c. Mensosialisasikan kepada seluruh operator agar tidak menggunakan aplikasi yang ilegal tersebut.

Semua kegiatan dari *output* satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya dilaksanakan oleh Seksi Sistem Informasi sebagaimana tugas SI yang semestinya yakni melakukan tugas pengumpulan data untuk pemetaan mutu. Tugas tersebut dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, verifikasi, dan validasi dan penjelasan data mutu pendidikan.

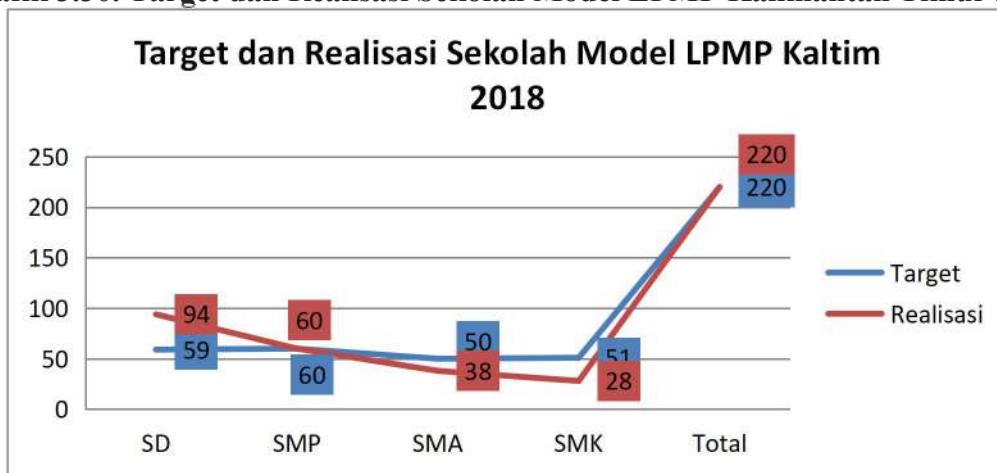
Output B. Satuan Pendidikan yang Difasilitasi Berdasarkan SNP

Jumlah sekolah model (SPMI dan SPME) yang menjadi target LPMP Kalimantan Timur tahun 2018 adalah 220 sekolah dan terealisasi 220 sekolah di provinsi Kalimantan Timur. Jadi persentase realisasi adalah 100%. Adapun rincian target dan realisasi sekolah model per jenjang di provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21. Target dan Realisasi Sekolah Model dan Imbas di Kalimantan Timur 2018

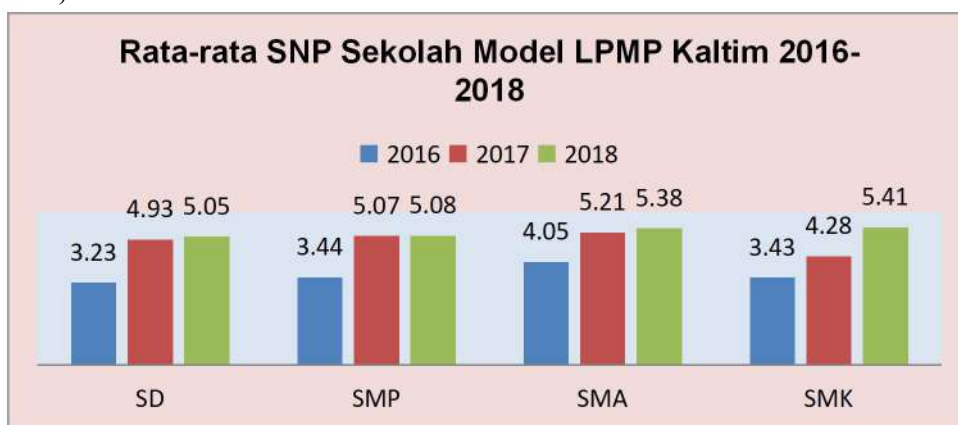
Jenjang	SD	SMP	SMA	SMK	TOTAL
Target	59	60	50	51	220
Realisasi SPMI/SPME	94	60	38	28	220

Grafik 3.30. Target dan Realisasi Sekolah Model LPMP Kalimantan Timur 2018



Tren capaian 8 SNP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 pada sekolah model melalui kegiatan SPMI dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.31. Rata-rata SNP Sekolah Model LPMP Kalimantan Timur Tahun 2016, 2017, dan 2018



Tabel 3.22. Capaian 8 SNP Berdasarkan Kategori di Provinsi Kalimantan Timur

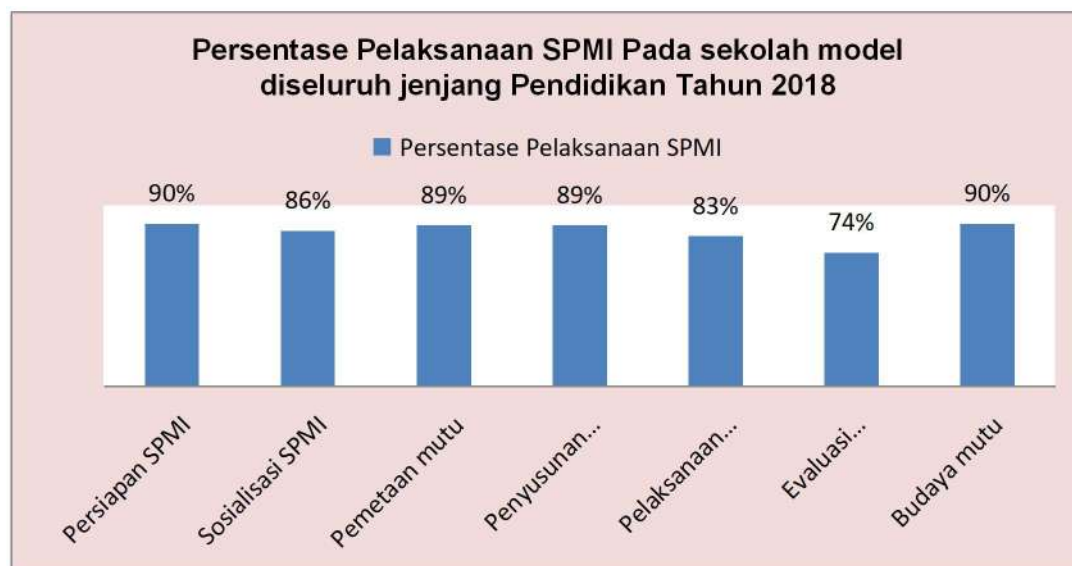
JENJANG	RATA - RATA SNP 2016	kategori SNP	RATA-RATA SNP 2017	kategori SNP	RATA-RATA SNP 2018	kategori SNP
SD	3,23	Menuju SNP 2	4,93	Menuju SNP 3	5,18	Menuju SNP 4
SMP	3,44	Menuju SNP 3	5,07	Menuju SNP 4	5,07	Menuju SNP 4
SMA	4,05	Menuju SNP 3	5,21	Menuju SNP 4	5,38	Menuju SNP 4
SMK	3,43	Menuju SNP 2	4,28	Menuju SNP 3	5,41	Menuju SNP 4

JENJANG	RATA - RATA SNP 2016	kategori SNP	RATA- RATA SNP 2017	kategori SNP	RATA- RATA SNP 2018	kategori SNP
RATA- RATA	3,53	Menuju SNP 2	4,87	Menuju SNP 3	5,26	Menuju SNP 4

Dalam mengukur ketercapaian indikator *Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi berdasarkan SNP* dapat diperoleh dengan melihat capaian 8 SNP tahun 2016,2017 dan tahun 2018 pada sekolah model dan penerapan penjaminan mutu pendidikan melalui kegiatan SPMI pada sekolah model. Dengan melakukan pengukuran perbandingan realisasi hasil raport mutu tahun sebelumnya dapat dilihat peningkatan mutu pendidikan sekolah model per jenjang pendidikan. Untuk seluruh jenjang pendidikan berdasarkan tabel di atas pada tahun 2016 diperoleh rata-rata capaian SNP 3, 53 termasuk kategori menuju SNP 2, sedangkan pada tahun 2017 capaian SNP untuk seluruh jenjang diperoleh rata-rata 4,87 termasuk kategori menuju SNP 3. Sedangkan pada tahun 2018 ini, capaian SNP untuk seluruh jenjang diperoleh dengan rata-rata 5,26, termasuk kategori menuju SNP 4. Sehingga melalui pengukuran ini maka ketercapaian sasaran strategis LPMP Kalimantan Timur melalui penjaminan mutu pendidikan, juga dapat terlihat peningkatannya, hal ini dapat dibuktikan dari makin meningkatnya nilai capaian SNP dari tahun 2016 ke tahun 2017 dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 pada program sekolah model.

Dengan adanya hasil peta mutu sekolah tersebut, maka pada *output* ini juga telah diperoleh suatu rekomendasi peningkatan mutu baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kabupaten/propinsi dalam rangka penyusunan program tahunan dan 4 tahunan (RKAS/RKS) di sekolah atau program jangka menengah pendidikan di provinsi Kalimantan Timur. Berikut disajikan hasil implementasi sistem penjaminan mutu internal pada sekolah model tahun 2018 sebagai berikut:

Grafik 3.32. Persentase Pelaksanaan SPMI Pada Sekolah Model di Seluruh Jenjang Pendidikan Tahun 2018



Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar sekolah yang ada di 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur telah menerapkan siklus SPMI. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya SPMI disekolah akan dapat membantu sekolah tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikannya dan mampu menerapkan SPMI sebagai bagian dari penerapan manajemen sekolah dan manajemen pembelajaran yang dilaksanakan secara terus menerus, mandiri, akurat, terstandar, dan terdokumentasi agar dapat tercipta budaya mutu di sekolah. Ketercapaian dari *output* “Satuan pendidikan yang difasilitasi berdasarkan SNP” didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut :

9. SD yang Telah Disupervisi Dan Difasilitasi Dalam Pencapaian SNP

Ketercapaian indikator kinerja jumlah SD yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model dan Implementasi Kurikulum 2013.

a. Pengembangan Sekolah Model

Pengembangan Sekolah Model didukung oleh dua subprogram yaitu Sekolah Model yang Difasilitasi Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sekolah Model yang Difasilitasi Melalui Kemitraan.

Pengembangan Sekolah Model berbasis SNP melalui SPMI didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu Evaluasi Sekolah Model SPMI, Penyusunan Profil Sekolah Model, Bimtek SPMI Sekolah Model, Pendampingan Sekolah Model, dan Monitoring dan Evaluasi. Dalam *output* ini terdapat 3 kegiatan tambahan yang dilaksanakan oleh LPMP Kalimantan Timur yang mendukung program prioritas Kemendikbud tahun 2018, yakni Kegiatan Penguatan MKPS/PKPS dan Sekolah Model Tentang Regulasi Kementerian Pendidikan, Kegiatan Pembekalan dan Penguatan SDMP LPMP dalam Regulasi Kemdikbud, dan Kegiatan Pendampingan Sekolah Model dalam Implementasi Regulasi Kemdikbud. Sedangkan Pengembangan Sekolah Model Melalui Kemitraan ditunjang oleh kegiatan Bimtek SPME, Sosialisasi PMP ke sekolah, *Capacity Building* SPME, Monitoring dan Evaluasi, dan Diseminasi Hasil.

Gambar 3.6. Kegiatan Pendampingan Sekolah Model In Service Training di TPK SDN 011 Sangatta Kutai Timur



Gambar 3.7. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sekolah Model di SDN 003 Melak



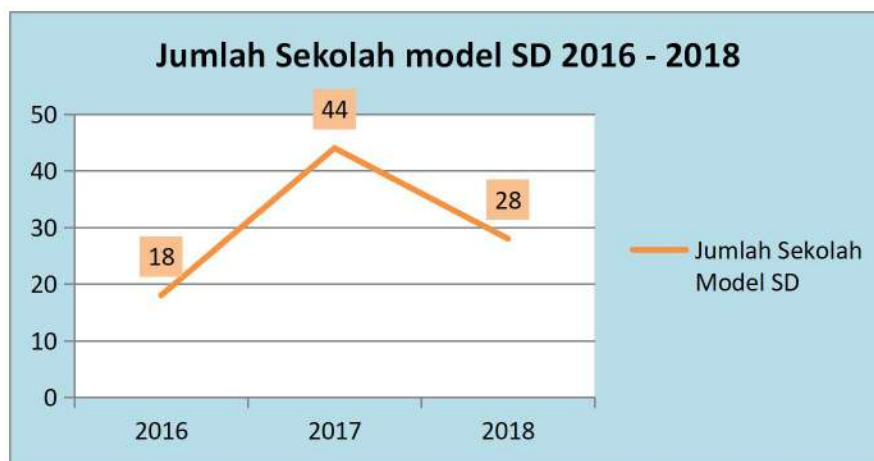
Adapun jumlah SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui program pengembangan sekolah model dalam kegiatan SPMI adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23. Jumlah SD yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	%Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	%Capaian		
198 sklh	59 sklh	94 sklh	159,32 %	493 sekolah	79,91 %

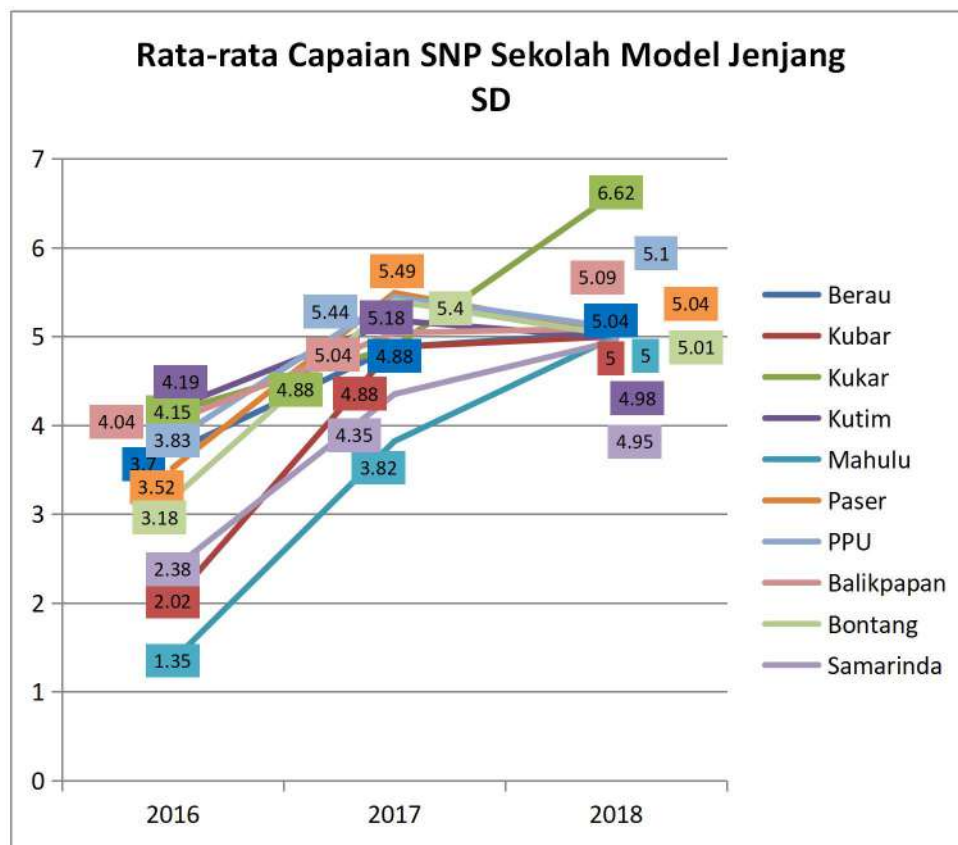
Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2017 realisasi sekolah model adalah 198 sekolah, sedangkan realisasi sekolah model pada tahun 2018 adalah 94 sekolah dengan persentase capaian 159,32%. Realisasi ini melebihi dari target kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan kuota sekolah model dari jenjang SMA dan SMK ke jenjang SD sebanyak 35 sekolah. Jadi, kuota SD untuk sekolah model ditambah, tapi untuk kuota jenjang SMA dan SMK dikurangi. Namun, pada akhirnya tetap terealisasi 220 sekolah untuk output satuan pendidikan yang disupervisi dan difasilitasi berdasarkan SNP. Jumlah realisasi sekolah model jenjang SD pada tahun ini lebih sedikit jika dibanding sekolah model pada tahun sebelumnya, karena prinsip yang digunakan dalam pembinaan sekolah model ini adalah tetap membina sekolah model yang ada pada tahun sebelumnya meski penambahan setiap tahunnya berkisar 20% saja sampai pada akhir tahun renstra. Di samping itu pada awal tahun 2017, LPMP Kalimantan Timur terpecah menjadi LPMP Kalimantan Utara dan posisi masih dalam satu DIPA dengan LPMP Kalimantan Timur. Sekolah model yang menjadi binaan LPMP Kalimantan Timur ini diharapkan dapat memberi pengimbasan terhadap sekolah yang ada disekitarnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik. Adapun grafik perbandingan jumlah sekolah model tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik 3.33. Jumlah Sekolah Model SD 2016-2018



Target renstra sampai pada tahun 2019 adalah 493 sekolah dan telah terealisasi 79,91% dari target yang ditentukan pada renstra sebesar 80%. Adapun rata-rata capaian SNP untuk jenjang SD pada sekolah model di 10 kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Grafik 3.44. Rata-rata Capaian SNP Sekolah Model Jenjang SD



Pelaksanaan Program Sekolah Model di tahun 2018 sudah memasuki tahun ketiga, berdasarkan grafik di atas dijelaskan bahwa rata-rata capaian SNP jenjang SD tahun 2016 di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur adalah 3,23, sedangkan tahun 2017 adalah 4,93, pada tahun 2018 ini rata-rata capaian SNP jenjang SD adalah 5,09, capaian rata-rata SNP untuk sekolah model ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun di 10 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya SPMI di sekolah model maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut dan di kabupaten/kota pada umumnya dan sekolah dapat menerapkan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam proses manajemen sekolah dan manajemen pembelajaran, sehingga hasil capaian SNP juga dapat berimplikasi terhadap peningkatan hasil ujian nasional dan penilaian akreditasi sekolah. Dengan melalui pengukuran ini, maka ketercapaian sasaran strategis LPMP Kalimantan Timur melalui penjaminan mutu pendidikan, juga dapat terlihat peningkatannya. Hal ini dapat dibuktikan dari makin meningkatnya nilai capaian SNP jenjang SD dari tahun 2016 ke tahun 2017 dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 pada program sekolah model.

Persentase SD yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP

Persentase SD yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui program pengembangan sekolah model dalam kegiatan SPMI dan SPME adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24. Persentase SD yang Telah Difasilitasi dalam Pencapaian SNP Melalui Program Pengembangan Sekolah Model dalam Kegiatan SPMI Dan SPME

Realisasi 2017	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
40%	60%	159,32%	79,91%	80%	79,91%

Realisasi kinerja persentase SD yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP pada tahun 2018 pada sekolah model melalui kegiatan SPMI mencapai 159,32% telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 60% dengan persentase capaian 79,91%. Capaian tersebut terealisasi melampaui target yang ditetapkan karena adanya pengalihan kuota sekolah model dari jenjang SMA dan SMK ke jenjang SD sebanyak 35 sekolah.

Ketercapaian indikator kinerja jumlah dan persentase SD yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model, utamanya berkaitan dengan pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan dan penerapan penjaminan mutu pendidikan disekolah sebagai suatu kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus menerus, terstandar, akurat, dan terdokumentasi. Pada tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 kegiatan sekolah model ini masih terfokus pada kegiatan fasilitasi. Untuk tahun 2019, kegiatan sekolah model ini juga terfokus pada kegiatan supervisi. Oleh karena itu, *output* Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan Capaian SNP telah mengalami revisi atau perubahan dalam renstra menjadi *output* yang berbunyi “Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi dan Disupervisi Berdasarkan Capaian SNP”.

10. SMP yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Dalam Pencapaian SNP

Ketercapaian indikator kinerja jumlah SMP yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model dan Implementasi Kurikulum 2013.

a. Pengembangan Sekolah Model

Pengembangan Sekolah Model didukung oleh dua subprogram yaitu Sekolah Model yang Difasilitasi Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sekolah Model yang difasilitasi melalui kemitraan.

Pengembangan Sekolah Model berbasis SNP melalui SPMI didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu Evaluasi sekolah model SPMI, Penyusunan Profil sekolah model, Bimtek SPMI sekolah model, Pendampingan sekolah model, Monitoring dan Evaluasi. Dalam Output ini terdapat 3 kegiatan tambahan yang dilaksanakan oleh LPMP Kalimantan Timur yang

mendukung program prioritas Kemendikbud tahun 2018 yakni Kegiatan Penguatan MKPS/PKPS dan Sekolah Model Tentang Regulasi Kementerian Pendidikan, Kegiatan Pembekalan dan Penguatan SDMP LPMP dalam Regulasi Kemdikbud, dan Kegiatan Pendampingan Sekolah Model dalam Implementasi Regulasi Kemdikbud. Sedangkan Pengembangan Sekolah Model melalui kemitraan ditunjang oleh kegiatan Bimtek SPME, Sosialisasi PMP ke sekolah, *Capacity Building* SPME, Monitoring dan Evaluasi, dan Diseminasi Hasil.

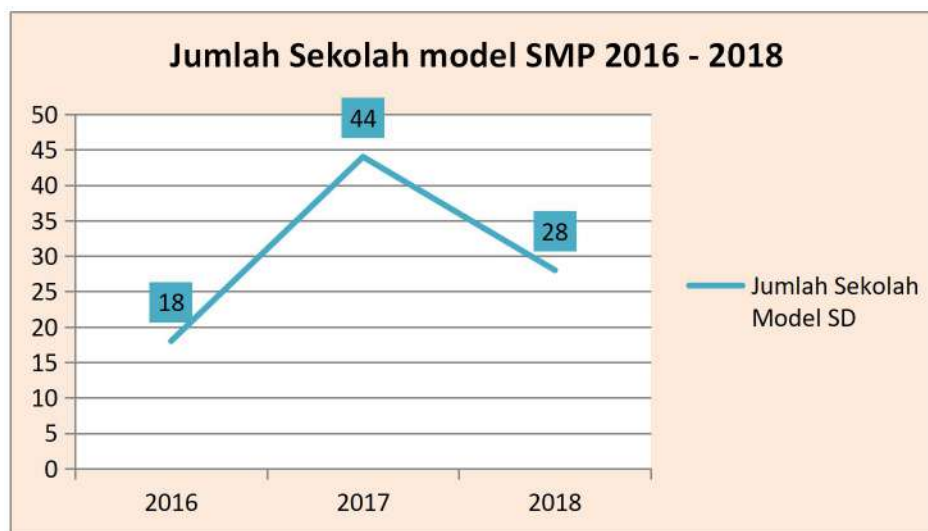
Adapun jumlah SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui program pengembangan sekolah model dalam kegiatan SPMI adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25. Jumlah SMP yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	%Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
128 sklh	60 sklh	60 sklh	100 %	322 sekolah	80,12%

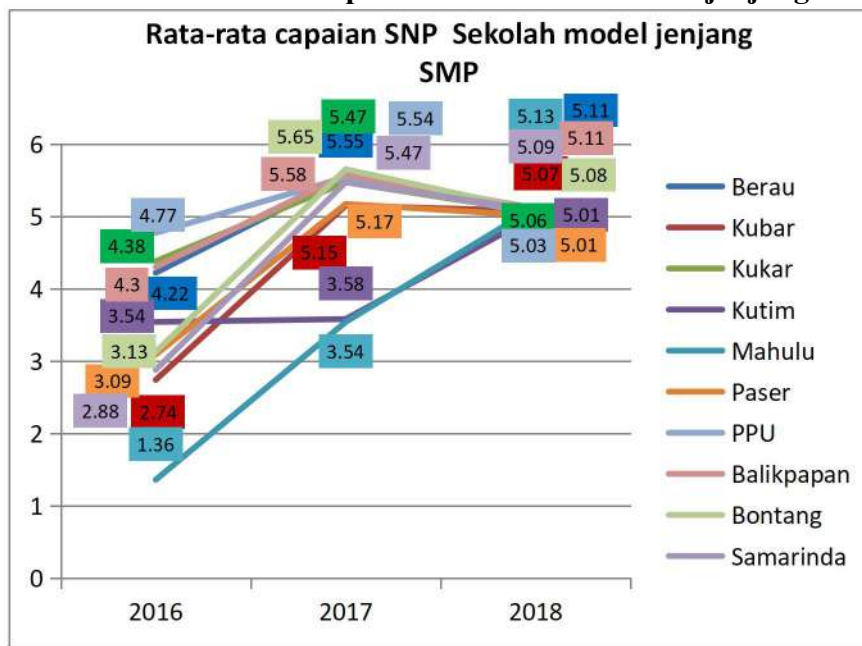
Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2017 realisasi sekolah model adalah 128 sekolah, sedangkan realisasi sekolah model pada tahun 2018 adalah 60 sekolah dengan persentase capaian 100%. Realisasi ini telah sesuai dengan target kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja. *Output* Satuan Pendidikan yang difasilitasi berdasarkan SNP. Jumlah realisasi sekolah model jenjang SMP pada tahun ini lebih sedikit jika dibanding sekolah model pada tahun sebelumnya, karena prinsip yang digunakan dalam pembinaan sekolah model ini adalah tetap membina sekolah model yang ada pada tahun sebelumnya meski penambahan setiap tahunnya berkisar 20% saja sampai pada akhir tahun renstra. Disamping itu pada awal tahun 2017 LPMP Kalimantan Timur terpecah menjadi LPMP Kalimantan Utara dan posisi masih dalam satu DIPA dengan LPMP Kalimantan Timur. Sekolah model yang menjadi binaan LPMP Kalimantan Timur ini diharapkan dapat memberi pengimbasan terhadap sekolah yang ada disekitarnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik. Adapun grafik perbandingan jumlah sekolah model tahun 2016 dan tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik 3.45. Jumlah Sekolah model SMP 2016 - 2018



Target renstra sampai pada tahun 2019 adalah 322 sekolah dan telah teralisasi 80,12% di tahun 2018, dari target yang ditentukan pada renstra sebesar 80%. Adapun rata-rata capaian SNP untuk jenjang SMP pada sekolah model di 10 kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Grafik 3.46. Rata-rata capaian SNP Sekolah model jenjang SMP



Pelaksanaan Program Sekolah Model di tahun 2018 sudah memasuki tahun ketiga, berdasarkan grafik di atas dijelaskan bahwa rata-rata capaian SNP jenjang SMP tahun 2016 adalah 3,44 sedangkan tahun 2017 adalah 5,07 sedangkan rata-rata capaian SNP tahun 2018 adalah tetap di angka 5,07. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya SPMI di sekolah model maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut dan di kabupaten/kota pada umumnya dan sekolah dapat menerapkan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam proses manajemen sekolah dan manajemen pembelajaran, sehingga hasil capaian SNP juga dapat berimplikasi terhadap peningkatan hasil ujian nasional dan penilaian akreditasi sekolah. Dengan melalui pengukuran ini, maka ketercapaian sasaran strategis LPMP Kalimantan Timur melalui penjaminan mutu pendidikan, juga dapat terlihat peningkatannya. Hal ini dapat dibuktikan dari makin meningkatnya nilai capaian SNP dari tahun ke tahun pada program sekolah model.

Gambar 3.8. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Model



Persentase SMP yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP

Persentase SMP yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui program pengembangan sekolah model dalam kegiatan SPMI dan SPME adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26. Persentase SMP yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
40 %	60%	100 %	80,12%	80%	80,12 %

Realisasi kinerja Persentase SMP yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP pada tahun 2018 pada sekolah model melalui kegiatan SPMI mencapai 100% telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 60% dengan persentase capaian 80,12%. Capaian tersebut terealisasi telah melebihi target yang ditetapkan dalam target karena beberapa hal antara lain :(1) pada tahun 2018 ini tidak ada pengalihan kuota untuk jenjang SMP dan terealisasi berdasarkan jumlah sekolah yang telah ditargetkan mengakibatkan persentase capaian telah melebihi target renstra 2019 dan (2) fungsi koordinasi yang berjalan baik antara LPMP Kalimantan Timur dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Ketercapaian indikator kinerja jumlah dan persentase SMP yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model, utamanya berkaitan dengan pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan dan penerapan penjaminan mutu pendidikan di sekolah sebagai suatu kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus menerus, terstandar, akurat, dan terdokumentasi. Pada tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 kegiatan sekolah model ini masih terfokus pada kegiatan fasilitasi. Untuk tahun 2019, kegiatan sekolah model ini juga terfokus pada kegiatan supervisi. Oleh karena itu, *output* Satuan Pendidikan yang Telah Difasilitasi Berdasarkan Capaian SNP telah mengalami revisi atau perubahan dalam renstra menjadi *output* yang berbunyi “Satuan Pendidikan yang Telah Difasilitasi dan Disupervisi Berdasarkan Capaian SNP.”

11. SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Ketercapaian indikator kinerja jumlah SMA yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model dan Implementasi Kurikulum 2013.

a. Pengembangan Sekolah Model

Pengembangan Sekolah Model didukung oleh dua subprogram yaitu Sekolah Model yang Difasilitasi melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sekolah Model yang difasilitasi melalui kemitraan.

Pengembangan Sekolah Model berbasis SNP melalui SPMI didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu Evaluasi sekolah model SPMI, Penyusunan Profil sekolah model, Bimtek SPMI sekolah model, Pendampingan sekolah model, Monitoring dan Evaluasi. Dalam Output ini terdapat 3 kegiatan tambahan yang dilaksanakan oleh LPMP Kalimantan Timur yang mendukung program prioritas Kemendikbud tahun 2018 yakni Kegiatan Penguatan MKPS/PKPS dan sekolah model tentang regulasi Kementerian Pendidikan, Kegiatan Pembekalan dan Penguatan SDMP LPMP Dalam Regulasi Kemdikbud, dan Kegiatan Pendampingan sekolah model dalam Implementasi Regulasi Kemdikbud. Sedangkan Pengembangan Sekolah Model melalui kemitraan ditunjang oleh kegiatan Bimtek SPME, Sosialisasi PMP ke sekolah, Capacity Building SPME, Monitoring dan Evaluasi dan Diseminasi Hasil.

Adapun jumlah SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui program pengembangan sekolah model dalam kegiatan SPMI adalah sebagai berikut:

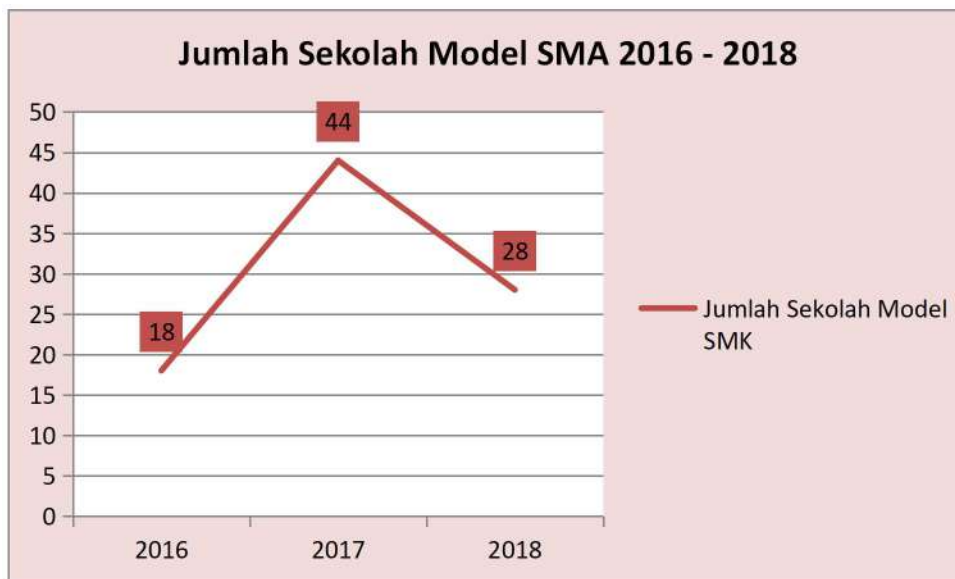
Tabel 3.27. Jumlah SMA yang Telah Disupervisi Dan Difasilitasi Dalam Pencapaian SNP

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	%Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
60 Sklh	50 sklh	38 sklh	76 %	155 sekolah	80 %

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2017 realisasi sekolah model adalah 60 sekolah, sedangkan realisasi sekolah model pada tahun 2018 adalah 38 sekolah dengan persentase

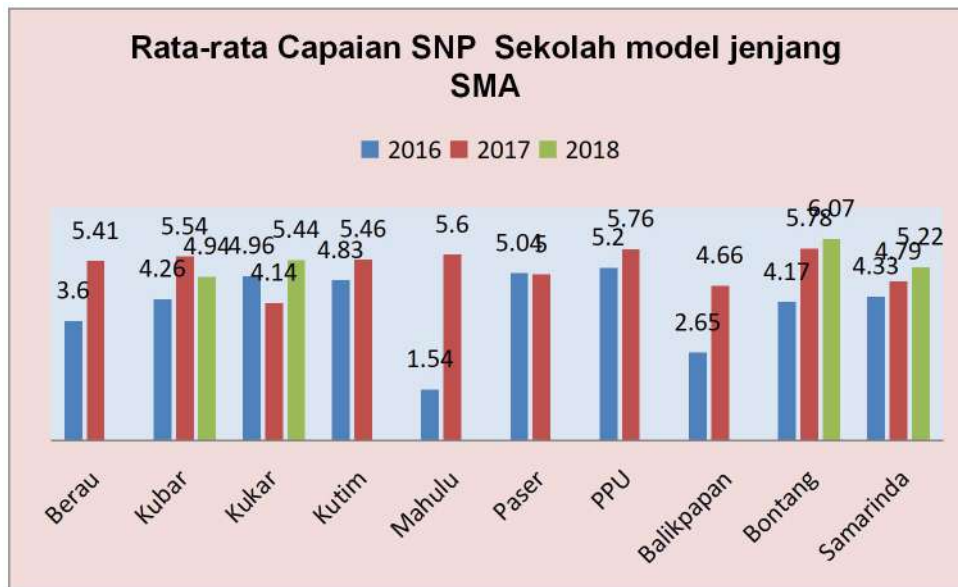
capaian 76% berada di bawah target yang terdapat dalam perjanjian kinerja hal ini disebabkan karena adanya pengalihan kuota sekolah model dari jenjang SMA ke jenjang SD sebanyak 12 sekolah. Jadi, kuota SMA untuk sekolah model dikurangi, tapi untuk kuota sekolah model jenjang SD perealisasiannya ditambah, namun pada akhirnya tetap terealisasi 220 sekolah dalam konteks SPMI dan SPME. Ouput Satuan Pendidikan yang difasilitasi berdasarkan SNP. Jumlah realisasi sekolah model jenjang SMA pada tahun ini lebih sedikit jika dibanding sekolah model pada tahun sebelumnya, karena prinsip yang digunakan dalam pembinaan sekolah model ini adalah tetap membina sekolah model yang ada pada tahun sebelumnya meski penambahan setiap tahunnya berkisar 20% saja sampai pada akhir tahun renstra. Disamping itu, pada awal tahun 2017 LPMP Kalimantan Timur terpecah menjadi LPMP Kalimantan Utara dan posisi masih dalam satu DIPA dengan LPMP Kalimantan Timur. Sekolah model yang menjadi binaan LPMP Kalimantan Timur ini diharapkan dapat memberi pengimbasan terhadap sekolah yang ada disekitarnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik. Adapun grafik perbandingan jumlah sekolah model SMA tahun 2016 dan tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik 3.47. Perbandingan Jumlah Sekolah Model SMA Tahun 2016, 2017, dan 2018



Target renstra sampai pada tahun 2019 untuk jenjang SMA adalah 155 sekolah dan telah teralisasi 80%. Hal ini berarti sesuai dari target yang ditentukan pada renstra sebesar 80%. Adapun rata-rata capaian SNP untuk jenjang SMA pada sekolah model di 10 kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Grafik 3.48. Rata-rata Capaian SNP Sekolah Model Jenjang SMA



Pelaksanaan Program Sekolah Model di tahun 2018 sudah memasuki tahun ketiga. Berdasarkan grafik di atas, dijelaskan bahwa rata-rata capaian SNP jenjang SMA tahun 2016 adalah 4,05 sedangkan pada tahun 2017 adalah 5,21. Sedangkan pada tahun 2018 ini diperoleh rata-rata capaian SNP di 5 sekolah yang datanya dapat diakses secara daring adalah 5,38 dan masih terdapat 22 sekolah model jenjang SMA di 9 kabupaten/kota yang sampai bulan Desember ini sebagian besar sekolah belum dapat diakses capaian SNP-nya. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan penginputan data PMP nasional secara *online* dan permasalahan sistem yang ada di pusat. Meski demikian, dari lima sekolah yang capaian rata-rata SNP-nya dapat diakses mengalami kenaikan capaian SNP. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya SPMI di sekolah maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan di kabupaten/kota pada umumnya. Sehingga melalui pengukuran ini, maka ketercapaian sasaran strategis LPMP Kalimantan Timur melalui penjaminan mutu pendidikan, juga dapat terlihat peningkatannya. Hal ini dapat dibuktikan dari makin meningkatnya nilai capaian SNP jenjang SMA dari tahun ke tahun pada program sekolah model.

Persentase SMA yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP

Persentase SMA yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui program pengembangan sekolah model dalam kegiatan SPMI dan SPME adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28. Persentase SMA yang Telah Difasilitasi dalam Pencapaian SNP

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
40 %	60%	76 %	80%	80%	80%

Realisasi kinerja persentase SMA yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP pada tahun 2018 pada sekolah model melalui kegiatan SPMI dan SPME mencapai 76% telah

melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 60% dengan persentase capaian 80%. Capaian tersebut terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Meski telah terjadi pengalihan kuota ke jenjang SD, akan tetapi telah tercapai sesuai target renstra 2019. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) karena pada tahun 2017 telah terealisasi jumlah sekolah yang melebihi dari target sehingga meski telah dikurangi kuotanya 2018 ini, maka akan tetap terealisasi melebihi dari target sekolah yang ditentukan, karena pada tahun 2017 tersebut harapannya tidak menambah jumlah sekolah, akan tetapi tetap membina sekolah yang ada dan dapat menjadi percontohan dari sekolah yang ada di sekitarnya, dan (2) fungsi koordinasi yang berjalan baik antara LPMP Kalimantan Timur dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Ketercapaian indikator kinerja jumlah dan persentase SMA yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dan penerapan penjaminan mutu pendidikan disekolah sebagai suatu kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus menerus, terstandar, akurat, dan terdokumentasi serta mandiri. Pada tahun 2016, 2017, dan tahun 2018, kegiatan sekolah model ini masih terfokus pada kegiatan fasilitasi, untuk tahun 2019 kegiatan sekolah model ini juga terfokus pada kegiatan supervisi oleh karena itu *output* Satuan Pendidikan yang Telah Difasilitasi Berdasarkan Capaian SNP telah mengalami revisi atau perubahan dalam renstra menjadi *output* yang berbunyi “Satuan Pendidikan yang Telah Difasilitasi dan Disupervisi Berdasarkan Capaian SNP.”

12. SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Ketercapaian indikator kinerja jumlah SMK yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model dan Implementasi Kurikulum 2013.

a. Pengembangan Sekolah Model

Pengembangan Sekolah Model didukung oleh dua subprogram yaitu Sekolah Model yang Difasilitasi melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sekolah Model yang difasilitasi melalui kemitraan.

Pengembangan sekolah model berbasis SNP melalui SPMI didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu evaluasi sekolah model SPMI, penyusunan profil sekolah model, Bimtek SPMI sekolah model, pendampingan sekolah model, dan monitoring dan evaluasi. Dalam *output* ini terdapat 3 kegiatan tambahan yang dilaksanakan oleh LPMP Kalimantan Timur yang mendukung program prioritas Kemendikbud tahun 2018, yakni kegiatan penguatan MKPS/PKPS dan sekolah model tentang regulasi Kementerian Pendidikan, kegiatan pembekalan dan penguatan SDMP LPMP dalam regulasi Kemdikbud, dan kegiatan pendampingan sekolah model dalam implementasi regulasi Kemdikbud. Sedangkan pengembangan sekolah model melalui kemitraan ditunjang oleh kegiatan Bimtek SPME, sosialisasi PMP ke sekolah, *capacity building* SPME, Monitoring dan Evaluasi, dan Diseminasi Hasil.

Adapun jumlah SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui program pengembangan sekolah model dalam kegiatan SPMI adalah sebagai berikut:

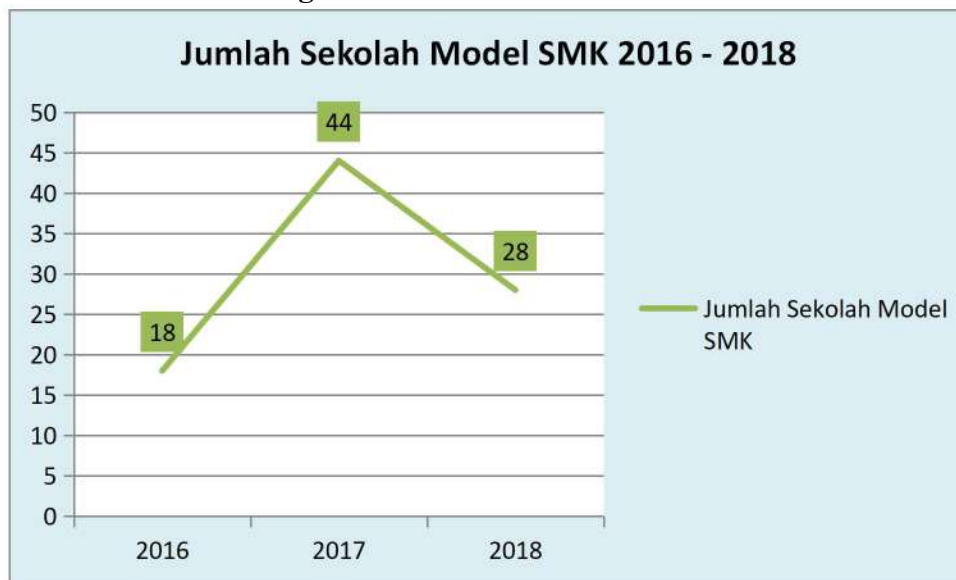
Tabel 3.29. Jumlah SMK yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	%Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
44 sekolah	51 sklh	28 sklh	54,90 %	113 sekolah	79,64 %

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2017 realisasi sekolah model jenjang SMK adalah 44 sekolah, sedangkan realisasi sekolah model pada tahun 2018 adalah 28 sekolah dengan persentase capaian 54,90% dan berada di bawah target yang terdapat dalam perjanjian kinerja. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan kuota sekolah model dari jenjang SMK ke jenjang SD sebanyak 23 sekolah. Jadi, kuota SMK sekolah model dikurangi, tapi untuk kuota sekolah model jenjang SD perealisasiannya ditambah. Namun pada akhirnya, tetap terealisasi 220 sekolah untuk *output* Satuan Pendidikan yang difasilitasi berdasarkan SNP. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah sekolah model jenjang SMK pada tahun 2018 mengalami penurunan, karena pada tahun 2017 telah terealisasi 44 sekolah, dimana prinsip yang digunakan dalam pembinaan sekolah model ini adalah tetap membina sekolah model yang ada pada tahun sebelumnya, meski penambahan setiap tahunnya berkisar 20% saja sampai pada akhir tahun renstra. Disamping itu, pada awal tahun 2017 LPMP Kalimantan Timur terpecah menjadi LPMP Kalimantan Utara dan posisi masih dalam satu DIPA dengan LPMP Kalimantan Timur. Sekolah model yang menjadi binaan LPMP Kalimantan Timur inidiharapkan dapat memberi pengimbasan terhadap sekolah yang ada disekitarnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik.

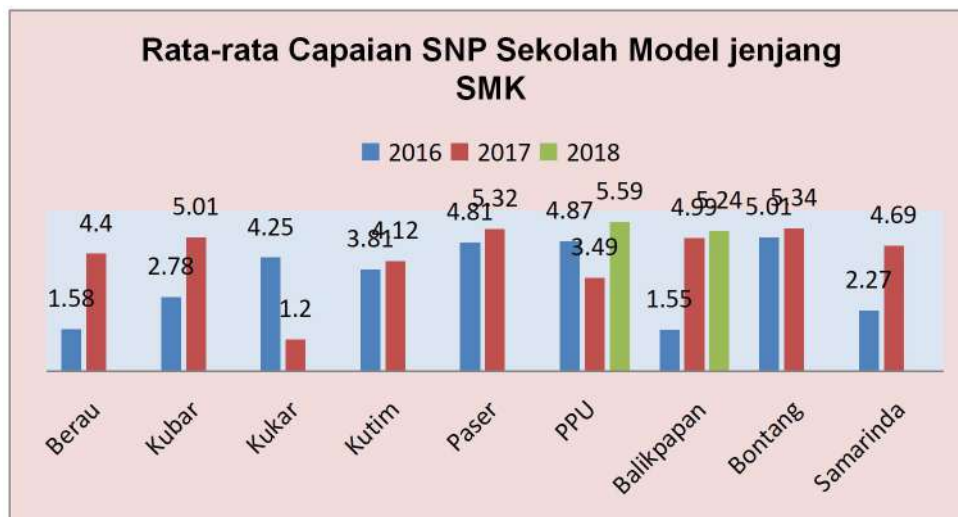
Adapun grafik perbandingan jumlah sekolah model SMK tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 sebagai berikut :

Grafik 3.49. Perbandingan Jumlah Sekolah Model SMK Tahun 2016-2018



Target renstra sampai pada tahun 2019 untuk jenjang SMK adalah 113 sekolah dan telah teralisasi 79,64 % dari target yang ditentukan pada renstra sebesar 80 %. Jadi, masih ada sisa 0,36% sekolah yang belum dibina berdasarkan target yang telah ditentukan pada renstra 2019. Adapun rata-rata capaian SNP untuk jenjang SMA pada sekolah model di 10 kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.50. Rata-rata Capaian SNP Sekolah Model Jenjang SMK



Pelaksanaan program sekolah model di tahun 2018 sudah memasuki tahun ketiga. Berdasarkan grafik di atas, dijelaskan bahwa rata-rata capaian SNP jenjang SMK tahun 2016 adalah 3,43, untuk tahun 2017 adalah 4,28, sedangkan pada tahun 2018 rata-rata capaian SNP adalah 5,41 dari data dua sekolah yang dapat diakses capaian SNP-nya secara daring, sedangkan 16 sekolah lainnya di 9 kabupaten/kota belum dapat diakses. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan penginputan data PMP nasional secara online dan adanya permasalahan sistem yang ada di pusat. Meski demikian, dari dua sekolah yang capaian rata-rata SNP-nya dapat diakses mengalami kenaikan capaian SNP. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya SPMI di sekolah, maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan di kabupaten/kota pada umumnya. Sehingga melalui pengukuran ini maka ketercapaian sasaran strategis LPMP Kalimantan Timur melalui penjaminan mutu pendidikan, juga dapat terlihat peningkatannya. Hal ini dapat dibuktikan dari makin meningkatnya nilai capaian SNP jenjang SMK dari tahun ke tahun pada program sekolah model.

Persentase SMK yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP

Persentase SMK yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui program pengembangan sekolah model dalam kegiatan SPMI adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30. Persentase SMK yang Telah Difasilitasi dalam Pencapaian SNP

Realisasi 2016	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
40 %	60%	54,90 %	79,64 %	80%	79,64 %

Realisasi kinerja Persentase SMK yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP pada tahun 2018 pada sekolah model melalui kegiatan SPMI dan SPME mencapai 54,90% berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 60%. Capaian tersebut terealisasi sesuai target yang ditetapkan karena beberapa hal antara lain : (1) realisasi kegiatan program sekolah model pada tahun 2017 telah terealisasi sebanyak 44 sekolah dan sekolah yang dibina adalah sekolah yang sama sehingga pada tahun 2018 ini perealisasiannya dikurangi dan dialihkan ke jenjang SD, sebab tahun ini pencapaian terhadap renstra 2019 adalah 79,64% masih sisa 0,36% saja untuk mencapai target 80% pada renstra yang telah ditetapkan, dan (2) fungsi koordinasi yang berjalan baik antara LPMP Kalimantan Timur dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Ketercapaian indikator kinerja jumlah dan persentase SMK yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan dan penerapan penjaminan mutu pendidikan di sekolah sebagai suatu kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus menerus, terstandar, akurat, dan terdokumentasi serta mandiri. Pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 kegiatan sekolah model ini masih terfokus pada kegiatan fasilitasi. Untuk tahun 2019, kegiatan sekolah model ini juga terfokus pada kegiatan supervisi. Oleh karena itu, *output* Satuan Pendidikan yang Telah Difasilitasi Berdasarkan Capaian SNP telah mengalami revisi atau perubahan dalam renstra menjadi *output* yang berbunyi “Satuan Pendidikan yang Telah Difasilitasi dan Disupervisi Berdasarkan Capaian SNP.”

Hambatan/kendala permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja, antara lain :

1. Sebagian besar sekolah merasa terbebani dan tidak terbiasa dengan adanya pengadministrasian sekolah model, sehingga merasa telah menyita waktu proses belajar mengajar di sekolah.
2. Sebagian besar sekolah belum terbiasa untuk mendokumentasikan capaian kinerja dari apa yang mereka programkan berdasarkan RKAKS.

Langkah antisipasi yang diambil dalam menghadapi permasalahan dalam mencapai target indikator kinerja, antara lain :

1. Senantiasa melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap sekolah model melalui kegiatan monitoring dan evaluasi SPMI agar sekolah dapat memahami penerapan SPMI sebagai suatu sistem yang harus dilaksanakan secara mandiri, terus menerus, terstandar, terdokumentasi, dan akurat dalam manajemen pembelajaran dan manajemen sekolah.

Sehingga dapat tercipta budaya mutu di sekolah dan memberi pemahaman bahwa hasil dari penerapan SPMI tersebut dapat digunakan dalam rangka penilaian akreditasi sekolah.

2. Senantiasa memberikan pembinaan dan pemahaman untuk selalu menerapkan SPMI dan mendokumentasikan dokumen sesuai dengan RAKS.

I. SD yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP

Ketercapaian indikator kinerja jumlah SD yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP di samping dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model, dapat pula dilakukan melalui Implementasi Kurikulum 2013.

a. Implementasi Kurikulum 2013

1. Persentase SD yang Melaksanakan Kurikulum 2013

Tabel 3.31. Persentase SD yang Melaksanakan Kurikulum 2013

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
60,41 %	60 %	101,22%	100 %	80 %	100

2. Jumlah SD yang Melaksanakan Kurikulum 2013

Tabel 3.32. Jumlah SD yang Melaksanakan Kurikulum 2013

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
821 Sklh	737 sekolah	746 sekolah	101,22 %	1868 sekolah	100 %

Persentase SD yang melaksanakan kurikulum 2013 pada tahun 2016 telah terealisasi 25% dengan jumlah sekolah 214. Sedangkan persentase target renstra pada tahun 2017 adalah 35% atau 821 sekolah dan telah terealisasi 821 sekolah juga sesuai target jumlah sekolah yang ada pada perjanjian kinerja dengan persentase capaian pada tahun 2017 adalah 100%. Jumlah SD yang melaksanakan kurikulum 2013 sampai pada target renstra 2018 adalah 1.868 sekolah. Jadi, capaian terhadap renstra tahun 2019 pada tahun 2018 ini telah terealisasi 100%. Untuk kegiatan kurikulum, pada tahun 2018 ini telah berakhir dan terealisasi 100%. Jadi, realisasi ini sudah melebihi dari target renstra tahun 2019 pada *output* Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi dan disupervisi berdasarkan capaian SNP sebesar 80%. Hal ini disebabkan karena kegiatan kurikulum 2013 akan diambil alih oleh Direktorat GTK dan LPMP akan fokus pada kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan tupoksi LPMP.

Gambar 3.9. Kegiatan Pendampingan Kurikulum 2013 Jenjang SD di TPK SD Muhammadiyah 4 Samarinda



Gambar 3.10. Kegiatan Pendampingan Kurikulum 2013 Jenjang SMP



Berikut grafik perbandingan sekolah pelaksana kurikulum 2013 tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 jenjang SD.

Grafik 3.51. Jumlah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SD Tahun 2015-2018



Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD ditunjang oleh kegiatan; Rapat Koodinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bimbingan Teknis Tim

Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kabupaten/Kota Jenjang SD, Pendampingan Kurikulum 2013 IN dan ON, dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 Jenjang SD.

Hambatan dalam kegiatan pelaksanaan Kurikulum 2013 sebagai berikut :

1. Jumlah peserta dalam satu sekolah kuotanya terbatas, sehingga penerimaan materi belum optimal
2. Kurangnya koordinasi antara sekolah sasaran dengan sekolah induk kluster dalam proses kegiatan
3. Instruktur kabupaten/kota belum semuanya dapat menguasai materi, sehingga ada instruktur yang tidak siap untuk memberikan materi

Langkah antisipasi dalam mengatasi hambatan dan permasalahan, yaitu:

1. Melibatkan guru yang mempunyai kompetensi yang dapat menguasai konsep dasar dari materi yang diberikan agar dapat melakukan pengimbasan kepada rekannya secara optimal
2. Diupayakan agar LPMP selalu intens dalam proses pendampingan kurikulum.
3. Instruktur kabupaten/kota saling berkoordinasi dalam pemberian materi pendampingan agar materi yang tersampaikan dapat diterima secara optimal.

II. Jumlah SMP yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP

Ketercapaian indikator kinerja jumlah SMP yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP disamping dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model, dilakukan pula melalui Implementasi Kurikulum 2013.

a. Implementasi Kurikulum 2013

1. Persentase SMP yang Melaksanakan Kurikulum 2013

Tabel 3.33. Persentase SMP yang Melaksanakan Kurikulum 2013

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
72 %	60 %	107,18 %	100 %	80 %	

2. Jumlah SMP yang Melaksanakan Kurikulum 2013

Tabel 3.34. Jumlah SMP yang Melaksanakan Kurikulum 2013

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
276 sklh	167 sekolah	179 sekolah	107,18 %	625 sekolah	100 %

Persentase SMP yang melaksanakan kurikulum 2013 pada tahun 2016 telah terealisasi 25% dengan jumlah sekolah 123. Sedangkan persentase target renstra pada tahun 2017 adalah 35% atau 274 sekolah dan telah terealisasi 276 sekolah dengan capaian 43% telah melebihi target jumlah sekolah yang ada pada perjanjian kinerja dengan persentase capaian pada tahun 2017 adalah 100,72%. Jumlah SMP yang melaksanakan kurikulum 2013 sampai pada target renstra 2018 adalah 625 sekolah. Jadi, capaian terhadap renstra tahun 2019 pada tahun 2018 ini telah terealisasi 100%. Untuk kegiatan kurikulum, pada tahun 2018 ini telah berakhir dan terealisasi 100%. Jadi realisasi ini sudah melebihi dari target renstra tahun 2019 pada *output* Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi dan disupervisi berdasarkan capaian SNP sebesar 80%. Hal ini disebabkan karena kegiatan kurikulum 2013 akan diambil alih oleh Direktorat GTK dan LPMP akan fokus pada kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan tupoksi LPMP.

Berikut grafik perbandingan sekolah pelaksana kurikulum 2013 tahun 2015, 2016, 2017, dan tahun 2018 jenjang SMP.

Grafik 3.52. Jumlah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMP Tahun 2015-2018



Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMP ditunjang oleh kegiatan; Rapat Koodinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kab./Kota Jenjang SMP, Pendampingan Kurikulum 2013 IN dan ON, dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 Jenjang SMP.

Hambatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Kurikulum 2013 sebagai berikut :

1. Jumlah peserta dalam satu sekolah kuotanya terbatas, sehingga penerimaan materi belum optimal
2. Kurangnya koordinasi antara sekolah sasaran dengan sekolah induk kluster dalam proses kegiatan
3. Instruktur kabupaten/kota belum semuanya dapat menguasai materi, sehingga ada instruktur yang tidak siap untuk memberi materi

Langkah antisipasi dalam mengatasi hambatan dan permasalahan, yaitu:

1. Melibatkan guru yang mempunyai kompetensi yang dapat menguasai konsep dasar dari materi yang diberikan agar dapat melakukan pengimbasan kepada rekannya secara optimal
2. Diupayakan agar LPMP selalu intens dalam proses pendampingan kurikulum
3. Instruktur kabupaten/kota saling berkoordinasi dalam pemberian materi pendampingan agar materi yang tersampaikan dapat diterima secara optimal.

III. Jumlah SMA yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP

Ketercapaian indikator kinerja jumlah SMA yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP dilakukan pula melalui Program Implementasi Kurikulum 2013.

a. Implementasi Kurikulum 2013

1. Persentase SMA yang melaksanakan kurikulum 2013

Tabel 3.35. Persentase SMA yang Melaksanakan Kurikulum 2013

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
77 %	60 %	96 %	100%	80 %	100 %

2. Jumlah SMA yang melaksanakan kurikulum 2013

Tabel 3.36. Jumlah SMA yang Melaksanakan Kurikulum 2013

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
95 sekolah	50 sekolah	48 sekolah	96 %	213 sekolah	100 %

Persentase SMA yang melaksanakan kurikulum 2013 pada tahun 2016 telah terealisasi 25% dengan jumlah 34 sekolah. Sedangkan persentase target renstra pada tahun 2017 adalah 35% atau 96 sekolah dan telah terealisasi 95 sekolah dengan capaian renstra ditahun 2017 telah mencapai 77%, sedangkan pada tahun 2018 ini jumlah SMA yang melaksanakan kurikulum 2013 telah terealisasi 48 sekolah atau 96% dari target dalam perjanjian kinerja. Akan tetapi, persentase capaian terhadap renstra tahun 2018 sebanyak 213 sekolah telah mencapai target 100%.Kegiatan kurikulum ini selanjutnya akan diambil alih oleh Direktorat GTK. Jadi, capaian terhadap renstra tahun 2018 dapat terealisasi 100%

melebihi target renstra 2019 dengan persentase 80%. Berikut grafik perbandingan sekolah pelaksana kurikulum 2013 tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 jenjang SMA.

Grafik 3.53. Jumlah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2015-2018



Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMA ditunjang oleh kegiatan; Rapat Koodinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kabupaten/Kota Jenjang SMA, Pendampingan Kurikulum 2013 IN dan ON, dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 Jenjang SMA.

Hambatan dalam kegiatan pelaksanaan Kurikulum 2013, sebagai berikut :

1. Jumlah peserta dalam satu sekolah kuotanya terbatas, sehingga penerimaan materi belum optimal
2. Kurangnya koordinasi antara sekolah sasaran dengan sekolah induk kluster dalam proses kegiatan
3. Instruktur kabupaten/kota belum semuanya dapat menguasai materi, sehingga ada instruktur yang tidak siap untuk memberi materi

Langkah antisipasi dalam mengatasi hambatan dan permasalahan, yaitu:

1. Melibatkan guru yang mempunyai kompetensi yang dapat menguasai konsep dasar dari materi yang diberikan agar dapat melakukan pengimbasan kepada rekannya secara optimal
2. Diupayakan agar LPMP selalu intens dalam proses pendampingan kurikulum
3. Instruktur kabupaten/kota saling berkoordinasi dalam pemberian materi pendampingan agar materi yang tersampaikan dapat diterima secara optimal.

IV. Jumlah SMK yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP

Ketercapaian indikator kinerja jumlah SMK yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP disamping dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model, dilakukan pula melalui Implemetasi Kurikulum 2013.

a. Implementasi Kurikulum 2013

1. Persentase SMK yang melaksanakan kurikulum 2013

Tabel 3.37. Persentase SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
93 %	60 %	115,38%	100%	80 %	100 %

2. Jumlah SMK yang melaksanakan kurikulum 2013

Tabel 3.38. Jumlah SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	Capaian		
85 sekolah	13 sekolah	15 sekolah	115,38%	219 sekolah	100 %

Persentase SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 pada tahun 2016 telah terealisasi 25% dengan realisasi 24 sekolah. Sedangkan persentase target renstra pada tahun 2017 adalah 35% atau 86 sekolah dan telah terealisasi 85 sekolah dengan capaian 98,83% berada dibawah target jumlah sekolah yang ada pada perjanjian kinerja. Pada tahun 2018 ini telah terealisasi 15 sekolah dan melebihi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2018. Meski berada di bawah target 2017, pada tahun 2017 persentase capaian kurikulum ini telah mencapai 93% dan malah telah melebihi target renstra tahun 2019 yakni 80%. Pada tahun 2018 ini telah terealisasi 15 sekolah dan melebihi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2018. Kegiatan Kurikulum 2013 pada tahun 2018 ini sudah terealisasi 100% dengan jumlah sekolah keseluruhan 219 sekolah sebagaimana yang tercantum dalam target renstra 2019 dan akan diambil alih oleh Direktorat GTK dan LPMP akan lebih fokus pada program Penjaminan Mutu Pendidikan. Berikut grafik perbandingan sekolah pelaksana kurikulum 2013 tahun 2015, 2016, dan 2017 jenjang SMK.

Grafik 3.54. Jumlah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2015-2017



Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMK ditunjang oleh kegiatan; Rapat Koodinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kuikulum 2013 Tingkat Kabupateb/Kota Jenjang SMK, Pendampingan Kurikulum 2013 IN dan ON, dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 Jenjang SMK.

Hambatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Kurikulum 2013 sebagai berikut :

1. Jumlah peserta dalam satu sekolah kuotanya terbatas, sehingga penerimaan materi belum optimal
2. Kurangnya koordinasi antara sekolah sasaran dengan sekolah induk kluster dalam proses kegiatan
3. Instruktur kabupaten/kota belum semuanya dapat menguasai materi, sehingga ada instruktur yang tidak siap untuk memberi materi

Langkah antisipasi dalam mengatasi hambatan dan permasalahan, yaitu:

1. Melibatkan guru yang mempunyai kompetensi yang dapat menguasai konsep dasar dari materi yang diberikan agar dapat melakukan pengimbasan kepada rekannya secara optimal
2. Diupayakan agar LPMP selalu intens dalam proses pendampingan kurikulum
3. Instruktur kabupaten/kota saling berkoordinasi dalam pemberian materi pendampingan agar materi yang tersampaikan dapat diterima secara optimal.

Output dari Indikator Satuan Pendidikan yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Berdasarkan SNP adalah satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu dan berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Manfaat/Outcomedari hasil profil mutu/rapor mutu sekolah model/sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 adalah:

1. Proses pembelajaran berjalan sesuai standar

2. Pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai dengan standar.

Dampak/Impact dari pelaksanaan penjaminan mutu secara terus menerus pada sekolah model adalah :

1. Budaya mutu di satuan pendidikan terbangun
2. Mutu hasil belajar meningkat

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan pada sample 100 sekolah untuk seluruh jenjang pendidikan, rata-rata sekolah yang menerapkan SPMI pada sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan 5 siklus Penjaminan Mutu Pendidikan (Pemetaan, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Penetapan Standar Baru) telah mencapai 86% sekolah yang telah menerapkan SPMI ini baik dalam pengelolaan manajemen sekolah maupun manajemen pembelajaran.

Hambatan/kendala permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan baik pada sekolah model maupun sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 antara lain :

1. Sebagian besar satuan pendidikan menganggap bahwa pelaksanaan pengembangan sekolah model dapat mengganggu proses belajar mengajar, karena akan menyita waktu guru dan tenaga kependidikan
2. Sebagian besar satuan pendidikan menganggap bahwa beban kerja guru semakin bertambah karena harus melaksanakan program kegiatan sekolah dan administrasi pengembangan sekolah model.
3. Kualitas keberhasilan dari kurikulum 2013, yang berbasis pendidikan karakter pada satuan pendidikan itu sendiri sebagian pihak belum cukup dikaji dan belum mengalami uji coba yang memadai untuk diterapkan secara demikian masif.

Langkah antisipasi yang diambil dalam menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan baik pada sekolah model maupun sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 adalah:

1. Memberikan pembinaan dan menjalin hubungan komunikasi yang lebih efektif kepada satuan pendidikan agar kegiatan sekolah model tidak menyita proses belajar mengajar melalui kegiatan pengisian instrumen tentang pelaksanaan penjaminan mutu pada sekolah model, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekolah dan tidak menyita proses belajar mengajar. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan bagi sekolah model dan sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 agar hasil peta mutu dapat dimanfaatkan untuk keperluan peningkatan mutu pendidikan sehingga penjaminan mutu pendidikan senantiasa dapat diterapkan secara terus menerus supaya tercipta budaya mutu dalam pengelolaan manajemen pembelajaran dan manajemen pengelolaan

sekolah. Sehingga kegiatan pengembangan sekolah model bukan menambah beban kerja guru tetapi merupakan bagian pekerjaan rutin yang melekat dalam pekerjaan sehari-hari.

2. Melaksanakan kegiatan Bimtek program peningkatan mutu guru melalui kegiatan bimtek pelaksanaan kurikulum 2013 dengan menyiapkan tenaga fasilitator yang kompeten meliputi penyiapan tenaga fasilitator yang telah dilatih oleh Direktorat GTK dari pusat dan dilatih oleh LPMP Kalimantan Timur dengan pola pengintegrasian dan sosialisasi penguatan pendidikan karakter pada setiap mata pelajaran serta pengembangan literasi sekolah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sasaran strategis meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan yang ada pada renstra 2015 – 2019 LPMP Kalimantan Timur dan Perjanjian Kinerja LPMP Kalimantan Timur, capaian ini ekuivalen dengan terjadinya peningkatan rata-rata capaian SNP diseluruh jenjang pendidikan. Capaian rata-rata SNP ini pada tahun 2018 adalah 5,16 kategori menuju SNP 4, sedangkan pada tahun 2017, capaian rata-rata SNP di seluruh jenjang pendidikan adalah 4,68 kategori menuju SNP 3. Terjadinya kenaikan pencapaian dari tahun 2017 sebesar 0,48. Semua kegiatan dari *Output* Satuan Pendidikan yang difasilitasi berdasarkan SNP, dilaksanakan oleh Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi dan Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan.

SS. Terwujudnya Tata Kelola LPMP Kalimantan Timur yang Baik

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya Tata Kelola LPMP Kalimantan Timur yang Baik”, didalam prosesnya juga tidak terlepas dari 14 indikator kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja LPMP Kalimantan Timur, yakni 12 indikator kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dan 2 indikator kinerja pada sasaran strategis terwujudnya tata kelola LPMP Kalimantan Timur”. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LPMP Kalimantan Timur, tentunya dalam mewujudkan visi dan misi tersebut diperlukan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, akuntabel, serta adanya peningkatan layanan publik. Ketercapaian indikator ini disamping ditunjang oleh 12 indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan juga dapat ditunjang oleh 2 indikator kinerja pada sasaran strategis “Terwujudnya tatakelola LPMP Kaltim yang baik” berikut ini :

13. Indikator Kinerja: Data Pendidikan Dasar dan Menengah Akurat, Berkelanjutan dan Terbarukan

Keberhasilan output ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan yakni jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2016- 2018 yang terbarukan yang terdapat pada aplikasi DAPODIK dan jumlah sekolah yang mengirimkan data mutunya atau yang melakukan pemetaan mutu dari tahun 2016-2018 berdasarkan aplikasi DAPODIK. Adapun data target dan realisasi jumlah sekolah per jenjang dan yang terpetakan mutu pendidikannya dari tahun 2016- 2018 berdasarkan aplikasi DAPODIK disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.39. Data Progres Pengiriman Data Mutu Pendidikan Berdasarkan Aplikasi DAPODIK Tahun 2018

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target 2018	Persentase capaian 2018	Target Renstra 2019	Capaian terhadap renstra 2019
Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan dan terbarukan	75,29%	92 %	93,58%	95%	93,58%

Berdasarkan aplikasi DAPODIK tahun 2018, progres pengiriman data mutu pendidikan adalah diperoleh 93,58% bahwa dari 2.927 jumlah sekolah untuk seluruh jenjang pendidikan yang terdapat di wilayah Kalimantan Timur, jumlah sekolah yang melakukan pemetaan mutu dan yang mengirimkan data mutunya adalah 2.739. Berarti masih terdapat 188 sekolah yang belum melakukan pemetaan mutu, dimana target pemetaan mutu setiap tahun ditujukan kepada seluruh sekolah di Kalimantan Timur. Meski demikian, realisasi ini sebenarnya telah melebihi target tahun 2018 yakni 92% karena telah terealisasi dengan capaian 93,58%. Pada tahun 2018 ini, realisasi ini mendekati target capaian renstra tahun 2019 yakni 95%. Sedangkan jika dibandingkan tahun 2017 terealisasi 75,29% sekolah yang mengirimkan data mutunya dan tahun 2016 terealisasi 63,37%. Kegiatan ini selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan para *stakeholder* pendidikan dalam kegiatan penjaminan mutu pendidikan di Kalimantan Timur.

Berikut disajikan data target dan realisasi jumlah sekolah dan progres pengiriman data mutu pendidikan per jenjang yang diperoleh dari aplikasi DAPODIK sebagai berikut :

Tabel 3.40. Data Target dan Realisasi Jumlah Sekolah dan Progres Pengiriman Data Mutu Pendidikan Per Jenjang

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah SD			Jumlah SMP			Jumlah SMA			Jumlah SMK		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Data pendidikan dasar dan menengah, akurat, berkelanjutan dan	Target	1868	1868	1868	625	625	625	215	215	215	219	219	219
	Realisasi	1164	1382	1754	388	485	582	152	159	195	151	178	208
	%												
	Target	87	89	92	87	89	92	87	89	92	87	89	92

Indikator Kinerja		Jumlah SD			Jumlah SMP			Jumlah SMA			Jumlah SMK		
terbarukan	% Realisasi	62,3	74	93,9	62,1	77,6	93,1	70,7	70,7	90,7	69	69	95

Tujuan penyediaan data pokok pendidikan dasar dan menengah secara online adalah untuk menjaga integritas data individual, relasional, dan longitudinal. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas data sehingga ketersediaan data terpenuhi, memperhatikan asas manfaat, dan kehandalan data dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini juga diharapkan dapat mereduksi biaya data antara lain biaya pengumpulan dan pengolahan serta biaya kekeliruan informasi. Selanjutnya, pemanfaatan data pokok pendidikan tidak hanya untuk pemberian tunjangan guru, namun program BOS, PIP, dan pembangunan sarana prasarana lainnya secara terintegrasi. Dengan demikian, data pokok pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

14. Indikator Kinerja : Nilai SAKIP LPMP KALTIM tahun 2018

Keberhasilan *output*/indikator ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan, target, realisasi disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.41. Indikator Kinerja Terlaksananya Pelayanan di Bidang Pendidikan

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target 2018	Persentase capaian 2018	Target Renstra 2019	Capaian terhadap renstra 2019
Nilai minimal SAKIP LPMP Kalimantan Timur,	69,59	78	-	80	69,59

Gambar 3.11. Sertifikat Diklat SAKIP 2018 dalam Rangka Peningkatan Kompetensi



Ketercapaian indikator kinerja nilai minimal SAKIP LPMP Kalimantan Timur didukung oleh indikator kinerja kegiatanberikut ini :

Tabel 3.42. Indikator Kinerja Nilai Minimal SAKIP LPMP Kalimantan Timur

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2018	Realisasi 2018	Persentase Capaian
Terlaksananya layanan Dukungan Manajemen	12 layanan	12 layanan	100 %

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya dukungan oleh program/kegiatan :

- a. Penyusunan Program Kerja
- b. Koordinasi/Konsultasi Perencanaan dan Anggaran
- c. Penyusunan RKAKL
- d. Diseminasi Aplikasi Evaluasi dan Penganggaran
- e. Penyusunan LAKIP
- f. Monev Implementasi Kebijakan Kementerian Pendidikan
- g. Penyusunan Profil LPMP
- h. Sosialisasi Informasi Kepegawaian
- i. Sosialisasi Aplikasi E-Office
- j. Diseminasi Sekolah Tanggap Darurat
- k. Penyusunan Laporan Keuangan
- l. Rapat Evaluasi Anggaran
- m. Sekretariat SPI
- n. Peningkatan Kompetensi SPI

- o. Deseminasi Aplikasi SPAN
- p. FGD Pendampingan WBK Tahun 2018
- q. Rintisan Pendidikan Non Gelar
- r. Hardiknas Tahun 2018
- s. Workshop Tanggap Bencana (Sekolah Darurat) dan PPPK
- t. Workshop Penatausahaan BMN
- u. Diseminasi Aplikasi SIMAK dan SABMN
- v. Sosialisasi Program Lembaga

Gambar 3.12. Kegiatan Pendampingan Zona Integritas Menuju WBK Oleh Tim RBI Pusat



Gambar 3.13. Kegiatan Tanggap Bencana (Sekolah Darurat) di LPMP Kalimantan Timur



Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja antara lain :

1. Dalam melaksanakan kegiatan sering mengalami hambatan dalam menyesuaikan jadwal yang tepat, berkaitan dengan kesibukan atas tugas-tugas mendadak dari instansi lain (*stakeholder*) yang tergabung dalam TIM.
2. Dalam proses pelaksanaan pelaporan akuntabilitas kinerja masih bertumpu pada 1 operator saja dan belum merupakan kerja TIM.

Langkah antisipasi yang diambil agar target indikator kinerja dapat tercapai adalah :

1. Melakukan koordinasi secara internal dalam penyesuain jadwal kegiatan agar pelaksanaan kegiatan tidak berpengaruh dan tidak menghambat pelaksanaan kegiatan lainnya.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan peningkatan kompetensi SAKIP 2018, sehingga dalam penulisan laporan akuntabilitas kinerja lembaga nilai SAKIP LPMP Kalimantan Timur dapat meningkat.

Semua kegiatan dari *Output* terlaksananya pelayanan di bidang pendidikan, dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum. Hal ini sesuai dengan tugasnya yaitu melaksanakan tugas perencanaan anggaran, kepegawaian, dan tugas-tugas pendukung lainnya.

Gambar 3.14. Kegiatan Monev PPDB dengan Sistem Offline di Daerah Terpencil Kabupaten Mahulu, Kalimantan Timur



Gambar 3.15. Kegiatan PPDB dengan Sistem Online di Daerah Perkotaan (Kota Samarinda, TPK SMAN 2 Samarinda)



B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan revisi terakhir Pagu Anggaran LPMP Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah sebesar Rp 51.497.179.000 (lima puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dari total pagu anggaran tersebut, pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja berdasarkan pagu awal juga sebesar Rp 51.497.179.000 (lima puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dari total pagu awal yang terdapat pada perjanjian kinerja, terdiri atas 2 kegiatan yakni kegiatan prioritas dan kegiatan penunjang. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang terdapat dalam perjanjian kinerja LPMP Kalimantan Timur dengan Dirjen Dikdasmen yang dapat menunjang pencapaian sasaran strategis LPMP Kalimantan Timur, yakni meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Sedangkan kegiatan penunjang adalah kegiatan yang merupakan layanan dukungan manajemen dimana capaian kerjanya tercantum dalam perjanjian kinerja, yang dapat menunjang pencapaian sasaran strategis terwujudnya tata kelola LPMP Kalimantan Timur yang baik. Kegiatan penunjang lainnya yang tidak diperjanjikan adalah kegiatan yang merupakan kegiatan rutinitas perkantoran. Kegiatan prioritas dan kegiatan penunjang yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja berdasar pada PAGU anggaran revisi terakhir adalah sebesar Rp20.020.627.000 (dua puluh milyar dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Persentase pagu anggaran yang diperjanjikan adalah sebesar 38,87% dan yang tidak diperjanjikan adalah sebesar Rp 31.476.552.000 atau 61,12% dari total pagu anggaran sebesar Rp51.497.179.000 (lima puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Pagu anggaran yang diperjanjikan sebesar Rp17.206.576.000 digunakan untuk membiayai pencapaian satu sasaran strategis dengan 12 (duabelas) indikator kinerja dan pagu anggaran yang diperjanjikan sebesar Rp2.571.231.000 digunakan untuk membiayai pencapaian satu sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu di seluruh jenjang pendidikan, perealisasiannya didukung oleh 12 indikator kinerja, pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.206.576.000 dan teralisasi sebesar Rp16.245.023.510 dengan persentase capaian sebesar 94,41%.

Ketercapaian anggaran tersebut di atas didukung oleh 12 (dua belas) indikator kinerja, yang terdiri atas 2 output yaitu :

1. Output Satuan Pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya yang terdiri atas 8 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dialokasikan dengan anggaran (hasil revisi terakhir) sebesar Rp2.771.091.000 terealisasi sebesar Rp2.637.446.085 dengan persentase capaian sebesar 95,17%.
2. Output satuan pendidikan yang disupervisi dan difasilitasi berdasarkan 8 SNP. Ketercapaian anggaran dari output ini didukung oleh indikator kinerja jumlah sekolah yang telah disupervisi dan difasilitasi (telah menyesuaikan revisi renstra eselon 1) dalam pencapaian SNP dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model (SPMI dan SPME) pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.778.830.000 dan terealisasi sebesar Rp5.341.526.734 dengan persentase capaian sebesar 92,43% dan

jumlah sekolah yang telah disupervisi dan difasilitasi (telah menyesuaikan revisi renstra eselon 1) dalam pencapaian SNP dilakukan melalui Program Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.606.655.000 terealisasi sebesar Rp8.266.050.691 dengan persentase capaian sebesar 96,04%.

Sedangkan sasaran strategis terwujudnya tatakelola LPMP Kalimantan Timur yang baik, perealisasiannya didukung oleh 2 indikator kinerja. Pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.571.231.000 dan teralisasi sebesar Rp2.413.221.823 dengan persentase capaian sebesar 93,85%.

Ketercapaian anggaran tersebut di atas didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja, yang terdiri atas 2 output, yaitu :

1. Output data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan dan terbaru.

Ketercapaian anggaran dari output ini didukung oleh indikator kinerja kegiatan Bimtek DAPODIK dengan alokasi anggaran sebesar Rp292.820.000 terealisasi sebesar Rp283.350.900 dengan persentase 96,77%.

2. Output Nilai minimal SAKIP LPMP Kalimantan Timur.

Ketercapaian anggaran dari output ini didukung oleh indikator kinerja kegiatan *Output Layanan Dukungan Manajemen Eselon I* dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.571.231.000 terealisasi sebesar Rp2.413.221.823 dengan persentase 93,85%.

Realisasi anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja

Total anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp31.476.552.000, terealisasi sebesar Rp29.712.524.790 dengan persentase sebesar 94,39%, terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp9.387.233.000 terealisasi sebesar Rp8.115.972.682(86,45%)
- b. Belanja Barang sebesar Rp31.029.346.000 terealisasi sebesar Rp29.516.633.240(95,12%)
- c. Belanja Modal sebesar Rp11.080.600.000 terealisasi sebesar Rp(99,46 %)

Total pagu anggaran LPMP Kalimantan Timur tahun 2018 adalah sebesar Rp51.497.179.000 terealisasi sebesar Rp48.654.121.023 (94,48%).

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

1. Efisiensi SDM

Dalam perealisasi kegiatan melibatkan pegawai ASN LPMP Kaltim yang kompeten dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

2. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Dalam penggunaan sarana dan prasarana kegiatan lebih banyak menggunakan sarana dan prasarana di kabupaten/kota yang biaya dapat terjangkau jika dibanding dengan penggunaan fasilitas hotel dan fasilitas LPMP, karena penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien.

3. Efisiensi Anggaran

- LPMP Kalimantan Timur pada tahun 2018 berhasil melakukan penghematan anggaran sebesar Rp35.198.321.846 dengan persentase sebesar 68,35% dalam rangka optimalisasi anggaran. Dana tersebut berasal dari efisiensi belanja barang yang meliputi perjalanan dinas dan paket *meeting*, honorarium, belanja operasional, dan non operasional lainnya. Perhitungannya diperoleh dari rumus dan tabel berikut ini :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke\ i} / RVK_{ke\ i}}{PAK_{ke\ i} / TVK_{ke\ i}} \right) \times 100\%}{n}$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Sumber : Permenkeu RI No.249/PMK.02/2011

Tabel 3.43. Target dan Realisasi Anggaran per Keluaran

Keluaran	Volume		Anggaran	
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Keluaran 1 (Sekolah)	2.927	2.739	2.771.091.000	2.637.446.085
Keluaran 2 (sekolah)	220	220	5.778.830.000	5.341.526.734
Keluaran 3 (sekolah)	967	988	8.606.655.000	8.266.050.691

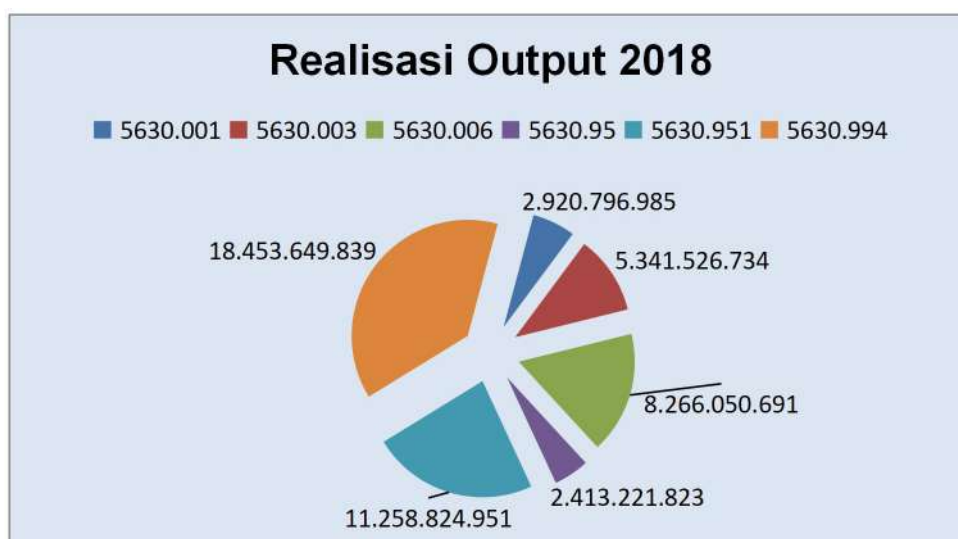
Sumber data : Aplikasi ONLINE Molk 2011

Tabel 3.44. Realisasi Anggaran LPMP KALTIM Tahun 2018 Per Tanggal 31 Desember 2018 jam 11:01:55

No	Output	Kode	PAGU (Rp) Dalam ribuan	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian
1	Terpetakannya Mutu Satuan Pendidikan	5630.001	2.771.091.000	2.637.446.085	95,17 %
2	Terfasilitasinya Satuan Pendidikan	5630.003	5.778.830.000	5.341.526.734	92,43%

3	Terimplementasikan Kur 2013 di setiap Jenjang sekolah	5630.006	8.606.655.000	8.266.050.691	96,04 %
4	Layanan Dukungan Manajemen eelon I	5630.950	2.571.231.000	2.413.221.823	93,85 %
5	Tersedianya desain analisis mutu pendidikan	5630.951	11.319.600.000	11.258.874.951	99,46 %
6	Layanan Perkantoran (Peningkatan Pelayanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan) (Dukungan Manajemen)	5630.994	20.156.952.000	18.453.649.839	91,55%
JUMLAH			51.497.179.000	48.654.121.023	94,48%

Grafik 3.55. Realisasi Output 2018



Grafik 3.56 Realisasi Anggaran 2018



Di lingkungan LPMP Kalimantan Timur sering terjadi revisi atas dokumen anggaran dilakukan sebanyak 5 kali dan terjadi revisi tingkat POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) terjadi satu kali. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian kegiatan dan optimalisasi anggaran.

Tabel 3.45. Revisi RKAKL LPMP KALTIM 2018 Per Output

No.	Nama komponen	DIPA Awal		DIPA Revisi Terakhir	
		Volume	Anggaran (Ribuan Rp.)	Volume	Anggaran (Ribuan Rp.)
1.	5630.001	2.927 sklh	2.916.554.000	2.927sklh	2.771.091.000
2.	5630.003	220 sklh	4.538.043.000	220 sklh	5.778.830.000
3.	5630.006	967 sklh	8.861.719.000	967 sklh	8.606.655.000
4.	5630.950	12 layanan	3.704.311.000	12 layanan	2.864.051.000
5.	5630.951	12 layanan	11.319.600.000	12 layanan	11.319.600.000

No.	Nama komponen	DIPA Awal		DIPA Revisi Terakhir	
		Volume	Anggaran (Ribuan Rp.)	Volume	Anggaran (Ribuan Rp.)
6.	5630.994	12 layanan	20.156.952.000	12 layanan	20.156.952.000

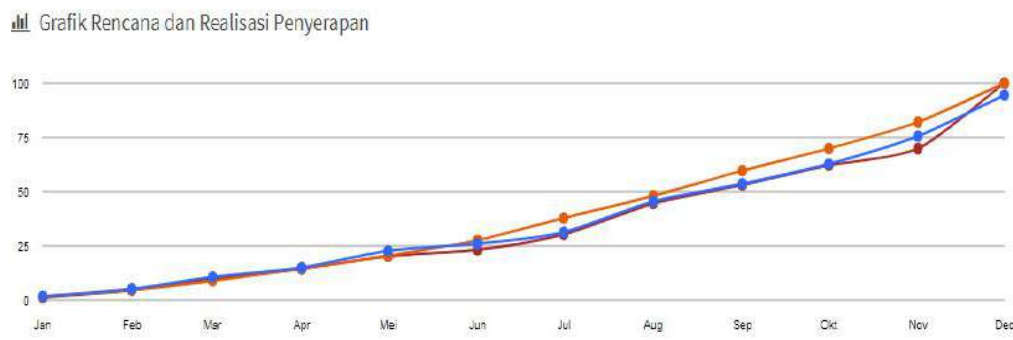
Adapun tanggal rincian revisi DIPA pada LPMP Kalimantan Timur selama tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.46. Tanggal Revisi DIPA LPMP KALTIM 2018

No	Tanggal	Revisi
1	15 Februari 2018	I
2	13 April 2018	II
3	2 Mei 2018	III
4	19 November 2018	IV
5	17 Desember 2018	V

Berikut disajikan diagram realisasi anggaran per output (kode output) capaian sampai pada bulan Desember 2018 per tanggal 31 Desember 2018 jam (sumber aplikasi MOLK ONLINE 2018)

Grafik 3.57. Capaian Realisasi Penyerapan 2018 Per Tanggal 31 Desember Jam 11:01:55



Sumber : Aplikasi Molk Online 2018

Sampai pada akhir bulan Desember, capaian sementara per SPM per tanggal 31 Desember jam 11:01:55. Pada Tahun 2018 ini, PAGU anggaran telah direalisasikan sebesar Rp.48.654.121.023 (Empat puluh delapan milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 94,48%. Rata-rata Pencapaian Kinerja

Keluaran (*Output*) adalah 98,58% termasuk kategori **Sangat Baik**. Yang penggolongannya diperoleh dari kategori nilai kinerja berikut :

Dengan nilai kinerja	
1.	>90% - 100 % : Sangat baik
2.	> 80 % - 90 % : Baik
3.	> 60 % - 80 % : Cukup
4.	> 50 % - 60 % : Kurang
5.	≤ 50 % : Sangat kurang

Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

- a. Adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh pusat, yang akan berpengaruh pada rangkaian pelaksanaan kegiatan yang ada di LPMP, akibatnya terjadi perealisasi kegiatan yang menumpuk diakhir tahun dan hal ini bahkan mengakibatkan realisasi anggaran seluruh satker dibawah Dikdasmen sangat rendah yang tentunya juga berpengaruh terhadap capaian kinerja Dikdasmen.
- b. Dalam melaksanakan kegiatan sering mengalami hambatan dalam menyesuaikan jadwal yang tepat,berkaitan dengan kesibukan atau tugas-tugas mendadak dari instansi lain (*stakeholder*) yang tergabung dalam tim.
- c. Adanya keterlambatan realisasi finish hasil raport mutu secara online dari pusat, sehingga akan mempengaruhi pula dalam penyajian data laporan kinerja LPMP Kalimantan Timur tahun 2018.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut di atas, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Akan melakukan perealisasi kegiatan sesegera mungkin setelah PUSAT telah melaksanakan kegiatan, sehingga dengan adanya keterlambatan ini tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja LPMP Kaltim dan tidak berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan lainnya.
- b. Melakukan koordinasi secara internal antar seksi dalam penyesuaian jadwal kegiatan.
- c. Menyediakan draf laporan kinerja LPMP Kalimantan Timur 2018 sedini mungkin, sehingga realisasi raport mutu melalui aplikasi secara online dari pusat dapat diinput ke dalam Draf Laporan.

Meski demikian, pencapaian kinerja keluaran sampai pada akhir bulan Desember ini terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan.

BAB IV

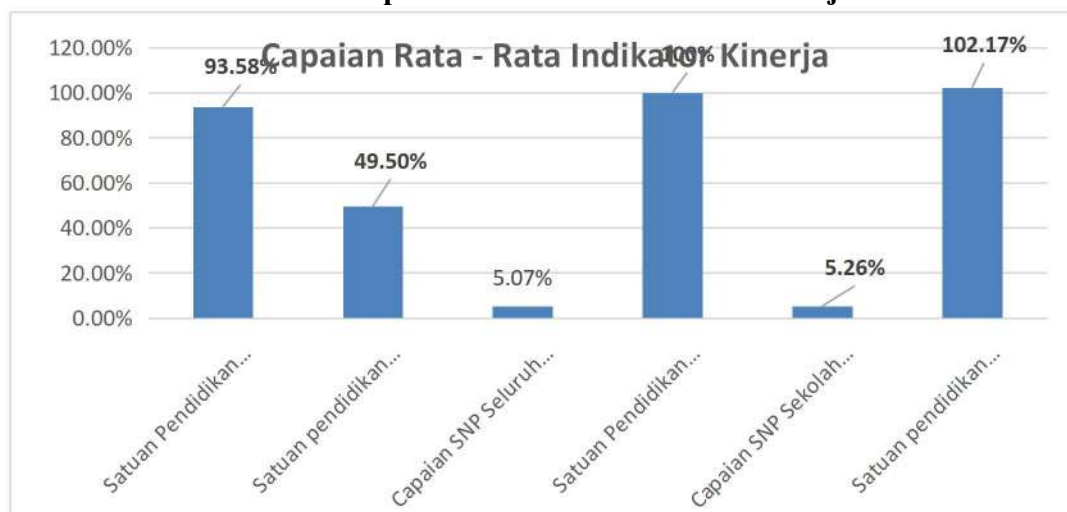
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja LPMP KALTIM Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis LPMP tahun 2015-2019 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program, dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh LPMP pada tahun 2018.

Pengukuran Rata-rata Capaian Kinerja Keluaran (*Capaian Output*) sampai pada akhir Bulan Desember 2018 ini menunjukkan pencapaian sebesar 98,58% termasuk kategori sangat baik. Sedangkan rata-rata persentase pencapaian pengukuran sasaran strategis LPMP Kalimantan Timur “Meningkatnya Penjaminan Mutu di Seluruh Jenjang Pendidikan” adalah ekuivalen dengan terjadinya peningkatan rata-rata capaian SNP diseluruh jenjang pendidikan pada tahun 2018 diperoleh capaian 5,07 kategori menuju SNP 4, capaian rata-rata indikator kinerja Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya 93,58%, capaian rata-rata satuan pendidikan yang meningkat indeks efektifitasnya 49,50% dan capaian rata-rata satuan pendidikan yang difasilitasi berdasarkan SNP melalui pengembangan sekolah model 100%, serta capaian rata-rata satuan pendidikan yang difasilitasi berdasarkan SNP melalui kurikulum 2013 mencapai 102,17%. Rata-rata persentase pencapaian pengukuran sasaran strategis “Terwujudnya tatakelola LPMP Kaltim yang baik” (Data pendidikan dasar dan menengah yang akurat dan terbaru) adalah sebesar 93,58%, sedangkan pada tahun 2017 diperoleh 75,3%. Dalam hal ini terjadi kenaikan pencapaian dari tahun 2017 sebesar 18,28%.

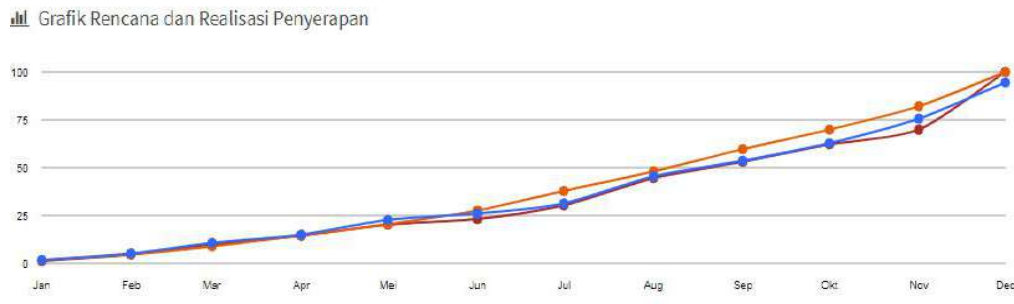
Grafik 4.1. Capaian Rata-rata Indikator Kinerja



Mengenai penyerapan anggaran meskipun pernah mengalami penurunan realisasi yang tidak sesuai dengan rencana penyerapan, pada bulan Desember telah terealisasi sebesar 94,48%. Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target rencana realisasi di enam bulan terakhir ini disebabkan karena adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan prioritas yang dilaksanakan di pusat yakni kegiatan Bimtek FASNAS yang meliputi kegiatan pemetaan mutu pendidikan dan sekolah model, sehingga akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan lainnya dimana kegiatan tersebut saling berkaitan. Capaian kinerja input tertinggi pada kategori kegiatan prioritas adalah pada Output Sekolah Yang Melaksanakan Kurikulum 2013 (kode 5630.006) sebesar 96,04% dan capaian kinerja fisik 102,17%, rencana dan jadwal kegiatan terealisasi sebagaimana dijadwalkan karena target realisasi kurikulum pada satuan pendidikan adalah awal tahun ajaran baru 2018. Sedangkan capaian kinerja input terendah untuk kategori kegiatan prioritas pada Output Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya (kode 5630.,001) sebesar 95,33%. Untuk capaian secara keseluruhan capaian kinerja yang paling rendah persentasenya adalah pada kegiatan pendukung yakni pada output 5630.950. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, LPMP Kalimantan Timur mendapatkan alokasi dana dengan PAGU AWAL untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp 51.497.179.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp 48.654.121.023 atau 94,48%. Efisiensi pemanfaatan sumber dana (anggaran) sebesar 68,35%.

Realisasi dan Rencana Kegiatan dengan PAGU Rp51.497.179.000,00.

Grafik 4.2. Rencana dan Realisasi Penyerapan



Sumber : Aplikasi Online Molk 2018

Keterangan: warna biru (realisasi)
 warna merah (rencana)

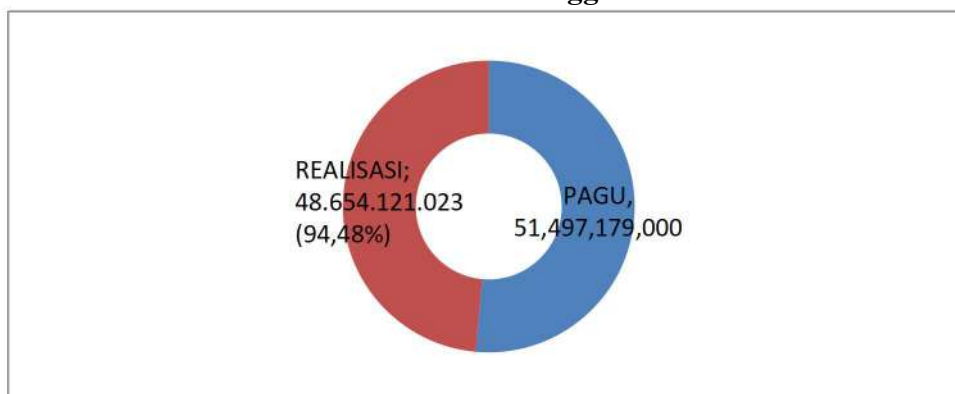
Berdasarkan tabel realisasi penyerapan anggaran LPMP Kalimantan Timur dengan nilai PAGU Rp51.497.179.000 pada bulan Januari hingga bulan Juni mengalami kenaikan persentase penyerapan anggaran dari yang semula direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja LPMP Kalimantan Timur termasuk kategori sangat baik jika diukur dari penyerapan anggaran. Meski pada bulan Juli - Desember, persentase penyerapan anggaran mengalami sedikit penurunan dari yang telah direncanakan karena adanya keterlambatan Bimtek Fasnas dari PUSAT yang pada output 5630.001 dan 5630.003 dan juga berdampak pada menumpuknya perealisasi kegiatan di akhir Desember. Sehingga capaian realisasi keuangan LPMP Kalimantan Timur secara keseluruhan sebagaimana yang telah terinput dalam Aplikasi Molk untuk di bulan Desember belum mencapai nilai 100% dari target yang telah direncanakan, realisasi keuangan posisi terakhir hanya mencapai 94,48%. Walau demikian, secara fisik merupakan pencapaian kinerja kategori Sangat Baik.

Berikut disajikan Diagram realisasi anggaran keseluruhan dan realisasi per output (Kode output) sampai pada bulan Desember 2018.

Grafik 4.3. Realisasi Anggaran per Output 2018



Grafik 4.4. Realisasi Anggaran 2018



Dapat ditarik kesimpulan bahwa Sasaran Strategis Meningkatkan Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan pada dasarnya telah terealisasi dengan persentase capaian rata-rata untuk output Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya adalah 93,58%. Berdasarkan hasil Aplikasi Online PMP Dikdasmen 2018 diperoleh perbandingan capaian SNP tahun 2017 dengan tahun 2018 dengan rata-rata capaian untuk tahun 2017 adalah 4,50 dan tahun 2018 rata-rata capaiannya adalah 5,02 berarti terjadi peningkatan capaian SNP, dari tahun 2017 ke tahun 2018. Demikian pula untuk “Output Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan capaian SNP” yakni pada kegiatan sekolah model telah terjadi peningkatan SNP dari tahun 2017 (rata-rata capaian SNP untuk seluruh jenjang adalah 4,87) ke tahun 2018 (rata-rata capaian SNP untuk seluruh jenjang adalah 5,26). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan, sehingga sasaran strategis **“Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan”** yang ada pada RENSTRA 2015 – 2019 LPMP Kalimantan Timur dan Perjanjian Kinerja LPMP Kalimantan Timur telah terealisasi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LPMP KALTIM Tahun 2018, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran serta jadwal kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
2. Terus berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya dan dana untuk mewujudkan target kinerja sebaik-baiknya dan mampu menghasilkan output yang relevan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja LPMP
3. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

4. Pelaksanaan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh pusat, yang berimbas pada kegiatan yang dilakukan oleh LPMP sebaiknya dilaksanakan pada awal tahun anggaran agar tidak berpengaruh pada capaian kinerja LPMP pada khususnya dan capaian kinerja dikdasmen pada umumnya, sehingga realisasi anggaran dan kegiatan sesuai target dan tidak menumpuk di akhir tahun.
5. Hubungan komunikasi efektif dengan para stakeholder dalam kegiatan penjaminan mutu dapat ditingkatkan, baik dengan pusat maupun daerah agar dapat terjadi peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan di tahun 2018 dan tahun mendatang.
6. Hasil capaian SNP/rapot mutu pendidikan untuk program sekolah model belum seluruhnya dapat diakses melalui aplikasi PMP online, sehingga masih perlu pembenahan terhadap aplikasi PMP agar di tahun mendatang peningkatan mutu pendidikan untuk seluruh sekolah model dapat diketahui dengan pasti berdasarkan hasil capaian SNP-nya.
7. Hasil rapot mutu pendidikan secara online untuk seluruh jenjang pendidikan seharusnya juga dapat diakses sebelum disahkan anggaran APBN/APBD karena hasil rapot mutu tersebut digunakan dalam rangka menyusun program tahun yang akan datang, sehingga hasil rapot mutu pendidikan yang *up to date* dapat digunakan oleh *stakeholder* pendidikan dalam mengambil kebijakan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. FORMULIR RENCANA STRATEGIS

Target kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan program untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penjabaran Rencana Kinerja LPMP Kalimantan Timur periode 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Untuk seluruh Jenjang dan jenis Pendidikan yang terdiri atas 2 IKK yaitu :

1.1. Satuan Pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya.

Tabel.1. Target Pemetaan Mutu dan Peningkatan Indeks Efektifitas Sekolah Tahun 2015 – 2019

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pemetaan mutu SD	%	90,15	100	100	100	100
2.	Peningkatan indeks efektifitas SD	%	5	15	40	75	95
3	Pemetaan mutu SMP	%	71,49	100	100	100	100
4	Peningkatan indeks efektifitas SMP	%	20	35	60	80	95
5	Pemetaan mutu SMA	%	71,49	100	100	100	100
6	Peningkatan indeks efektifitas SMA	%	20	35	60	80	95
7	Pemetaan mutu SMK	%	59,60	65	80	90	100
8	Peningkatan indeks efektifitas SMK	%	10	25	45	70	95
9	Pembinaan Dewan Pendidikan	%	10	350	350	350	350

- 1.2. Satuan Pendidikan Yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP. Meningkatnya persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektifitasnya berdasarkan SNP dapat dilihat dari tabel 10 berikut :

Tabel.2. Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektifitasnya berdasarkan SNP

No	Target	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektifitasnya berdasarkan SNP	14	29	52	76	95

Tabel.3 Target Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP per jenjang Pendidikan

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Supervisi dan fasilitasi pencapaian fasilitasi SD	%	16,8	25	40	60	80
2.	Supervisi dan fasilitasi pencapaian fasilitasi SMP	%	16,8	25	40	60	80

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
3.	Supervisi dan fasilitasi pencapaian fasilitasi SMA	%	16,8	25	40	60	80
4.	Supervisi dan fasilitasi pencapaian fasilitasi SMK	%	16,8	25	40	60	80

Tabel 4. Kegiatan pendukung LPMP Kalimantan Timur Tahun 2015 - 2019

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan dan terbaru	%	85	87	89	92	95

Tabel 5. Kegiatan Pendukung LPMP Kalimantan Timur dalam rangka pemenuhan Tata kelola manajemen yang Handal

No	Kegiatan Pendukung	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Nilai Minimal LAKIP LPMP KALTIM sebesar 80 (baik) tahun 2019	72	73	75	78	80

Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	2018			Target renstra 2019	% Capaian terhadap renstra 2019	
			Target	Realisasi	% Pencapaian			
1. Meningkatkan Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan	NO							
		Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya	2.204sklh	2.927 sekolah	2.739s ekolah	93,58 %	100 %	93,58%
	1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya.	>100 % (anomali)	100%	93,9 %	93,9 %	100%	93,9 %
		Persentase SD yang meningkat Indeks efektivitasnya	58,45 %	75 %	1051 sekolah	56,26%	95%	
		Output : Jumlah Satuan Pendidikan (SD) terpetakan mutu pendidikannya	1382 sklh	1868sekolah	1.754 sekolah	93,9 %	1868 sekolah	93,9 %
	2	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya.	>100 % (anomali)	100%	93,12 %	93,12 %	100 %	93,12 %
		Persentase SMP yang meningkat Indeks efektivitasnya	58,14 %	80%	329 sekolah	49,28%	95 %	
		Output : Jumlah Satuan Pendidikan (SMP) terpetakan mutu pendidikannya	485 sklh	625 sekolah	582 sekolah	93,12 %	625 sekolah	93,12 %
	3	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya.	>100 % (anomali)	100%	90,7 %	90,7 %	100 %	90,7 %
		Persentase SMA yang meningkat Indeks efektivitasnya	54,16 %	80%	107 sekolah	50 %	95 %	

	Output : Jumlah Satuan Pendidikan (SMA) terpetakan mutu pendidikannya	159 sklh	215 sekolah	195 sekolah	90,7 %	215 sekolah	90,7 %
4	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya.	>100 % (anomali)	90%	94,98 %	94,98 %	100 %	94,98 %
	Persentase SMK yang meningkat Indeks efektivitasnya	51,81 %	70 %	93 sekolah	42,46 %	95 %	
	Output : Jumlah Satuan Pendidikan (SMK) terpetakan mutu pendidikannya	178 sklh	219 sekolah	208 sekolah	94,98 %	219	94,98 %
	Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	430 sekolah	220 sekolah	220 sekolah	100 %	80 %	100 %
5	Persentase SD yang telah difasilitasi pencapaian SNP	40 %	60%	159,32 %	79,91 %	80 %	79,91%
	Output : Jumlah SD Yang difasilitasi dalam pencapaian SNP	198 sklh	59 sekolah	94 sekolah	159,32 %	493 sekolah	79,91 %
6	Persentase SMP yang telah difasilitasi pencapaian SNP	40 %	60%	100 %	80,12 %	80 %	80,12 %
	Output : Jumlah SMP Yang difasilitasi dalam pencapaian SNP	128 sklh	60 sekolah	60 sekolah	100 %	322 sekolah	80,12%

7	Persentase SMA yang telah difasilitasi pencapaian SNP	40 %	60%	76 %	80 %	80 %	
	Output : Jumlah SMA Yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP	60 sklh	50 sekolah	38 sekola h	76 %	155 sekolah	80 %
8	Persentase SMK yang telah difasilitasi pencapaian SNP	40 %	60%	54,90 %	79,64 %	80 %	79,64 %
	Output : Jumlah SMK Yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP	44 sklh	51 sekolah	28 seklah	54,90 %	113 sekolah	79,64 %
	Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Kurikulum 2013	1277 sklh	967 Sekolah	988 Sekolah	102,17 %	80 %	100 %
9	Persentase SD yang melaksanakan kurikulum 2013	60,41 %	60 %	101,2 2%	100 %	80 %	100 %
	Output : Jumlah Satuan pendidikan SD yang melaksanakan kurikulum 2013	821 sklh	737 sekolah	746 sek olah	101,22 %	1868 sekolah	100 %
10	Persentase SMP yang melaksanakan kurikulum 2013	72 %	60 %	107,18 %	100 %	80 %	100 %
	Output : Jumlah Satuan pendidikan SMP yang melaksanakan kurikulum 2013	276 sklh	167 Sekolah	179 sekolah	107,18 %	625 Sekolah	100 %
11	Persentase SMA yang	77 %	60 %	96 %	100 %	80 %	100 %

		melaksanakan kurikulum 2013					
		Output : Jumlah Satuan pendidikan SMA yang melaksanakan kurikulum 2013	95 sklh	50 Sekolah	48 sekolah	96 %	213 sekolah 100 %
	1	Persentase SMK yang melaksanakan kurikulum 2013	93 %	60 %	115,38 %	100 %	80 % 100 %
	2	Output : Jumlah Satuan pendidikan SMK yang melaksanakan kurikulum 2013	85 sklh	13 Sekolah	15 sekolah	115,38 %	219 sekolah 100 %
2. Terwujudnya tata kelola LPMP Kalimantan Timur yang baik	1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan	75,3 %	92 %	93,58 %	93,58 %	95 % 93,58 %
	2	Nilai Minimal SAKIP LPMP Kalimantan Timur	69,59	78			

Pengukuran Kinerja Sasaran LPMP Kalimantan Timur 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Kinerja 2018	Anggaran	Realisasi 2018	REALISASI 2018				Target Renstra 2019
						KINERJA	%	Anggaran	%	
1. Meningkatkan Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh Jenjang Pendidikan		Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya	2.927 sekolah	2.771.091.000	2.739 sekolah	93,58%	2.637.446.085	93,17%	100%	
	1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya.	100%		93,9	93,9%			100%	
	2	Persentase SD yang meningkat Indeks efektivitasnya	75%		56,26%	56,26%			95%	
	3	Output : Jumlah Satuan Pendidikan (SD) terpetakan mutu pendidikannya	1.868 sekolah		1754 sekolah	93,90%			1868 sekolah	
	4	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya.	100%		93,12%	93,12%			100%	
	5	Persentase SMP yang meningkat Indeks efektivitasnya	80%		49,28%	49,28%			95%	
	6	Output : Jumlah Satuan Pendidikan (SMP) terpetakan mutu pendidikannya	625 sekolah		582 sekolah	93,12%			625 sekolah	
	7	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya.	100%		90,7%	90,7%			100%	

8	Persentas e SMA yang meningkat Indeks efektivitas nya	80%			50%	50,00%			95%
9	Output : Jumlah Satuan Pendidika n (SMA) terpetaka n mutu pendidika nnya	215 sekolah			195 sekolah	90,7%			215 sekolah
10	Persentas e SMK yang telah dipetakan mutunya.	90%			94,98%	94,98%			100%
11	Persentas e SMK yang meningkat Indeks efektivitas nya	70%			42,46%	42,46%			95%
12	Output : Jumlah Satuan Pendidika n (SMK) terpetaka n mutu pendidika nnya	219 sekolah			208 sekolah	94,98%			219 sekolah
	Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarka n 8 SNP	220 sekolah	5.778.830.000		220 sekolah	100%	5.341.526.734		100%
13	Persentase SD yang telah difasilitasi pencapaian SNP	60%			159,32%	79,91%			80%
14	Output : Jumlah SD Yang difasilitasi dalam pencapaian SNP	59 sekolah			94 sekolah	159,32 %			493 sekolah
15	Persentase SMP yang difasilitasi pencapaian SNP	60%			100%	80,12%			80%
16	Output : Jumlah SMP Yang difasilitasi dalam pencapaia	60 sekolah			60 sekolah	100,00 %			322 sekolah

	n SNP								
17	Persentase SMA yang difasilitasi pencapaian SNP	60%			76%	80%			80%
18	Output : Jumlah SMA Yang difasilitasi dalam pencapaian SNP	60 sekolah			38 sekolah	76,00%			155 sekolah
19	Persentase SMK yang difasilitasi pencapaian SNP	60%			54,90%	79,64%			80%
20	Output : Jumlah SMK Yang difasilitasi dalam pencapaian SNP	51 sekolah			28 sekolah	54,90%			113 sekolah
	Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Kurikulum 2013	967 Sekolah	8.606.655.000		988 Sekolah	102,17 %	8.266.050.691		2927 sekolah
21	Output : Jumlah Satuan pendidikan SD yang melaksanakan kurikulum 2013	737 sekolah			746 sekolah	101,22 %			1868 sekolah
22	Output : Jumlah Satuan pendidikan SMP yang melaksanakan kurikulum 2013	167 Sekolah			179 Sekolah	107,18 %			625 sekolah
23	Output : Jumlah Satuan pendidikan SMA yang melaksanakan kurikulum 2013	50 Sekolah			48 Sekolah	96,00%			213 sekolah
	Output :	13			15 Sekolah				

	24	Jumlah Satuan pendidikan SMK yang melaksanakan kurikulum 2013	Sekolah			115,38 %			219 sekolah
2.Terwujudnya Tatakelola LPMP Kalimantan Timur yang baik	1	Data Pendidikan dasar dan Menengah akurat,berkelanjutan dan terbaru	92%			93,58%			95%
	2	Nilai Minimal SAKIP LPMP Kalimantan Timur	78			93,58%			

PERJANJIAN KINERJA AWAL



Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

TUGAS

Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

FUNGSI

1. Pemetaan Mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menjamin mutu pendidikan
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP

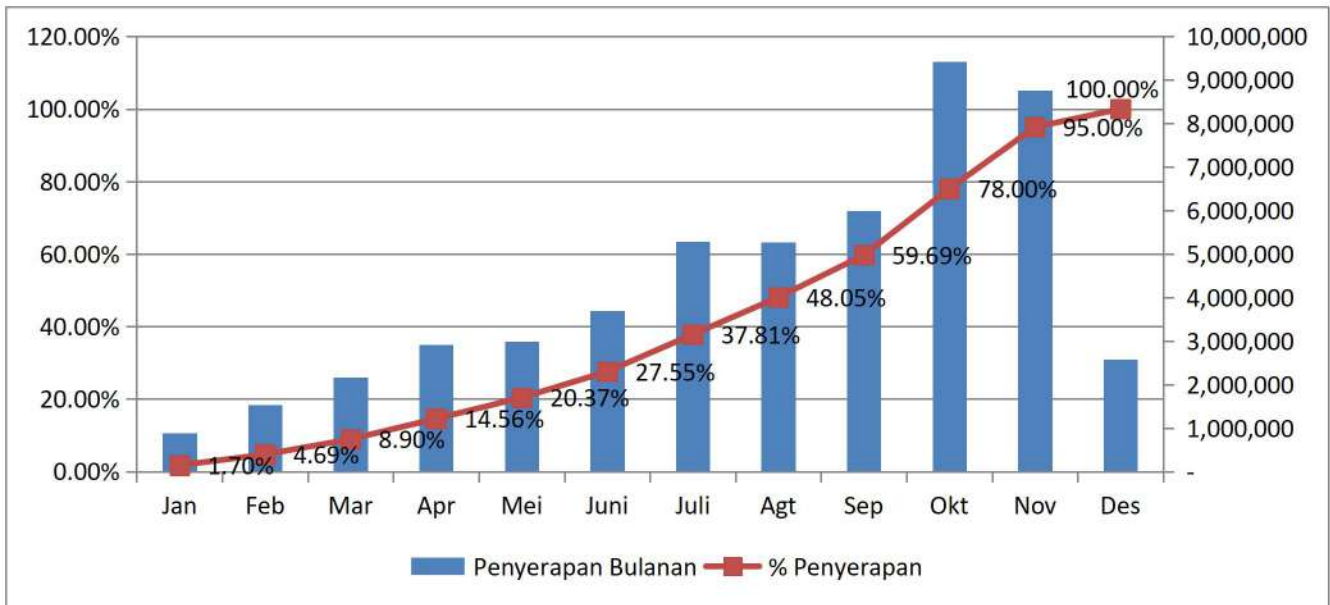
TARGET CAPAIAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	ANGGARAN	
1	2	3	4	
2. Meningkatkan ya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	2.918 sekolah SD,SMP,SMA,SMK	3.229.274.000	
	1	SD yang telah dipetakan mutunya	100%	.
	2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	75%	
		Output:		
		<i>SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	1.863	
	3	SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	
	4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	
		Output:		
		<i>SMP yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	620	
	5	SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	
	6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	
		Output:		
		<i>SMA yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	216	
	7	SMK yang telah dipetakan mutunya	90%	
	8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	70%	
		Output:		
		<i>SMK yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	219	
	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	220 sekolah SD,SMP,SMA,SMK	4.538.043.000	
	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	967 sekolah SD,SMP,SMA,SMK	8.861.719.000	
9	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%		
	Output:			
	<i>a. SD yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	59		
	<i>b. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	737	5.748.794.000	
10	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%		
	Output:			
	<i>a. SMP yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	60		
	<i>b. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	167	2.009.557.000	
11	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%		

		Output:		
		a. SMA yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	50	
		b. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013	50	732.107.000
	1	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian	60%	
	2	SNP		
		Output:		
		a. SMK yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	51	
		b. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	13	371.261.000
3. Terwujudnya Tata kelola LPMP Kalimantan Timur yang baik	1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan	92%	3.391.591.000
	2	Nilai Minimal SAKIP LPMP KALIMANTAN TIMUR	78	

Total Jumlah Anggaran Kegiatan **Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan** : Rp. **51.497.179.000** (Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018 LPMP KALIMANTAN TIMUR



Dalam ribu

KOMPONEN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
Penyerapan Bulanan	877.895	1.535.694	2.169.417	2.916.254	2.990.732	3.697.679	5.282.519	5.271.977	5.996.763	9.428.869	8.754.521	2.574.859
Penyerapan Kumulatif	877.895	2.413.589	4.583.006	7.499.260	10.489.992	14.187.671	19.470.190	24.742.167	30.738.930	40.167.799	48.922.320	51.497.179
% Penyerapan	1,70 %	4,68%	8,89%	14,56 %	20,37 %	27,55 %	37,80 %	48,04 %	59,69 %	78,0 %	95,0 %	100,00 %

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Januari 2018

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
Dan Menengah,

Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D
NIP 195905121983111001



Kepala LPMP KALIMANTAN TIMUR

Dr. Bambang Utoyo, M.Pd
NIP 1962061619841001

PERJANJIAN KINERJA REVISI



Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

TUGAS

Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

FUNGSI

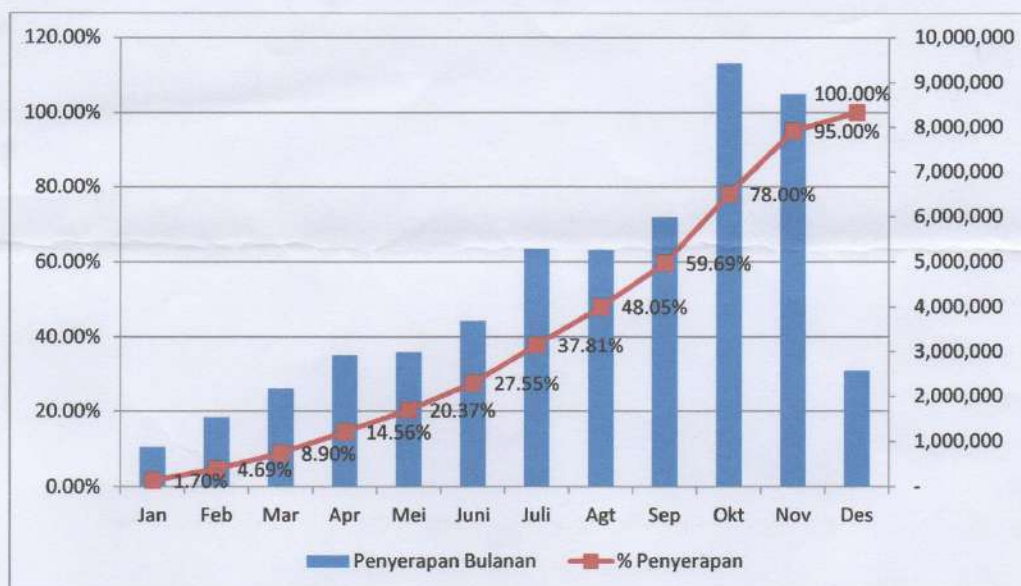
7. Pemetaan Mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
8. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
9. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan
10. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menjamin mutu pendidikan
11. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan
12. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	ANGGARAN
1	2	3	4
1. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	2.927 sekolah SD,SMP,SMA,SMK	3.229.274.000
	1 SD yang telah dipetakan mutunya	100%	.
	2 Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	75%	
	Output:		
	<i>SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	1.868	
	3 SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	
	4 Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	
	Output:		
	<i>SMP yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	625	
	5 SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	
	6 Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	
	Output:		
	<i>SMA yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	215	
	7 SMK yang telah dipetakan mutunya	90%	
	8 Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	70%	
	Output:		
	<i>SMK yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	219	
	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi dan Disupervisi Berdasarkan 8 SNP	220 sekolah SD,SMP,SMA,SMK	4.538.043.000
	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	967 sekolah SD,SMP,SMA,SMK	8.861.719.000
	9 SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
	Output:		
	<i>a. SD yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	59	
	<i>b. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	737	5.748.794.000
	10 SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
	Output:		
	<i>a. SMP yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	60	
<i>b. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	167	2.009.557.000	
11 SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%		
Output:			
<i>a. SMA yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	50		
<i>b. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	50		

				732.107.000
	12	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		Output:		
		<i>a. SMK yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i>	51	
		<i>b. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	13	371.261.000
4. Terwujudnya Tata kelola LPMP Kalimantan Timur yang baik	1	<i>Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru</i>	92%	3.391.591.000
	2	<i>Nilai Minimal SAKIP LPMP KALIMANTAN TIMUR</i>	78	

Total Jumlah Anggaran Kegiatan **Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan** : Rp. **51.497.179.000** (Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018 LPMP KALIMANTAN TIMUR



Dalam ribu

KOMPONEN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
Penyerapan Bulanan	877.895	1.535.694	2.169.417	2.916.254	2.990.732	3.697.679	5.282.519	5.271.977	5.996.763	9.428.869	8.754.521	2.574.859
Penyerapan Kumulatif	877.895	2.413.589	4.583.006	7.499.260	10.489.992	14.187.671	19.470.190	24.742.167	30.738.930	40.167.799	48.922.320	51.497.179
% Penyerapan	1,70%	4,68%	8,89%	14,56%	20,37%	27,55%	37,80%	48,04%	59,69%	78,0%	95,0%	100,00%

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, April 2018
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
Dan Menengah



Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D
NIP 195905121983111001

Kepala LPMP Kalimantan Timur



Mohamad Hartono, SH., M.Ed
NIP 196701101994031003

Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja

No		Pernyataan	Chek list
I	Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	√
		2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	√
		4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	√
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	√
III	Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan	√

		IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	
		5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir renstra	√
		7. Terdapat uraian analisis kinerja(program/kinerja pendukung pencapaian indikator kinerja /hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	√
		8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	√
		9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	
		10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	√

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LPMP KALIMANTAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu laporan kinerja LPMP Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2018 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen LPMP Kalimantan Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Samarinda 7 Januari 2019

Ketua TIM PEREVIU



Drs. Martanto Nugroho

NIP. 196103281993031002

